ETIKA BISNIS ISLAM

Ketiga

Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Naufal Luthfia Alifa, S.E., M.E

Penerbit :
CV. Elsi Pro

ETIKA BISNIS ISLAM
Ketiga

Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Naufal Luthfia Alifa, S.E., M.E

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Anggota IKAPI No. 464/JBA/2023

Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 087727871951
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Abu Hasan Mubarok
Desain cover & layout : Khayatun Nufus
Percetakan : CV. Elsi Pro
Cetakan : Februari 2025
298 Halaman

ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Etika Bisnis Islam Ketiga ini dapat tersusun dan selesai tepat waktu. Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip etika dalam menjalankan bisnis berdasarkan ajaran Islam.

Dewasa ini, dunia bisnis semakin kompleks dan membutuhkan landasan moral yang kuat agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika bisnis dalam Islam bukan hanya sekadar pedoman untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Buku ini disusun untuk memberikan pengetahuan serta panduan praktis kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, akademisi, dan pelaku bisnis, dalam memahami serta menerapkan konsep etika bisnis sesuai ajaran Islam.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, terutama kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bimbingan dan dukungan penuh. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk masukan, waktu, dan tenaga sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar buku ini dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Buku Etika Bisnis Islam Ketiga ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam di dunia bisnis dan dapat menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ini.

Cirebon, Mei 2025

Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga Buku Etika Bisnis Islam Ketiga dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah merekomendasi dan memfasilitasi proses penyusunan buku ini. Dukungan serta bimbingan yang diberikan sejak awal hingga akhir sangat membantu dalam mewujudkan karya ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim penulis, penyunting, dan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Dedikasi, ide, dan waktu yang kalian berikan telah memperkaya isi buku ini dan menjadikannya lebih bermanfaat bagi pembaca.

Semoga Buku Etika Bisnis Islam Ketiga ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi siapa pun yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara baik dan benar. Dengan penuh harapan dan penghargaan, kami berharap karya ini dapat menjadi amal jariyah yang terus membawa keberkahan bagi kita semua.

Cirebon, Mei 2025

Penulis

PETA KEDUDUKAN BUKU ETIKA BISNIS ISLAM KETIGA

Buku Etika Bisnis Islam Ketiga ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam dan diterapkan dalam konteks bisnis. Buku ini memiliki kedudukan yang penting dalam kurikulum studi ekonomi Islam, terutama karena perannya sebagai fondasi dalam membentuk pemahaman mahasiswa mengenai praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah. Dengan buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana bisnis harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sesuai tuntunan agama.

Sebagai salah satu modal dasar, Etika Bisnis Islam Ketiga menjadi mata kuliah awal yang harus dipahami sebelum mahasiswa melanjutkan ke mata kuliah yang lebih khusus, seperti Fikih Muamalah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Akuntansi Syariah. Di dalam modul ini, mahasiswa akan belajar mengenai konsep-konsep etika yang nantinya mendasari sikap dan keputusan mereka dalam dunia bisnis Islam. Dengan demikian, buku ini memiliki fungsi strategis untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menjalani mata kuliah lanjutan yang membutuhkan pemahaman etika dan moral yang kuat.

Buku ini juga memiliki kedudukan penting dalam membentuk karakter dan integritas mahasiswa. Selain aspek akademik, buku ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kebenaran yang menjadi dasar moral dalam praktik bisnis. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, baik dalam konteks kampus maupun di lingkungan kerja

nantinya. Dengan bekal ini, mereka dapat menjadi individu yang mampu menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan aspek etika dan nilai kemanusiaan.

Di luar dunia akademik, kedudukan buku Etika Bisnis Islam Ketiga juga penting dalam membekali mahasiswa menghadapi dunia profesional yang dinamis. Dunia kerja memerlukan individu yang tidak hanya berkompeten tetapi juga memiliki prinsip moral yang kuat. Buku ini mempersiapkan mahasiswa agar memiliki landasan yang kokoh dalam bersikap dan mengambil keputusan bisnis yang etis di masa depan, terutama ketika dihadapkan pada dilema atau tantangan moral dalam bisnis.

Akhirnya, buku Etika Bisnis Islam Ketiga ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam. Dengan menyajikan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlandaskan ajaran agama, buku ini berperan dalam memperkaya kajian akademis dan penelitian di bidang ekonomi Islam yang semakin relevan di era modern ini. Kedudukannya yang strategis menjadikan buku ini bukan hanya sebagai bagian dari kurikulum, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang mendukung perkembangan wawasan bisnis Islam yang lebih berkelanjutan dan manusiawi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

UCAPAN TERIMA KASIH v

PETA KEDUDUKAN BUKU ETIKA BISNIS ISLAM KETIGA vii

DAFTAR ISI ix

Bahan Ajar 5 ETIKA BISNIS ISLAM 1

Bahan Ajar 5 ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN GLOBAL 3

OVERVIEW 3

A. Deskripsi Singkat Materi yang Akan Dibahas 3
B. Relevansi 4
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 6

Bahan Ajar 5 ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN GLOBAL 9

Topik 1: Ekonomi Bisnis Islam sebagai Sarana Promosi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan 11

A. Etika Bisnis Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 11
B. Etika Bisnis Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat 38
C. Rangkuman 63
D. Penilaian Formatif 65

Topik 2: Ekonomi Bisnis Islam dalam Konteks Global 1 73

A. Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Internasional 73
B. Etika Bisnis Islam dalam Interaksi Lintas Negara 92
C. Rangkuman 109
D. Penilaian Formatif 111

Topik 3: Ekonomi Bisnis Islam dalam Konteks Global 2 117

A. Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Industri Kreatif antar Negara 117
B. Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Pariwisata antar Negara 142
C. Rangkuman 168
D. Penilaian Formatif 170

DAFTAR PUSTAKA 177

Bahan Ajar 6 ETIKA BISNIS ISLAM 183

Bahan Ajar 6 ETIKA BISNIS DALAM DISKUSI KONTEMPORER 185

OVERVIEW 185

A. Deskripsi Singkat Materi yang Akan Dibahas 185
B. Relevansi 186
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 187

Topik 1: Eksplorasi Literatur dan Fatwa terkait Etika Bisnis Islam 189

A. Literatur Klasik terkait Etika Bisnis Islam 189
B. Fatwa Kontemporer terkati Etika Bisnis Islam 215
C. Rangkuman 235
D. Penilaian Formatif 237

Topik 2: Penerapan Etika dalam Praktek Bisnis Islam 243

A. Etika Islam dalam Praktek Bisnis Sektor Pengadaan Barang 243
B. Etika Islam dalam Praktek Bisnis Sektor Penyedia Jasa 260
C. Rangkuman 279
D. Penilaian Formatif 281

DAFTAR PUSTAKA 287

BIOGRAFI PENULIS 288

Bahan Ajar 5
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN GLOBAL

Bahan Ajar 5
ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM PEMBERDAYAAN GLOBAL

OVERVIEW

A. Deskripsi Singkat Materi Yang Akan Dibahas

Bahan ajar Bisnis Islam dalam Pemberdayaan Global ini mengupas secara mendalam mengenai Etika Bisnis Islam sebagai Sarana Promosi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan serta Etika Bisnis Islam dalam Konteks Global. Modul ini terdiri dari tiga topik bagian yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasari etika bisnis Islam dalam konteks pemberdayaan global.

Pada topik 1: Etika Bisnis Islam sebagai Sarana Promosi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, bagian ini akan membahas konsep dasar etika bisnis dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Topik-topik yang dibahas termasuk diskusi peran etika bisnis Islam dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak sosial.

Pada topik 2: Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Internasional, dan Etika Bisnis Islam dalam Investasi Lintas Negara, bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana etika bisnis Islam mengatur praktik perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Fokus akan diberikan pada nilai-nilai etis dalam perdagangan internasional, serta nilai-nilai etis dalam investasi lintas negara. Diskusi juga akan membahas pentingnya membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan

berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat dalam lingkup globalisasi ekonomi.

Pada topik 3: Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara, dan Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Pariwisata Antar Negara, bagian ini akan mendalami bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam kerjasama antar negara dalam industri kreatif dan pariwisata. Topik-topik yang akan dibahas mencakup penghargaan terhadap budaya lokal, integrasi nilai-nilai Islam dalam produk-produk kreatif, dan promosi budaya melalui kerjasama lintas negara. Diskusi akan menyoroti pentingnya menjaga keaslian budaya dalam produksi kreatif dan peran etika dalam memastikan keberlanjutan pariwisata yang bertanggung jawab.

Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai etika bisnis dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks global untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kerjasama antar negara yang bermartabat dalam industri kreatif dan pariwisata.

B. Relevansi

Etika bisnis Islam menawarkan landasan moral yang kuat dan relevan dalam menghadapi tantangan global kontemporer. Bagian ini dari modul bertujuan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai etika Islam tidak hanya memberikan pedoman untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab di tingkat lokal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks global. Salah satu aspek utama yang dibahas adalah pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi ekonomi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya membantu menciptakan

lingkungan bisnis yang stabil, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai negara.

Dalam konteks perdagangan internasional dan investasi lintas negara, etika bisnis Islam menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Prinsip keadilan dalam penentuan harga dan perlindungan terhadap konsumen menjadi landasan yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan dan pelaku bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat dalam hubungan ekonomi global. Dengan adanya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, praktik bisnis dapat lebih terjamin adil dan berkelanjutan, mengurangi risiko ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam perdagangan internasional.

Di sektor industri kreatif dan pariwisata, etika bisnis Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan penghargaan terhadap kekayaan budaya dan lingkungan alam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dan mengintegrasikannya ke dalam produk-produk kreatif dan pengelolaan destinasi pariwisata, praktik bisnis dapat menghasilkan dampak yang positif bagi keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan perdamaian lintas budaya. Ini tidak hanya membangun citra yang positif bagi industri kreatif, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Selain itu, relevansi etika bisnis Islam terlihat dalam kemampuannya untuk memperkuat integrasi ekonomi antara negara-negara dengan cara yang bermartabat. Dalam kerjasama lintas negara, prinsip-prinsip ini mengarah pada pengembangan hubungan bisnis yang berdasarkan saling menguntungkan dan didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi kerjasama ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan di antara komunitas internasional.

Secara keseluruhan, modul ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana etika bisnis Islam tidak hanya relevan dalam konteks lokal dan regional, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan. Dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis, dapat tercipta lingkungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat di pasar global. Ini memungkinkan perusahaan dan komunitas internasional untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era globalisasi ini.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Bahan Ajar Etika Bisnis Islam dalam Pemberdayaan Global dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks global modern. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai moral yang mendasari praktik bisnis dalam Islam, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai tingkat skala, dari lokal hingga internasional.

Mata kuliah ini akan membahas aplikasi etika bisnis Islam dalam konteks perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Mahasiswa akan memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan dalam transaksi, kejujuran dalam komunikasi bisnis, dan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab dapat membentuk sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan di pasar global yang kompleks.

Mahasiswa juga akan menggali bagaimana etika bisnis Islam memengaruhi pengembangan industri kreatif di tingkat global. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana penghargaan terhadap kekayaan budaya dan integrasi nilai-nilai Islam dalam produk-produk kreatif dapat meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya di berbagai belahan dunia. Diskusi juga akan mencakup dampak ekonomi dari pengembangan

industri kreatif yang berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata global, mahasiswa akan mengeksplorasi bagaimana etika bisnis Islam dapat memandu pengelolaan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mereka akan memahami pentingnya menjaga keaslian budaya lokal, perlindungan lingkungan, dan pengembangan pariwisata yang menghargai kekayaan alam dan budaya di tempat-tempat wisata.

Mata kuliah ini juga akan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis studi kasus dan situasi nyata yang berkaitan dengan implementasi etika bisnis Islam dalam praktik bisnis global. Melalui studi kasus, mereka akan belajar untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari dalam konteks dunia nyata, sehingga dapat menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang etis dalam lingkungan bisnis yang kompleks.

Tujuan dari capaian pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu etika dalam konteks global. Mereka akan diajak untuk mengidentifikasi dilema etika, mengevaluasi konsekuensi dari berbagai tindakan, dan merumuskan solusi yang dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan ide-ide mereka terkait dengan etika bisnis Islam dan pemberdayaan ekonomi global. Kemampuan untuk mengartikulasikan argumen dan pandangan mereka dengan jelas dan meyakinkan akan ditekankan dalam berbagai aktivitas pembelajaran.

Kesimpulan dari capaian pembelajaran ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang beretika dalam dunia bisnis global. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, mahasiswa

diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, perdagangan yang adil, dan pengembangan industri kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan di tingkat global.

Bahan Ajar 5

ETIKA BISNIS ISLAM SEBAGAI SARANA PROMOSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TOPIK 1
ETIKA BISNIS ISLAM SEBAGAI SARANA PROMOSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Etika Bisnis Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi, keberdayaan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil bagian aktif dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini mengacu pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi individu, serta pengembangan kapasitas kolektif dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan ekonominya sendiri jika diberikan akses dan kesempatan yang setara dalam kehidupan ekonomi pada umumnya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, hingga memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam aktivitas ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berfokus pada pembangunan kapasitas masyarakat untuk mengendalikan kehidupan ekonomi sendiri, bukan hanya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan atau bantuan ekonomi. Hal ini sering kali melibatkan penyediaan peluang yang merata, pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan

pengaturan kelembagaan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mengedepankan aspek keadilan sosial dan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan dan pasar, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di dalam konteks Islam, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat didorong oleh nilai-nilai etika bisnis yang mengutamakan keadilan, amanah, dan keberkahan dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti zakat (sumbangan amal), sedekah (sumbangan), dan wakaf (sumbangan dalam bentuk aset) memberikan landasan untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang mampu dalam masyarakat.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tercermin dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk dampak dari perubahan iklim dan krisis ekonomi global.

Dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ini juga melibatkan peran penting dari lembaga keuangan mikro dan bank-bank syariah dalam menyediakan akses terhadap modal dan layanan keuangan kepada mereka yang kurang terlayani.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan hanya tentang peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga tentang menciptakan struktur

sosial dan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah langkah penting dalam mengarahkan masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

b. Landasan Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a) Al-Quran

1. Surah Al-Hasyr (59): 7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: "*Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai rampasan dari penduduk negeri-negeri, maka kepunyaan Allah, kepada Rasul, kepada kerabat Rasul, anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya jangan harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*."

Ayat ini mengatur distribusi kekayaan dan mengarahkan untuk memberikan bagian yang adil kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat.

2. Surah Al-Hujurat (49):10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*."

Ayat ini mengajarkan pentingnya *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam, yang meliputi dukungan dan tolong-menolong antar sesama dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

3. Surah At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amal), yang mempersatukan hati (orang-orang muallaf), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan*."

Ayat ini mengatur distribusi zakat dan sedekah dalam masyarakat Islam untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa (hati)." Hadis ini menegaskan bahwa kekayaan sejati bukan hanya berasal dari harta materi semata, tetapi juga dari kekayaan spiritual dan kebaikan hati yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat secara luas.

2. Hadis Riwayat Abu Dawud
   Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas pengarahan mereka. Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung

jawab atas pengarahan mereka. Seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas pengarahan mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas pengarahan mereka. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas pengarahan mereka." Hadis ini mengajarkan prinsip tanggung jawab sosial bagi setiap individu, termasuk dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan komunitas, serta pentingnya adil dalam kepemimpinan dan distribusi kekayaan.

3. Hadis Riwayat Muslim
   Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda: "Sedekah tidaklah mengurangi harta." Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang, malah akan membawa berkah dan keberkahan dalam sumber daya yang dimiliki, serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

4. Hadis Riwayat Muslim
   Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda: "Harta yang paling utama adalah harta yang bermanfaat bagi pemiliknya dan yang paling baik amalnya. Hadis ini menunjukkan bahwa harta yang sejati adalah harta yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta yang didapatkan dengan cara yang halal dan baik.

5. Hadis Riwayat Ibn Majah
   Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah ﷺ bersabda: ""Bantulah saudaramu, baik yang zalim maupun yang terzalimi." Para sahabat bertanya, "Kami tahu bagaimana memberi bantuan kepada yang terzalimi, tetapi bagaimana memberi bantuan kepada yang zalim?" Beliau menjawab, "Dengan mencegahnya dari berbuat

zalim, karena itu memberikan bantuan kepada yang zalim." Hadis ini mengajarkan pentingnya menolong orang lain, termasuk dengan cara mencegah orang lain melakukan kezaliman, yang bisa termasuk dalam konteks ekonomi dan distribusi kekayaan.

6. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda: "Hartamu hanyalah apa yang kamu infaqkan, sementara kamu akan dibiarkan sendirian dengan apa yang kamu tinggalkan." Hadis ini mengajarkan pentingnya pengelolaan kekayaan dan sumber daya dengan bijaksana serta berbagi kekayaan dengan orang lain sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Urgensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara. Berikut adalah beberapa urgensi atau pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat:

a) Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah suatu urgensi yang mendesak dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Hal ini bukan sekadar tujuan moral, tetapi juga kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pentingnya pengentasan kemiskinan tercermin dalam dampak positifnya terhadap masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu dan keluarga. Langkah-langkah untuk mencapai pengentasan kemiskinan meliputi program-program yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan

kebijakan inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.

Peran berbagai entitas, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan LSM, sangat penting dalam menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan ini. Pemerintah memiliki peran krusial dalam merancang kebijakan publik yang inklusif dan adil, serta menyediakan infrastruktur dasar dan layanan sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. LSM juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat miskin, memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan, dan memperkuat kapasitas komunitas untuk mandiri. Dengan kolaborasi yang efektif antara semua pihak terlibat, pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan sebagai langkah krusial menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

b) Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta kesempatan untuk menciptakan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan secara ekonomi, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat memiliki keamanan pangan, akses yang adil terhadap layanan dasar, dan perlindungan sosial yang memadai. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang stabil, meningkatkan

kualitas hidup secara keseluruhan, dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.

Peran berbagai entitas dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Pemerintah memainkan peran utama dalam menciptakan kebijakan publik yang mendukung pembangunan kesejahteraan, termasuk investasi dalam infrastruktur kritis, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sektor swasta juga berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, investasi dalam inovasi teknologi, serta pengembangan produk dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup. LSM mendukung dengan advokasi hak-hak sosial, memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, dan memperkuat kapasitas komunitas untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan ini penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat.

c) Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas merupakan proses penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu komunitas atau negara. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan peluang yang ada. Penguatan kapasitas tidak hanya tentang memberikan pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga tentang membangun kapasitas institusional, seperti organisasi masyarakat, kelompok usaha, dan lembaga ekonomi lokal. Dengan meningkatkan kapasitas ini, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mereka hadapi. Mereka dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, berinovasi dalam menemukan solusi

yang relevan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, penting dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Sektor swasta berkontribusi melalui investasi dalam pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. LSM mendukung dengan memperkuat jaringan sosial, memberikan bantuan teknis, dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung inisiatif pembangunan masyarakat. Dengan kolaborasi kuat antara semua pemangku kepentingan, penguatan kapasitas masyarakat menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

d) Pengurangan Kesenjangan Sosial

Pengurangan kesenjangan sosial merupakan tujuan yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Kesenjangan sosial mencakup disparitas dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial, kohesi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial melibatkan kebijakan dan program yang mendukung inklusi sosial, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan, program pendidikan yang merata, dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan komunitas yang terpinggirkan. Dengan mengurangi kesenjangan sosial, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih merata dari pembangunan

ekonomi dan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis.

Peran berbagai pihak sangat penting dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang inklusif dan adil, serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui kegiatan korporat sosial yang bertanggung jawab, menciptakan peluang kerja, dan berinvestasi dalam pengembangan komunitas lokal. LSM berperan dalam advokasi hak-hak sosial, memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, dan membangun kapasitas komunitas untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kolaborasi yang kokoh antara semua pihak terkait, pengurangan kesenjangan sosial dapat menjadi bagian integral dari upaya menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan secara keseluruhan.

e) Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti tidak hanya fokus pada peningkatan PDB atau indikator ekonomi makro lainnya, tetapi juga pada distribusi hasil dari pertumbuhan tersebut secara merata di antara seluruh warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendorong inklusi ekonomi.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu adanya investasi dalam pembangunan kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan

yang berkualitas, dan program sosial yang memungkinkan akses yang adil bagi semua. Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan peluang kerja, mendorong inovasi, dan berinvestasi dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah juga dapat berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan hanya tentang angka-angka statistik, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan yang merata bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi yang dihasilkan.

f) Stabilitas Sosial dan Keamanan

Stabilitas sosial dan keamanan adalah fondasi yang penting dalam memastikan kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Stabilitas sosial merujuk pada kondisi di mana masyarakat dapat hidup bersama secara damai tanpa konflik yang merusak, baik itu konflik sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini mencakup adanya kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Keamanan, di sisi lain, mengacu pada perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal yang dapat mengganggu ketertiban umum, baik itu dari tindakan kriminal, terorisme, maupun konflik bersenjata.

Pentingnya stabilitas sosial dan keamanan tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga kondisi perekonomian, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tanpa stabilitas sosial yang memadai, masyarakat akan sulit untuk fokus pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang stabil dengan menjaga keadilan, keamanan,

dan penegakan hukum yang efektif. Kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil juga penting dalam mendukung upaya ini, memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasa aman dan dihormati dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas sosial dan keamanan, sebuah negara dapat menggerakkan potensi penuhnya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh penduduknya.

g) Resiliensi terhadap Krisis Ekonomi

Resiliensi terhadap krisis ekonomi merupakan kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk bertahan, pulih, dan bahkan tumbuh dalam menghadapi tantangan ekonomi yang besar, seperti resesi global, krisis keuangan, atau bencana alam. Resiliensi ekonomi mencakup beberapa aspek penting seperti diversifikasi ekonomi, ketahanan terhadap goncangan eksternal, fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global. Negara yang memiliki tingkat resiliensi ekonomi yang tinggi mampu mengurangi dampak negatif krisis terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas sosial.

Faktor-faktor yang mendukung resiliensi ekonomi meliputi kebijakan fiskal yang seimbang, kebijakan moneter yang tepat, infrastruktur yang kuat, dan sistem keuangan yang stabil. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Pentingnya resiliensi ekonomi semakin terlihat dalam era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat, di mana negara-negara perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul

dalam jangka panjang. Dengan membangun resiliensi ekonomi yang kokoh, sebuah negara dapat memastikan bahwa kehidupan ekonomi masyarakatnya tetap stabil dan berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan eksternal yang besar.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkelanjutan secara ekonomi.

d. Keterkaitan Etika Bisnis Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Keterkaitan antara etika bisnis Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat erat, didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengedepankan keadilan sosial serta tanggung jawab sosial. Etika bisnis Islam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa cara yang mengedepankan prinsip-prinsip moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa cara bagaimana etika bisnis Islam dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat:

a) Distribusi Kekayaan

Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga sosial, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan yang mengikuti etika bisnis Islam diharapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Praktik bisnis yang didasarkan pada keadilan sosial juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam juga mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis mereka. Ini termasuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan pemangku kepentingan internal tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Dengan mempromosikan keadilan sosial, perusahaan tidak hanya menjalankan bisnis untuk keuntungan semata, tetapi juga mengadopsi tanggung jawab sosial yang membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip ini menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pembangunan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

b) Penghindaran Praktik Riba dan Spekulasi

Dalam prinsip etika bisnis Islam, penghindaran terhadap praktik riba (bunga) dan spekulasi memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Praktik riba dianggap sebagai hal yang tidak etis dalam Islam karena dianggap merugikan dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi masyarakat, penghindaran riba membantu mendorong penggunaan mekanisme keuangan yang lebih inklusif dan adil, seperti akad-akad keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan saling berbagi risiko antara pihak yang terlibat. Ini memberikan kesempatan

yang lebih besar bagi individu dan kelompok yang lebih lemah ekonominya untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha mereka tanpa terjerat dalam siklus utang yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penghindaran terhadap spekulasi dalam bisnis Islam juga penting dalam mempromosikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menghindari praktik-praktik yang bersifat spekulatif dan tidak produktif, yang dapat memicu volatilitas pasar dan merugikan masyarakat luas. Dengan memprioritaskan investasi yang berbasis pada nilai tambah nyata dan keberlanjutan jangka panjang, bisnis Islam dapat berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Praktik bisnis yang adil dan transparan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan secara individual tetapi juga berkontribusi positif dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

c) Zakat dan Dana Sosial Islam Lainnya

Etika bisnis Islam menghubungkan prinsip-prinsip keagamaan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat dan dana sosial Islam lainnya. Zakat, sebagai kewajiban sosial umat Islam, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang kuat. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan benar, masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan dapat menerima bantuan finansial untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, zakat juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum dengan memastikan bahwa kekayaan

yang diperoleh dari ekonomi berputar kembali dalam masyarakat untuk manfaat bersama.

Selain zakat, dana sosial Islam lainnya seperti infaq, sedekah, dan wakaf juga berperan dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Praktik infaq dan sedekah memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk memberikan sumbangan sukarela mereka untuk program-program pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Sementara itu, wakaf (sumbangan dalam bentuk aset produktif) dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya. Secara kolektif, prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat aspek keagamaan dalam praktik bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membangun fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan sosial di komunitas yang lebih luas.

d) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dalam konteks pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), etika bisnis Islam memiliki peran strategis dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. UKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dengan potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, mendorong perusahaan untuk mendukung UKM melalui bantuan teknis, akses ke pasar yang adil, dan dukungan modal yang memadai. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperkuat daya saing UKM tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan inklusif di tingkat lokal.

Selain itu, etika bisnis Islam juga mendorong perusahaan untuk mengadopsi pendekatan berbasis keberlanjutan dalam dukungan terhadap UKM. Ini mencakup pengembangan praktik bisnis yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara bijaksana, dan integrasi nilai-nilai sosial dalam operasional mereka. Dengan memberdayakan UKM secara berkelanjutan, etika bisnis Islam tidak hanya membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lebih luas. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi, kreativitas, dan inklusi sosial, yang pada akhirnya memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial di tingkat komunitas.

e) Pendekatan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas dalam penerapan etika bisnis Islam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat dan dana sosial Islam lainnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kemandirian ekonomi kolektif. Peran komunitas dalam mengelola dan mengalokasikan zakat serta dana sosial lainnya memungkinkan untuk adanya solusi yang lebih tepat dan relevan terhadap masalah-masalah ekonomi lokal, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan merancang program yang berkelanjutan. Melalui sinergi ini, perusahaan-perusahaan dapat berperan sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi yang

inklusif dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses pasar, dan dukungan modal kepada UKM dan inisiatif ekonomi sosial lainnya. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menjadi landasan moral dalam praktik bisnis, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi transformasi ekonomi yang memberdayakan masyarakat secara luas, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Dengan demikian, etika bisnis Islam berperan sebagai sarana untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan secara individu tetapi juga memperkuat keberlangsungan dan kesejahteraan komunitas secara luas.

e. Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peran etika bisnis sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Etika bisnis menyangkut prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa cara di mana etika bisnis berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat:

a) Penciptaan Nilai Jangka Panjang

Penciptaan nilai jangka panjang merujuk pada strategi atau praktek bisnis yang berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini tidak hanya mencakup pencapaian keuntungan finansial dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari kegiatan bisnis. Prinsip utama dari penciptaan nilai jangka panjang adalah memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya memberikan manfaat bagi

pemangku kepentingan langsung seperti pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat secara luas dan lingkungan di mana bisnis beroperasi.

Untuk mencapai penciptaan nilai jangka panjang, perusahaan perlu mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab, mematuhi standar etika yang tinggi, dan mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasionalnya. Ini termasuk memperhatikan dampak lingkungan dari rantai pasokan, mengelola risiko sosial dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kondisi kerja yang adil, serta berinvestasi dalam inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan demikian, penciptaan nilai jangka panjang bukan hanya tentang menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian secara keseluruhan.

b) Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam konteks etika bisnis Islam, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi pijakan utama untuk mencapai pemberdayaan ekonomi. Keadilan sosial mengacu pada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Perusahaan yang menganut etika bisnis Islam diharapkan untuk berperan dalam memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, kesempatan kerja yang setara, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya menciptakan fondasi yang lebih solid untuk stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dengan memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat dalam konteks etika bisnis Islam melibatkan dukungan terhadap inisiatif yang memberdayakan masyarakat lokal. Ini termasuk pengembangan ekonomi lokal melalui investasi dalam UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Perusahaan juga diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka, seperti pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan peningkatan kualitas hidup di sekitar wilayah operasional mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjalankan operasi bisnis untuk keuntungan semata, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan manfaat yang jelas dan berkelanjutan bagi masyarakat tempatan, sehingga bersama-sama membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik.

c) Pendorong Inovasi Sosial dan Ekonomi

Pendorong inovasi sosial dan ekonomi mencakup berbagai faktor yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan ekonomi. Inovasi sosial mengacu pada ide, produk, atau pendekatan baru yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Contohnya adalah teknologi yang memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan di daerah terpencil, atau model bisnis yang memungkinkan inklusi ekonomi bagi kelompok marginal. Sedangkan inovasi ekonomi berkaitan dengan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian, melalui pengembangan produk, proses, atau pasar baru yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Pendorong utama inovasi sosial dan ekonomi termasuk dorongan untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi ketidakpastian, serta memanfaatkan peluang yang muncul dari tantangan global dan lokal. Kolaborasi antara

pemerintah, sektor swasta, LSM, dan lembaga akademis memainkan peran penting dalam memfasilitasi inovasi ini dengan memberikan dukungan keuangan, regulasi yang mendukung, dan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan.

Dengan menggalakkan inovasi sosial dan ekonomi, masyarakat dapat menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakadilan sosial dengan cara yang lebih efektif, sambil mempercepat kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

d) Penegakan Standar Kerja yang Layak

Penegakan standar kerja yang layak adalah aspek penting dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi di lingkungan kerja. Ini melibatkan implementasi dan pematuhan terhadap norma-norma internasional tentang hak-hak pekerja, seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Standar ini tidak hanya memastikan bahwa pekerja memperoleh kondisi kerja yang manusiawi dan layak, tetapi juga mendukung produktivitas yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di tempat kerja.

Pemerintah berperan penting dalam menetapkan dan menegakkan standar kerja yang layak melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan secara konsisten. Hal ini melibatkan kerja sama dengan pengusaha dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan bagi semua. Peran sektor swasta juga krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap standar ini, dengan memastikan bahwa praktik kerja di dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan moral yang berlaku. Dengan menjaga standar kerja yang layak, masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup pekerja, mengurangi

kesenjangan sosial-ekonomi, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan secara luas.

e) Pendekatan Holistik terhadap Pengembangan Wilayah

Pendekatan holistik dalam pengembangan wilayah menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi dalam proses pembangunan suatu wilayah. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan infrastruktur fisik seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan semua dimensi ini secara holistik, pengembangan wilayah dapat lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pemangku kepentingan.

Pendekatan holistik ini melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dalam infrastruktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

LSM dan masyarakat sipil juga berperan penting dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam setiap tahap pembangunan, serta memperkuat kapasitas lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Dengan pendekatan holistik yang komprehensif, pengembangan wilayah dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang yang lebih luas dan berkesinambungan bagi seluruh komunitas yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan etika bisnis ke dalam strategi dan operasi mereka, perusahaan tidak hanya dapat mencapai tujuan ekonomi mereka, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam masyarakat tempat mereka beroperasi. Ini membantu membangun fondasi yang kokoh untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

f. Tantangan Etika Binis Islam sebagai sarana promosi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tantangan etika bisnis Islam sebagai sarana promosi pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama dalam konteks praktek bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

a) Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan

Keterbatasan pemahaman dan keterampilan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pengembangan wilayah. Ketika masyarakat atau pemangku kepentingan terbatas dalam pemahaman mengenai strategi pembangunan yang holistik atau keterampilan dalam mengimplementasikannya, hal ini dapat menghambat kemajuan yang berkelanjutan. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya konservasi lingkungan dapat mengarah pada penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan atau pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat.

Kemudian, kekurangan dalam bidang seperti manajemen proyek, teknologi informasi, atau pengambilan keputusan dapat memperlambat implementasi infrastruktur atau program yang dibutuhkan untuk memajukan wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga

pendidikan, dan organisasi pengembangan masyarakat untuk memberdayakan individu dan kelompok dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada pembangunan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan cara ini, keterbatasan pemahaman dan keterampilan dapat diatasi secara bertahap, memungkinkan untuk pengembangan wilayah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

b) Tantangan Regulasi dan Kepatuhan

Tantangan dalam regulasi dan kepatuhan sering menjadi penghalang dalam pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Regulasi yang kompleks atau tidak konsisten dapat memperlambat proses pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, proses perizinan yang panjang dan birokratis dapat memperlambat proyek pembangunan, sementara regulasi yang ambigu atau sering berubah dapat membingungkan investor dan mengurangi kepastian hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, perlindungan tenaga kerja, dan standar kesehatan sering kali menjadi tantangan bagi sektor swasta yang ingin berkontribusi dalam pengembangan wilayah.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki transparansi, konsistensi, dan efisiensi dalam regulasi serta proses perizinan. Pemerintah juga perlu memastikan regulasi dan kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, dari masyarakat lokal hingga investor internasional. Selain itu, pendekatan kolaboratif pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dapat

mempromosikan dialog yang konstruktif dan solusi yang lebih holistik. Dengan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas.

c) Tantangan Sosial dan Budaya

Tantangan sosial dan budaya sering kali menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Aspek sosial seperti perbedaan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan struktur sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi cara pembangunan dilakukan. Misalnya, dalam beberapa kasus, konflik antar-etnis atau antar-agama dapat menghambat kerjasama yang efektif antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, ketimpangan sosial seperti kesenjangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik juga dapat memperlambat upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian, penghargaan terhadap warisan budaya lokal dan identitas komunitas penting untuk memastikan pengembangan wilayah dilakukan dengan menghormati dan mempertimbangkan kekayaan budaya yang ada. Penyesuaian strategi pembangunan agar sesuai dengan nilai lokal dan tradisi juga dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap proyek pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pengembang wilayah untuk teliti mempertimbangkan tantangan sosial dan budaya dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mempromosikan harmoni sosial, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

d) Mengelola Risiko

Mengelola risiko merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber

seperti bencana alam, perubahan iklim, konflik sosial, dan ketidakpastian ekonomi. Pentingnya mengelola risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi kemungkinan dampak negatif dari risiko-risiko ini terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, termasuk infrastruktur fisik dan sosial, untuk meminimalkan kerugian dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana dan ketidakpastian yang mungkin terjadi.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran utama dalam membangun kapasitas dalam mengelola risiko, melalui implementasi kebijakan yang responsif dan proaktif serta membangun sistem peringatan dini yang efektif. Kolaborasi antar berbagai sektor, termasuk sektor swasta dan LSM, juga diperlukan untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko-risiko ini. Dengan demikian, mengelola risiko bukan hanya tentang merespons masalah, tetapi juga tentang membangun fondasi kuat untuk mengurangi potensi risiko di masa depan dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

e) Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak hanya memperhitungkan kebutuhan saat ini tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan dan praktik yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara efisien,

peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan warisan budaya.

Pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendukung komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. Ini melibatkan adopsi teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, investasi dalam inovasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, serta membangun kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan. Dengan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, ekosistem yang sehat, dan kesempatan yang lebih merata untuk berkembang dalam jangka panjang.

Dengan menghadapi tantangan ini secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang komprehensif, bisnis Islam dapat berperan sebagai agen positif dalam promosi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

B. Etika Bisnis Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan masyarakat mengacu pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan dalam sebuah komunitas. Ini melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, dari ekonomi lokal hingga kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai fokus utama, yang berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa

mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pada tingkat ekonomi, pembangunan berkelanjutan masyarakat berarti menciptakan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua warga. Ini melibatkan pengembangan industri lokal yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk memberdayakan penduduk setempat secara ekonomi. Selain itu, pembangunan berkelanjutan masyarakat juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat.

Aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat menekankan perlunya konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Ini termasuk pengelolaan air bersih, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan menjaga keanekaragaman hayati. Prinsipnya adalah untuk menjaga ekosistem yang stabil dan produktif untuk jangka panjang. Selain itu, pembangunan berkelanjutan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pendidikan dan kesadaran juga merupakan komponen kunci dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial, serta membangun kapasitas lokal dalam hal manajemen sumber daya alam, teknologi hijau, dan keahlian lain yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adopsi prinsip-prinsip keadilan sosial juga sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan masyarakat. Ini berarti memastikan bahwa seluruh populasi, terutama mereka yang rentan dan kurang mampu, memiliki akses yang setara

terhadap sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di samping itu, evaluasi dan pengukuran kemajuan juga merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan masyarakat. Ini memungkinkan untuk melacak dampak dari kebijakan dan praktik yang diterapkan, serta mengidentifikasi area-area di mana peningkatan lebih lanjut diperlukan. Penting untuk diingat bahwa pembangunan berkelanjutan masyarakat bukanlah tujuan akhir yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu adalah proses berkelanjutan yang melibatkan komitmen jangka panjang untuk mengubah pola pikir dan tindakan menuju bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Akhirnya, pembangunan berkelanjutan masyarakat menggabungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kerja yang holistik. Ini mendorong terciptanya kondisi yang mendukung untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat, saat ini dan untuk generasi yang akan datang.

b. Landasan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

a) Al-Quran

1. Surah Ar-Rum (30): 41

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*."

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia harus dihindari karena bisa mengakibatkan bencana dan kekeringan. Allah menegaskan pentingnya menjaga lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Surah Al-An'am (6): 141

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, supaya Dia menguji kamu dalam apa yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia sangat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang*."

Ayat ini menggarisbawahi bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

3. Surah An-Nahl (16): 15

وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "*Dan Dia melemparkan ke bumi gunung-gunung yang ada padanya, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu dan sungguh, Dia menciptakan di dalamnya jalan-jalan yang bengkok, supaya kamu mendapat petunjuk*."

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menghormati alam semesta sebagai bagian dari

pembangunan berkelanjutan, denganmenjaga keseimbangan ekologi dan keberagaman ciptaan Allah.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Muslim

   Dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT adalah Indah dan Dia menyukai keindahan. Allah SWT adalah Maha Baik dan Dia menyukai kebaikan. Dan Dia mencintai amal yang bermanfaat." Hadis ini mengajarkan bahwa Allah menyukai amal yang membawa manfaat, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

   Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam biji, kemudian burung, manusia atau binatang makan darinya, melainkan baginya pahala." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menghargai dan mendorong tindakan yang mendukung keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat, seperti menanam pohon atau tanaman yang bermanfaat.

3. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

   Dari Abu Musa al-Ash'ari: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan (tergantung) pada niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia capai atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahinya." Hadis ini mengajarkan pentingnya niat yang tulus dalam setiap tindakan, termasuk dalam upaya membangun masyarakat yang berkelanjutan dengan tujuan yang benar.

4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah bersabda, "Setiap kamu bertanggung jawab dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin." Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab dalam masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam kepemimpinannya.

5. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik orang yang paling dicintai Allah SWT di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Hadis ini menekankan bahwa berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat adalah cara untuk mendapatkan cinta Allah SWT dan membangun masyarakat yang berkelanjutan.

6. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dari sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya." Hadis ini mengajarkan pentingnya menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, serta mempromosikan prinsip keberlanjutan.

c. Urgensi Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan masyarakat memiliki urgensi yang besar dalam konteks kehidupan manusia di dunia saat ini. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan urgensi dari pembangunan berkelanjutan masyarakat:

a) Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Menjamin keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan tantangan esensial dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam untuk

mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat. Ekonomi yang sehat membutuhkan perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Ini memerlukan pengembangan model bisnis yang memadukan efisiensi ekonomi dengan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, menciptakan kesetimbangan yang berkelanjutan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuntut kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan.

Dalam konteks etika bisnis Islam, penekanan pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan memberikan landasan moral yang kuat untuk memandu keputusan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang menganut nilai-nilai ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Dengan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etika Islam, bisnis dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan, di mana keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi pijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b) Pelestarian Sumber Daya Alam

Pelestarian sumber daya alam merupakan aspek krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kerangka etika bisnis Islam. Tantangan yang dihadapi termasuk bagaimana perusahaan dapat meminimalkan dampak eksploitasi sumber daya alam dalam operasinya. Hal

ini meliputi penggunaan yang efisien terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta adopsi teknologi dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, etika bisnis Islam menekankan pentingnya memperlakukan sumber daya alam sebagai amanah dan menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Perusahaan perlu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam strategi bisnis mereka untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga secara ekologis.

Selain pelestarian sumber daya alam, penting juga untuk mengatasi tantangan terkait ketimpangan sosial dan ekonomi. Etika bisnis Islam menyerukan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tantangan ini memerlukan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Dengan demikian, perusahaan yang menganut etika bisnis Islam tidak hanya berusaha untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan, melalui praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

c) Mengatasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Mengatasi perubahan iklim dan bencana alam adalah tantangan besar yang harus dihadapi dalam konteks etika bisnis Islam untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat. Perubahan iklim global telah menyebabkan dampak yang semakin nyata, seperti kenaikan suhu global, perubahan pola hujan, dan peningkatan kejadian bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis

yang lebih intens. Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperlakukan lingkungan sebagai amanah. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap kegiatan mereka dan mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain itu, dalam menghadapi bencana alam, perusahaan perlu berperan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, penyusunan rencana tanggap darurat yang efektif, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan merespons bencana dengan lebih baik. Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk dalam situasi-situasi krisis seperti bencana alam. Dengan demikian, dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis mereka, perusahaan dapat menjadi bagian solusi dalam mengatasi perubahan iklim dan bencana alam, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil bagi semua.

d) Kemandirian Ekonomi dan Kelestarian Usaha

Dalam konteks etika bisnis Islam, kemandirian ekonomi dan kelestarian usaha merupakan dua aspek penting yang mendukung pembangunan berkelanjutan masyarakat. Kemandirian ekonomi merujuk pada upaya untuk membangun ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada bantuan eksternal yang berlebihan. Hal ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam ekonomi riil dan produktif yang

dapat meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi ekonomi mereka secara optimal.

Kelestarian usaha, di sisi lain, menyoroti pentingnya membangun usaha yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengadopsi etika bisnis Islam diharapkan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk manajemen sumber daya, pemeliharaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Ini melibatkan praktik bisnis yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan membangun usaha yang berkelanjutan, perusahaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang stabil dan kontributor utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, etika bisnis Islam memberikan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk memainkan peran strategis dalam mempromosikan kemandirian ekonomi dan kelestarian usaha sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Ini tidak hanya menguntungkan perusahaan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.

e) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan masyarakat yang didorong oleh etika bisnis Islam. Hal ini melibatkan menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Perusahaan yang menerapkan

etika bisnis Islam diharapkan untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Ini termasuk dalam hal memberikan lapangan kerja yang layak, memberdayakan perempuan, serta memperhatikan keadilan dalam pembayaran dan perlakuan terhadap karyawan.

Selain itu, etika bisnis Islam menempatkan pentingnya kesejahteraan spiritual dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Perusahaan didorong untuk memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat. Ini mencakup mendukung nilai-nilai keluarga, menghormati hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan, di mana setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya dalam kehidupan mereka.

Dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan masyarakat, kita tidak hanya memastikan keberlanjutan kehidupan manusia di planet ini, tetapi juga memenuhi tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah SWT.

d. Keterkaitan Etika Bisnis Islam dan Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

Keterkaitan antara etika bisnis Islam dan pembangunan berkelanjutan masyarakat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam tidak hanya relevan dalam konteks bisnis tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Etika bisnis Islam memainkan peran yang penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa cara di mana etika bisnis Islam mewujudkan pembangunan berkelanjutan masyarakat:

a) Pertimbangan Lingkungan dalam Praktik Bisnis

Pertimbangan lingkungan dalam praktik bisnis Islam mencakup aspek penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka secara holistik. Hal ini termasuk penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengurangan limbah, dan implementasi teknologi yang ramah lingkungan. Dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, perusahaan bisa mengurangi jejak ekologis mereka dan menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang.

Penerapan prinsip ini juga berarti bahwa perusahaan harus mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan mengadopsi praktik-praktik bisnis yang tidak hanya legal tetapi juga etis dalam hal lingkungan. Ini mencakup melibatkan stakeholders lokal dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dalam pelaporan lingkungan, dan berinvestasi dalam inisiatif-inisiatif yang mendukung restorasi lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dalam praktik bisnis tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara keseluruhan.

b) Pengelolaan Risiko yang Bertanggung Jawab

Dalam konteks pengelolaan risiko yang bertanggung jawab, etika bisnis Islam menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan memperhatikan aspek moral dan sosial. Prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah keadilan (adl) dan transparansi, yang membimbing perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Hal ini mencakup memastikan bahwa risiko-risiko yang diambil oleh perusahaan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar, dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Selain itu, pengelolaan risiko yang bertanggung jawab dalam praktik bisnis Islam juga mencakup aspek keberlanjutan jangka panjang. Ini berarti perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya dampak jangka pendek dari keputusan bisnis mereka, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi pengelolaan risiko yang bertanggung jawab dalam etika bisnis Islam tidak hanya mendukung kelangsungan operasional perusahaan tetapi juga membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

c) Penghargaan Terhadap Karyawan dan Komunitas

Penghargaan terhadap karyawan dan komunitas merupakan aspek penting dalam praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam. Dalam Islam, memberikan penghargaan kepada karyawan tidak hanya sekadar bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam kesuksesan perusahaan, tetapi juga sebagai implementasi dari nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Hal ini tercermin dalam sikap adil

terhadap kompensasi dan pengakuan terhadap kerja keras dan dedikasi karyawan, sesuai dengan prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan adil.

Selain itu, penghargaan terhadap komunitas juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam etika bisnis Islam. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini secara konsisten cenderung berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas sekitar. Hal ini bisa berupa program-program pengembangan masyarakat, bantuan kemanusiaan, atau inisiatif lingkungan yang berkelanjutan. Dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada komunitas, perusahaan tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan stakeholders lokal tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

d) Pengembangan Infrastruktur Sosial

Dalam konteks pengembangan infrastruktur sosial, etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam membangun dan memelihara fasilitas-fasilitas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Infrastruktur sosial termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi yang berfungsi sebagai pondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya mengalokasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur ini, tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini bermanfaat secara luas bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

Selain itu, pengembangan infrastruktur sosial juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, misalnya,

membuka akses yang lebih baik untuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan remaja, yang merupakan investasi dalam masa depan yang berkelanjutan. Demikian pula, fasilitas kesehatan yang baik membantu mengurangi beban penyakit dan memperpanjang umur harapan hidup, sementara infrastruktur transportasi yang memadai memungkinkan akses lebih mudah terhadap lapangan kerja dan pasar. Dengan membangun infrastruktur sosial secara holistik dan berkelanjutan, etika bisnis Islam tidak hanya mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

e) Inovasi Teknologi Hijau

Inovasi teknologi hijau merupakan salah satu bidang yang mendapat dorongan kuat dari etika bisnis Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti hifdh al-ma'ruf (penjagaan yang baik) mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional mereka. Teknologi hijau tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya, seperti energi dan air, yang konsisten dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam Islam. Dengan mengintegrasikan inovasi teknologi hijau dalam praktik bisnis, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban etis mereka untuk menjaga alam, tetapi juga memperkuat reputasi mereka sebagai agen perubahan positif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, inovasi teknologi hijau juga memberikan peluang baru bagi pengembangan produk dan layanan yang memenuhi standar keberlanjutan global. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan desain

produk yang ramah lingkungan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis. Di samping itu, mendorong adopsi teknologi hijau juga menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan kompetitif di pasar global yang semakin mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya mengarah pada praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi hijau yang dapat membuka peluang baru bagi kemajuan ekonomi masyarakat secara luas.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dalam praktik bisnis tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat yang berkelanjutan. Praktik bisnis yang berlandaskan etika bisnis Islam membawa manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga memberdayakan masyarakat secara luas.

e. Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

Peran etika bisnis dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan masyarakat sangat penting karena etika bisnis menyangkut nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perusahaan dan individu dalam konteks ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa cara di mana etika bisnis berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat:

a) Responsibilitas terhadap Lingkungan

Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab mendesak bagi semua sektor masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ekosistem alam, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meminimalkan dampak

negatif terhadap lingkungan dari kegiatan manusia. Tanggung jawab terhadap lingkungan melibatkan adopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, investasi dalam teknologi yang mengurangi jejak karbon, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat.

Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan menegakkan hukum sangat penting, sementara sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan inovasi hijau dan melaksanakan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka. Kolaborasi antara pemerintah, bisnis, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan semakin penting di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan global. Upaya kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan akan mendukung kehidupan yang sehat bagi semua makhluk hidup, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta meminimalkan risiko bencana alam. Dengan menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat dapat membangun masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh penduduk bumi.

b) Pengembangan Masyarakat Lokal

Dalam upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat melalui etika bisnis Islam, pengembangan masyarakat lokal menjadi krusial. Perusahaan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip ini diharapkan untuk tidak hanya beroperasi di suatu wilayah,

tetapi juga berintegrasi dalam komunitas lokal secara holistik. Ini mencakup berbagai upaya seperti memberikan pelatihan keterampilan kepada penduduk setempat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi pada perekonomian lokal. Selain itu, perusahaan dapat memfasilitasi akses terhadap pasar yang lebih luas bagi produsen lokal atau UMKM, sehingga meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal.

Selain pendekatan ekonomi, etika bisnis Islam juga menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam pengembangan masyarakat lokal. Ini termasuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, menghormati nilai-nilai lokal, serta mendukung inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dengan masyarakat lokal, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan masyarakat secara holistik.

c) Penghargaan terhadap Budaya Lokal dan Identitas

Penghargaan terhadap budaya lokal dan identitas merupakan aspek penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan masyarakat yang dipandu oleh etika bisnis Islam. Perusahaan yang beroperasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal tidak hanya menghormati warisan budaya yang ada, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk integrasi sosial dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan

dengan mendukung kegiatan budaya lokal seperti festival, seni pertunjukan, atau pelestarian situs-situs sejarah yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadi agen pembangunan yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkaya kehidupan budaya dan memperkuat identitas lokal di sekitar wilayah operasional mereka.

Selain itu, penghargaan terhadap budaya lokal juga mencakup pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dan praktik lokal yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad. Perusahaan dapat berperan dalam mendukung dan melestarikan praktik-praktik ini, serta mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam strategi pengembangan dan inovasi mereka. Ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan cara ini, etika bisnis Islam tidak hanya mendorong pencapaian keberhasilan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut membawa manfaat yang positif dan berkelanjutan bagi budaya lokal dan identitas masyarakat di sekitar mereka.

d) Advokasi terhadap Praktik Bisnis Berkelanjutan

Advokasi terhadap praktik bisnis berkelanjutan merupakan langkah krusial dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi etika bisnis Islam. Hal ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan agar lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Advocacy ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye kesadaran publik, dialog dengan pemangku kepentingan, dan advokasi kebijakan di tingkat pemerintah dan internasional. Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam

mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memberikan informasi, pelatihan, dan insentif yang mendukung perusahaan-perusahaan untuk beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, advokasi terhadap praktik bisnis berkelanjutan juga dapat memperkuat keterlibatan konsumen dan investor dalam mendukung perusahaan yang memiliki komitmen terhadap etika bisnis Islam. Konsumen yang semakin peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial dapat menggunakan kekuatan pembelian mereka untuk mendukung produk dan layanan yang diproduksi secara bertanggung jawab. Sementara itu, investor dapat memilih untuk mengalokasikan modal mereka ke perusahaan yang mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, advokasi terhadap praktik bisnis berkelanjutan dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

e) Peran sebagai Agen Perubahan Sosial:

Sebagai agen perubahan sosial, perusahaan yang menganut etika bisnis Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mempengaruhi dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah memimpin dengan contoh dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, perusahaan dapat menginspirasi dan memotivasi pelaku bisnis lainnya untuk mengadopsi praktik yang serupa. Ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan dan kewajiban hukum, tetapi juga tentang menjadi agen perubahan yang proaktif dalam

memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar mereka.

Selanjutnya, peran sebagai agen perubahan sosial juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif. Perusahaan dapat berperan dalam mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat lokal. Mereka juga dapat membantu dalam membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung, seperti fasilitas kesehatan, akses air bersih, dan transportasi yang terjangkau. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal tetapi juga mitra dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam hal ini, etika bisnis Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan peran etika bisnis dalam semua aspek operasionalnya, perusahaan tidak hanya dapat mencapai keberhasilan ekonomi jangka panjang tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Etika bisnis bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga strategi yang cerdas dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia dan lingkungan.

f. Tantangan Etika Binis Islam sebagai sarana promosi Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat

Tantangan etika bisnis Islam sebagai sarana promosi pembangunan berkelanjutan masyarakat melibatkan beberapa aspek yang perlu dipahami dan diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang komprehensif. Berikut ini beberapa tantangan utama yang harus dihadapi:

a) Integrasi Nilai-nilai Moral dan Spiritual

Integrasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik bisnis menjadi esensial dalam konteks pembangunan berkelanjutan masyarakat menurut perspektif etika bisnis Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati menjadi panduan dalam mengambil keputusan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Perusahaan yang mendasarkan operasinya pada nilai-nilai ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang etis dan produktif tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat lokal, dan lingkungan sekitar.

Selanjutnya, integrasi nilai-nilai moral dan spiritual juga memperkuat identitas perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, perusahaan dapat mempengaruhi dan menginspirasi perubahan positif dalam tata kelola bisnis secara lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga memperluas dampak positif perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai moral dan spiritual bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

b) Harmonisasi dengan Standar Global dan Lokal

Harmonisasi dengan standar global dan lokal menjadi penting dalam konteks etika bisnis Islam untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai

universal yang diakui secara internasional, tetapi juga mempertimbangkan konteks lokal dan budaya di mana perusahaan beroperasi. Standar global seperti Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) serta Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memandu perusahaan untuk mematuhi hak asasi manusia, memperhatikan lingkungan, dan berprilaku secara etis dalam semua kegiatan mereka.

Sementara itu, adaptasi terhadap standar lokal memungkinkan perusahaan untuk membangun kredibilitas dan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat. Ini mencakup memahami dan menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma hukum yang berlaku di wilayah operasional perusahaan. Dengan memadukan standar global dengan konteks lokal, perusahaan dapat menciptakan kebijakan dan praktik yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan norma hukum setempat, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang berkontribusi positif dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, harmonisasi antara standar global dan lokal menjadi landasan penting dalam membangun praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam kerangka etika bisnis Islam.

c) Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan aspek krusial dalam agenda pembangunan berkelanjutan menurut perspektif etika bisnis Islam. Peran perempuan dalam ekonomi dan masyarakat tidak bisa diabaikan; mereka berperan penting dalam memajukan

ekonomi domestik, mengelola sumber daya keluarga, serta menjaga keseimbangan sosial. Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk mendukung kesetaraan gender melalui berbagai cara, seperti memastikan kesempatan kerja yang setara, menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, dan memberdayakan perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya menguntungkan individu perempuan secara langsung, tetapi juga berdampak positif secara luas pada masyarakat dan ekonomi. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pasar tenaga kerja, ini meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Perusahaan yang memprioritaskan inklusi gender juga cenderung lebih inovatif dan produktif, karena mereka dapat mengakses lebih banyak bakat dan perspektif yang beragam. Dalam konteks etika bisnis Islam, kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

d) Pengelolaan Risiko dan Ketahanan Terhadap Bencana

Pengelolaan risiko dan ketahanan terhadap bencana merupakan komponen krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan menurut perspektif etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasional mereka. Hal ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko yang terkait dengan bencana alam, perubahan iklim, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya yang dapat

mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan dapat mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, termasuk investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, menyusun rencana darurat yang efektif, serta meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi dan merespons bencana. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada keselamatan dan keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam manajemen risiko dan ketahanan terhadap bencana, perusahaan dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

e) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan menurut perspektif etika bisnis Islam. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan dapat berperan dalam mendukung pendidikan formal dan non-formal yang memasukkan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, ke dalam kurikulumnya. Ini membantu menciptakan generasi masa depan yang lebih sadar akan dampak dari tindakan ekonomi mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta siap untuk mengambil peran dalam mempromosikan perubahan positif.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan langkah penting dalam memperkuat dukungan

terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dapat melibatkan masyarakat melalui kampanye informasi, pelatihan, dan inisiatif komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat yang lebih sadar akan cenderung lebih mendukung perusahaan-perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan dalam operasional mereka, serta ikut berperan dalam memonitor dan memastikan bahwa praktik bisnis dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kesinambungan dalam praktik bisnis dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang holistik dan berdaya tahan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk membangun konsensus dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Etika bisnis Islam dapat menjadi kerangka kerja yang kuat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis yang diambil.

C. Rangkuman

Etika bisnis Islam memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, etika bisnis Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Prinsip keadilan sosial dalam etika bisnis Islam

mendorong perusahaan untuk mengembangkan inisiatif yang mendukung inklusi ekonomi, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang beruntung.

Pengembangan usaha menjadi salah satu fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi menurut etika bisnis Islam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan yang menganut etika bisnis Islam juga cenderung mengutamakan pembangunan kapasitas lokal dalam rantai nilai mereka, mempromosikan kerja sama yang adil dan bermanfaat antara pemangku kepentingan bisnis. Selain itu, etika bisnis Islam juga memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan lingkungan, pengelolaan risiko yang bertanggung jawab, dan transparansi dalam praktik bisnis mendukung upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan yang menganut etika bisnis Islam diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis mereka, meminimalkan jejak karbon, dan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan.

Konsep zakat dalam etika bisnis Islam juga berperan sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Zakat, bersama dengan infaq dan sedekah, tidak hanya memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini

diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab dalam seluruh aspek operasional mereka. Inisiatif seperti pengembangan produk ramah lingkungan, program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, serta kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk membangun infrastruktur sosial juga menjadi bagian integral dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, etika bisnis Islam menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Model kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban, membantu membangun kepercayaan dan stabilitas dalam komunitas bisnis dan masyarakat secara luas. Pemimpin yang mengamalkan prinsip-prinsip ini diharapkan untuk menjadi teladan dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Secara keseluruhan, peran etika bisnis Islam dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai moral yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kokoh bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta menginspirasi transformasi positif dalam masyarakat global yang semakin kompleks dan beragam.

D. Penilaian Formatif

a. Pilihan Ganda

1. Apa yang menjadi fokus utama etika bisnis Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

a) Meningkatkan konsumsi pribadi perusahaan
b) Mengoptimalkan keuntungan perusahaan
c) Memperkuat kesetaraan gender di pasar tenaga kerja
d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umum

2. Mengapa penting bagi perusahaan yang menganut etika bisnis Islam untuk memberdayakan masyarakat lokal?
   a) Untuk mengurangi biaya produksi
   b) Agar mendapatkan pengakuan internasional
   c) Untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan kompetitor
   d) Agar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi regional
3. Mengapa perusahaan yang menganut etika bisnis Islam cenderung lebih memperhatikan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya?
   a) Untuk menarik investor global
   b) Agar dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi
   c) Karena memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi
   d) Dengan tujuan untuk memonopoli pasar lokal
4. Bagaimana etika bisnis Islam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat?
   a) Dengan mengurangi keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial
   b) Dengan meminimalkan transparansi dalam pelaporan keuangan
   c) Dengan meningkatkan kepercayaan dan mendukung investasi
   d) Dengan mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan
5. Mengapa penting bagi perusahaan yang menganut etika bisnis Islam untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat?
   a) Untuk mengurangi efisiensi operasional
   b) Agar dapat memaksimalkan keuntungan finansial

c) Untuk memperluas pasar global
d) Agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat

6. Apa yang menjadi fokus utama dari pembangunan berkelanjutan masyarakat menurut perspektif etika bisnis Islam?
   a) Peningkatan keuntungan finansial
   b) Pemberdayaan ekonomi lokal
   c) Eksploitasi sumber daya alam
   d) Dominasi pasar global
7. Manfaat utama dari integrasi nilai-nilai moral dalam praktik bisnis menurut etika bisnis Islam adalah...
   a) Peningkatan keuntungan perusahaan
   b) Pembangunan hubungan yang kuat dengan kompetitor
   c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
   d) Penurunan kualitas produk
8. Mengapa penting bagi perusahaan untuk memperhatikan keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka menurut etika bisnis Islam?
   a) Agar bisa mendapatkan pengakuan internasional
   b) Untuk memenuhi kebutuhan pasar global
   c) Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang
   d) Agar bisa memanipulasi harga pasar
9. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko dan ketahanan terhadap bencana dalam konteks etika bisnis Islam?
   a) Mengabaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi
   b) Menyusun rencana darurat untuk menghadapi bencana
   c) Mengekspos perusahaan terhadap risiko tanpa mitigasi

d) Menghindari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

10. Bagaimana peran pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan menurut etika bisnis Islam?
    a) Menciptakan generasi yang kurang peduli terhadap lingkungan
    b) Mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi
    c) Meningkatkan pemahaman akan pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab
    d) Menyebabkan penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial

b. Benar/Salah

1. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam cenderung mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. (Benar/Salah) Perusahaan yang menganut etika bisnis Islam tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional mereka.
3. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk memprioritaskan keuntungan finansial di atas keadilan sosial.
4. (Benar/Salah) Konsep keberlanjutan dalam etika bisnis Islam mencakup mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis.
5. (Benar/Salah) Salah satu tujuan utama etika bisnis Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal dan global.
6. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

7. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. (Benar/Salah) Salah satu aspek utama etika bisnis Islam adalah memastikan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.
9. (Benar/Salah) Perusahaan yang menganut etika bisnis Islam diharapkan hanya fokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
10. (Benar/Salah) Salah satu peran etika bisnis Islam dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat adalah dengan menghindari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

c. Esai

1. Analisislah peran etika bisnis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengapa penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam semua aspek operasional mereka?
2. Bagaimana tantangan etika bisnis Islam dapat mempengaruhi promosi pemberdayaan ekonomi masyarakat? Diskusikan perspektif utama yang mungkin muncul dan bagaimana solusi dapat ditemukan.
3. Jelaskan bagaimana pendekatan holistik dalam pengembangan wilayah mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Mengapa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya menjadi penting dalam merancang strategi pembangunan yang efektif?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan standar kerja yang layak dalam konteks pemberdayaan ekonomi yang inklusif? Bagaimana solusi dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini?

5. Diskusikan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan menurut etika bisnis Islam. Apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal ini?
6. Mengapa perusahaan yang menganut etika bisnis Islam cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis mereka? Jelaskan dengan memberikan contoh konkret.
7. Bagaimana etika bisnis Islam dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan? Berikan contoh konkret dari implementasi etika bisnis Islam dalam kebijakan publik.
8. Jelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam konteks pembangunan berkelanjutan menurut perspektif etika bisnis Islam.
9. Jelaskan tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik bisnis sehari-hari. Berikan solusi atau pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut.
10. Mengapa penting bagi perusahaan yang menganut etika bisnis Islam untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender? Bagaimana peran perempuan dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam konteks ini?

e. Studi Kasus

1. Anda adalah seorang pengusaha yang ingin mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di komunitas yang terpencil. Gambarkan ide produk atau layanan yang dapat Anda kembangkan untuk mencapai tujuan ini.
2. Anda ditugaskan untuk merancang sebuah kampanye sosial yang menggunakan nilai-nilai etika bisnis Islam

sebagai landasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi. Bagaimana Anda merencanakan kampanye ini secara kreatif?

3. Anda adalah konsultan pembangunan yang bekerja dengan pemerintah lokal untuk merancang kebijakan yang mendukung standar kerja yang layak dalam industri pariwisata. Buatlah rekomendasi kreatif tentang bagaimana pariwisata yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan warisan budaya.
4. Anda adalah seorang pengembang perangkat lunak yang ingin menciptakan aplikasi mobile untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di daerah terpencil. Deskripsikan fitur-fitur kreatif apa yang akan Anda masukkan ke dalam aplikasi tersebut.
5. Anda adalah seorang desainer komunitas yang bekerja dengan masyarakat lokal untuk merancang ruang publik yang mempromosikan inklusi sosial dan keberlanjutan. Gambarkan ide-ide kreatif tentang bagaimana Anda akan mengubah area terpencil menjadi pusat kegiatan yang dinamis dan inklusif bagi semua penduduk.
6. Anda adalah seorang konsultan bisnis yang ditugaskan untuk mengembangkan program pelatihan etika bisnis Islam bagi perusahaan besar yang beroperasi secara global. Gambarkan lima rancangan pelatihan yang akan Anda buat, termasuk topik-topik utama dan metode pembelajaran yang akan digunakan.
7. Anda adalah CEO sebuah perusahaan besar yang baru saja mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Rancanglah strategi komunikasi yang kreatif untuk mengedukasi dan memotivasi seluruh staf perusahaan tentang pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

8. Anda merupakan seorang aktivis lingkungan yang ingin berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang menganut etika bisnis Islam untuk mengurangi jejak karbon di komunitas lokal Anda. Usulkan tiga inisiatif konkret yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai tujuan ini.
9. Anda adalah seorang pengusaha muda yang baru saja memulai perusahaan teknologi berbasis aplikasi untuk memfasilitasi perdagangan produk organik dari petani lokal. Bagaimana Anda meyakinkan investor dalam menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan menjadi inti dari model bisnis Anda.
10. Anda adalah seorang konsultan TJSP yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan dampak positif mereka terhadap masyarakat lokal. Usulkan dua proyek TJSP yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan yang menganut etika bisnis Islam untuk meningkatkan kualitas hidup di komunitas sekitar mereka.

TOPIK 2
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KONTEKS GLOBAL I

A. Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Internasional

a. Pengertian Perdagangan Internasional dalam Islam

Perdagangan internasional dalam Islam merupakan fenomena ekonomi yang memainkan peran penting dalam konteks globalisasi saat ini. Secara prinsip, perdagangan internasional dalam Islam tidak hanya mengacu pada pertukaran barang dan jasa antara negara-negara, tetapi juga mencakup aspek etika, nilai-nilai sosial, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya, Islam memandang perdagangan sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan keadilan sosial di antara negara-negara.

Dalam ajaran Islam, perdagangan internasional diatur oleh prinsip-prinsip yang kuat yang mencerminkan keadilan dan moralitas dalam setiap tahapnya. Prinsip utama yang menjadi landasan adalah prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan satu Tuhan yang menegaskan kesatuan manusia dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan perdagangan.

Pada tingkat praktis, perdagangan internasional dalam Islam harus berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Ini berarti setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan harus berupaya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil, tanpa penindasan atau eksploitasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Seiring dengan itu, perdagangan internasional dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antar negara dan umat Islam, serta menghindari konflik atau kerusuhan yang bisa

timbul dari praktik perdagangan yang tidak etis. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan kerjasama antar umat manusia.

Selain itu, perdagangan internasional dalam Islam menekankan pentingnya adanya tanggung jawab sosial yang tinggi, baik dari individu maupun korporasi yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP/CSR) dalam Islam menuntut agar setiap bisnis tidak hanya memikirkan keuntungan finansial semata, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Dalam perdagangan internasional, Islam juga memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam transaksi, termasuk hukum dan kontrak yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba, spekulasi yang tidak etis, dan praktik lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi.

Pentingnya etika dalam perdagangan internasional dalam Islam juga tercermin dalam konsep hukum dan keadilan yang harus diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Islam mendorong untuk menyelesaikan konflik secara adil dan berdasarkan bukti yang jelas, tanpa memihak kepada satu pihak tertentu. Secara keseluruhan, perdagangan internasional dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk memperluas persaudaraan dan hubungan yang baik antar bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi dalam Islam memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga mendukung kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

b. Landasan Hukum Perdagangan Internasional dalam Islam

a) Al-Quran

1. Surah Al-Hujurat (49): 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha* Mengenal."

Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman manusia dalam bangsa dan suku adalah rencana Allah, dan tujuannya adalah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi dengan baik. Yang paling mulia di mata Allah adalah yang bertakwa, tanpa memandang asal usul atau suku bangsa.

2. Al-Ma'idah (5): 3

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ...ٱضۡطُرَّ فِي

Artinya: "...*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa dalam kelaparan yang tidak ada kesalahan bagi dia berdosa dalam keadaan di luar pekerjaan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang*."

Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan,

termasuk hubungan internasional. Kesejahteraan umat manusia dan pemeliharaan agama harus dijaga dengan baik.

3. Surah An-Nisa (4): 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*."

Ayat ini memberikan pedoman untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dalam perdagangan konteks ekonomi global, serta menghindari segala bentuk kecurangan dan permusuhan.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Muslim
   Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bermaksud untuk melakukan transaksi jual beli, maka hendaklah ia memeluk tiga perkara, yaitu: kejujuran, pemahaman, dan memelihara kesepakatan." Hadis ini menekankan pentingnya memelihara kejujuran, pemahaman yang baik tentang transaksi yang dilakukan, dan mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam perdagangan internasional. Hal ini untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi.

2. Hadis Riwayat Tirmidzi
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu, oleh karena itu jika kalian melakukan pembelian, maka berilah tambahan (pemberian) dan jika kalian menjual, maka

jualah dengan jumlah yang benar." Hadis ini menunjukkan pentingnya berbuat baik dalam setiap transaksi dalam perdagangan internasional. Memberikan tambahan (pemberian) kepada pembeli atau menjual dengan jumlah yang benar adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam.

3. Hadis Riwayat Ibnu Majah
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang mengumpulkan orang-orang dari kebodohan dan keburukan adalah perjalanan. Perjalanan tersebut adalah perdagangan." Hadis ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi sarana mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, dan menghindarkan diri dari kemiskinan. Perjalanan yang dilakukan untuk tujuan perdagangan membuka wawasan dan mengurangi kemiskinan.

4. Hadis Riwayat Tirmidzi
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada' di sisi Allah SWT." Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam perdagangan internasional. Orang yang berdagang dengan jujur akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana para nabi, orang-orang yang benar, dan syuhada'.

5. Hadis Riwayat Abu Dawud
   Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melakukan jual beli, maka hendaklah ia tidak menyakiti." Hadis ini menekankan larangan melukai atau merugikan pihak lain dalam transaksi perdagangan, termasuk dalam perdagangan internasional. Islam mengajarkan untuk berdagang dengan adil dan tidak merugikan pihak lain.

6. Hadis Riwayat Tirmidzi

   Rasulullah bersabda, "Perdagangan yang baik adalah yang dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli." Hadis ini menegaskan bahwa perdagangan yang baik adalah yang dilakukan dengan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan atau kecurangan. Ini menekankan pentingnya transaksi yang adil dalam perdagangan internasional.

c. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Internasional

Pentingnya etika dalam bisnis dan perdagangan internasional sangatlah fundamental karena berbagai alasan yang mencakup moralitas, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan urgensi etika dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional:

a) Kepatuhan terhadap Nilai-Nilai Moral

Perdagangan internasional yang beretika sangat penting karena memastikan bahwa setiap keputusan investasi didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari kegiatan bisnis. Dengan mengutamakan integritas dan transparansi, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik sebagai mitra bisnis yang dapat dipercaya, yang penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan negara-negara yang menjalin kerja sama perdagangan serta masyarakat lokal.

Selain itu, perdagangan yang beretika juga membantu dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan kekuasaan ekonomi antar-negara. Ini menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa perdagangan yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal dan global secara luas.

b) Penghindaran dari Transaksi yang Merugikan

Perdagangan internasional yang beretika penting karena meminimalkan risiko terlibat dalam transaksi yang merugikan atau tidak etis. Hal ini mencakup menghindari praktik korupsi, penyuapan, atau eksploitasi sumber daya manusia yang dapat merugikan masyarakat lokal. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, negara dapat memastikan keberlanjutan kerja sama jangka panjang yang baik. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga reputasi baik, sehingga kerja sama perdagangan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal maupun global.

Selain itu, perdagangan internasional yang beretika juga berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan menekankan integritas dan transparansi, negara dapat menciptakan aturan main yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya mengurangi risiko konflik politik dan sosial, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perdagangan internasional yang beretika memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menghormati budaya lokal, dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari masyarakat setempat. Dengan demikian, prinsip etika dalam Perdagangan internasional tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga strategi yang cerdas dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

c) Keamanan dan Keberlanjutan Pasokan

Keamanan dan keberlanjutan pasokan dalam konteks bisnis internasional sangat penting karena menyangkut kelangsungan operasional dan stabilitas bisnis jangka panjang. Secara khusus, keamanan pasokan mengacu pada upaya untuk melindungi jalur distribusi dan sumber daya yang vital bagi kelangsungan produksi dan distribusi produk. Ini melibatkan manajemen risiko terhadap gangguan seperti bencana alam, konflik politik, atau perubahan kebijakan yang dapat mengganggu rantai pasokan global. Dengan mengimplementasikan strategi keamanan yang efektif, perusahaan dapat mengurangi kerentanan terhadap risiko ini dan mempertahankan ketersediaan produk yang konsisten bagi pelanggan.

Sementara itu, keberlanjutan pasokan berfokus pada aspek lingkungan dan sosial dari operasi bisnis. Hal ini mencakup praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, serta perlindungan lingkungan dalam seluruh rantai pasokan. Investasi dalam teknologi hijau, penggunaan energi terbarukan, dan pemenuhan standar internasional untuk keberlanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa operasi bisnis tidak hanya efisien secara ekonomis tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan dan keberlanjutan pasokan, perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan, baik dalam aspek operasional maupun reputasi korporat di pasar global yang semakin sadar akan isu-isu keberlanjutan.

d) Menjaga Hubungan yang Baik dengan Mitra Dagang

Menjaga hubungan yang baik dengan mitra dagang dalam konteks bisnis internasional sangat krusial karena

berdampak langsung pada kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Hubungan yang baik membangun kepercayaan dan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat, termasuk pemasok, distributor, dan konsumen akhir. Kunci utamanya adalah komunikasi terbuka dan jujur, di mana setiap pihak dapat saling memahami kebutuhan dan harapan masing-masing. Dengan memprioritaskan kepentingan bersama dan mematuhi komitmen yang telah disepakati, perusahaan dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, menjaga hubungan yang baik dengan mitra dagang juga membantu dalam mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses bisnis internasional, seperti perubahan kebijakan atau kondisi pasar yang tidak stabil. Dengan membangun jaringan yang kuat dan saling mendukung, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan lebih fleksibel dalam mengadaptasi strategi bisnisnya. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi perusahaan di pasar global, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan ekspansi ke depannya. Dengan demikian, menjaga hubungan yang baik dengan mitra dagang bukan hanya tentang menjaga kestabilan operasional, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam bisnis internasional.

e) Kolaborasi Antar Negara dalam Pembangunan Ekonomi

Kolaborasi antar negara dalam pembangunan ekonomi merupakan aspek penting dalam konteks globalisasi dan interkoneksi ekonomi saat ini. Melalui kolaborasi ini, negara-negara dapat saling menguntungkan dengan berbagi sumber daya, teknologi, dan pengetahuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini tidak hanya memungkinkan bagi negara-negara untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka sendiri, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan, peningkatan produksi, dan penguatan kapasitas manusia.

Selain itu, kolaborasi ekonomi antar negara juga dapat membuka peluang baru bagi perdagangan internasional yang menguntungkan semua pihak terlibat. Ini menciptakan pasar yang lebih besar dan memperluas akses terhadap produk dan layanan bagi konsumen global. Dengan demikian, kolaborasi ekonomi tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga memberikan dorongan signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Dengan mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan saling menguntungkan, kolaborasi antar negara menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas ekonomi global dan menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks di abad ke-21 ini.

f) Mendukung Pembangunan Ekonomi Global yang Seimbang

Mendukung pembangunan ekonomi global yang seimbang melibatkan berbagai negara bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi semua pihak. Ini mencakup mempromosikan perdagangan bebas dan adil, serta mengurangi disparitas ekonomi antar negara. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses pasar bagi produk-produk nasional, tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi di seluruh dunia.

Pembangunan ekonomi global yang seimbang juga melibatkan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini meliputi investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendorong inklusivitas dan memperkuat

basis ekonomi dari bawah ke atas. Dengan memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, kolaborasi antar negara dapat menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menyeluruh, serta memperkuat fondasi untuk perdamaian dan stabilitas global.

g) Penghindaran Konflik dan Pemecahan Damai

Penghindaran konflik dan pemecahan damai dalam konteks hubungan internasional sangat penting untuk mempertahankan stabilitas global. Konflik antar negara dapat mengganggu perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari konflik melalui dialog, diplomasi, dan resolusi damai sangat diperlukan. Negosiasi yang dipimpin dengan bijaksana dan adil dapat mengurangi ketegangan antar negara dan membuka jalan untuk kerjasama yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, teknologi, dan pembangunan ekonomi.

Pemecahan damai juga memainkan peran penting dalam menangani konflik internal dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi stabilitas regional maupun global. Investasi dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kekerasan atau perang, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Dengan membangun fondasi yang kokoh untuk dialog dan kerjasama, negara-negara dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dengan menjunjung tinggi etika dalam bisnis internasional, baik perusahaan maupun negara dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam membangun ekonomi global yang

berkelanjutan dan inklusif. Etika bukan hanya sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat global secara keseluruhan.

d. Nilai-Nilai Etis dalam Perdagangan Internasional

Nilai-nilai etis dalam perdagangan internasional mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari pihak yang terlibat dalam perdagangan antar negara. Beberapa nilai etis yang penting dalam konteks perdagangan internasional meliputi:

a) Transparansi

Dalam konteks etika bisnis Islam, transparansi menjadi nilai sentral yang mengatur perilaku dan praktek bisnis. Prinsip transparansi menekankan pentingnya mengungkapkan informasi secara jujur dan terbuka kepada semua pihak terkait dalam setiap transaksi atau kegiatan bisnis. Ini mencakup pengungkapan yang tepat mengenai harga, kualitas produk, kondisi keuangan perusahaan, dan segala hal yang relevan untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau penipuan yang terjadi. Prinsip ini juga mencerminkan nilai amanah (*trustworthiness*) dalam Islam, yang menuntut agar setiap tindakan bisnis dilakukan dengan integritas dan kejujuran, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum.

Selain itu, dalam perspektif etika bisnis Islam, transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan bisnis yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ini meliputi kewajiban untuk menjaga kepentingan semua pihak terlibat dalam bisnis, termasuk masyarakat luas, dan menjaga keseimbangan antara mencapai tujuan bisnis dengan

memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas ini, bisnis dalam konteks Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkeadilan.

b) Integritas

Integritas dalam konteks nilai etis perdagangan internasional dalam Islam merujuk pada keutamaan untuk bertindak dengan jujur, konsisten, dan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan. Integritas merupakan nilai yang mendasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya konsistensi dalam perilaku bisnis, termasuk dalam menjalankan komitmen terhadap kontrak dan kewajiban bisnis. Hal ini melibatkan menepati janji, mematuhi peraturan, dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan atau memanfaatkan pihak lain secara tidak adil. Integritas juga mencakup menjaga kejujuran dalam setiap interaksi bisnis serta memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, seperti keadilan dan kebenaran.

Selain itu, integritas dalam nilai etis perdagangan internasional Islam juga melibatkan aspek moral yang lebih luas, termasuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas, bisnis dalam Islam diharapkan dapat menjaga reputasi yang baik, membangun kepercayaan dengan semua pihak terkait, dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan umat manusia secara luas.

c) Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi dalam nilai etis perdagangan internasional dalam Islam menekankan prinsip pemerataan manfaat dan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi global. Prinsip ini berakar pada konsep keadilan dalam ajaran Islam, yang memerintahkan untuk memperlakukan semua orang secara adil dan merata dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, keadilan ekonomi mengharuskan agar transaksi dan distribusi kekayaan dilakukan dengan proporsionalitas yang menghormati hak-hak semua pihak, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Hal ini juga melibatkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa hasil dari perdagangan internasional memberikan manfaat yang seimbang bagi negara-negara yang terlibat, termasuk negara-negara berkembang dan masyarakat yang rentan.

Selain itu, keadilan ekonomi dalam Islam juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang lebih luas. Prinsip ini mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi atau korporat, tetapi juga mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara negara-negara. Dengan menerapkan nilai keadilan ekonomi dalam perdagangan internasional, bisnis dalam Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan, serta mempromosikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

d) Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam nilai etis perdagangan internasional dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang menjamin keamanan, kualitas, dan kejujuran dalam transaksi bisnis. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak konsumen dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan konsumen adalah kejujuran, yang mengharuskan para pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini termasuk memberikan penjelasan yang jujur mengenai harga, kualitas, dan manfaat dari barang atau jasa yang dijual agar konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan bermanfaat.

Selain itu, dalam konteks etika perdagangan internasional Islam, perlindungan konsumen juga mencakup menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen atau memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Prinsip amanah mendorong agar para pelaku bisnis memperlakukan konsumen dengan adil, menghormati hak-hak mereka, dan mengambil tanggung jawab penuh atas produk atau layanan yang mereka hasilkan atau tawarkan. Perlindungan konsumen dalam Islam juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam syariah, termasuk aspek kesehatan, keamanan, dan keadilan harga. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, bisnis dalam Islam dapat membangun kepercayaan dengan konsumen dan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

Nilai-nilai etis dalam perdagangan internasional memberikan kerangka kerja moral yang penting untuk mengatur perilaku dan interaksi antara negara-negara dan pelaku ekonomi di tingkat global. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, diharapkan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan global secara adil dan bertanggung jawab.

Kesemua nilai-nilai ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan dengan cara yang etis dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat, tanpa merugikan pihak lainnya atau merusak kepentingan umum secara tidak adil.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Internasional

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam dalam konteks perdagangan internasional akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Harmonisasi Nilai Syariah

Harmonisasi nilai-nilai syariah dalam konteks investasi lintas negara dalam bisnis Islam menjadi krusial untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika Islam di berbagai yurisdiksi. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap keputusan investasi dan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam industri yang dianggap tidak halal. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang interpretasi syariah yang berbeda di setiap negara serta kesiapan untuk mengadaptasi strategi bisnis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam lingkungan investasi yang global dan kompleks.

Selain itu, harmonisasi nilai-nilai syariah juga melibatkan integrasi yang hati-hati antara aspek keuangan, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan investasi. Investor Islam perlu mempertimbangkan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan jangka panjang dari setiap investasi mereka. Ini mencakup penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang konsisten dengan

nilai-nilai syariah, untuk membangun portofolio investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menghormati prinsip-prinsip etis Islam. Dengan demikian, harmonisasi nilai-nilai syariah menjadi landasan yang kuat dalam strategi investasi lintas negara bagi investor Islam yang berkomitmen pada integritas dan keberlanjutan bisnis mereka.

b) Keseimbangan Antara Profitabilitas dan Etika

Keseimbangan antara profitabilitas dan etika adalah tantangan sentral dalam konteks investasi lintas negara dalam bisnis Islam. Investor Islam dihadapkan pada tekanan untuk mencapai hasil keuangan yang optimal, sambil memastikan bahwa semua aktivitas investasi mereka sejalan dengan prinsip-prinsip etis Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam industri yang dianggap tidak halal, seperti alkohol atau perjudian. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa strategi investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga menjaga integritas moral dan nilai-nilai syariah. Hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang bijak, evaluasi risiko yang komprehensif, serta kesiapan untuk menghadapi kompromi yang mungkin diperlukan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap investasi, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam. Investor Islam perlu mengembangkan strategi investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan hasil finansial yang baik tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan keseimbangan ini secara holistik, investor Islam dapat membangun portofolio investasi yang

tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menghormati nilai-nilai etika Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan global.

c) Ketidakselarasan Regulasi

Ketidakselarasan regulasi merupakan salah satu tantangan kritis dalam investasi lintas negara dalam konteks bisnis Islam. Ini terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara regulasi hukum syariah yang diikuti oleh investor Islam dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat investasi dilakukan. Misalnya, dalam sektor keuangan, regulasi di beberapa negara mungkin memperbolehkan praktik riba atau bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Hal ini dapat mempersulit investor untuk menjaga kesesuaian investasi mereka dengan prinsip-prinsip syariah tanpa melanggar hukum setempat.

Selain itu, ketidakselarasan regulasi juga mencakup ketidakpastian hukum yang mungkin muncul dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah di berbagai yurisdiksi. Investor Islam harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan setempat dan strategi yang tepat dalam menghadapi perbedaan interpretasi hukum syariah yang mungkin timbul. Ini memerlukan kolaborasi yang erat dengan ahli syariah dan pengacara yang memahami baik konteks hukum setempat maupun prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan aman dalam setiap langkah investasi lintas negara mereka. Dengan pendekatan yang bijaksana dan strategi kepatuhan yang kuat, investor Islam dapat mengelola tantangan ketidakselarasan regulasi ini secara efektif, menjaga integritas investasi mereka, dan mengoptimalkan potensi keuntungan dalam lingkungan bisnis internasional yang kompleks.

d) Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan tantangan signifikan dalam investasi lintas negara dalam konteks bisnis Islam. Hal ini mengacu pada proses verifikasi bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar halal yang diakui secara internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses sertifikasi ini sering kali rumit dan bervariasi antar negara, memerlukan pemahaman mendalam tentang persyaratan lokal serta pengelolaan logistik yang tepat untuk memperoleh sertifikasi yang sah. Tantangan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasok, dari produksi hingga distribusi, mematuhi ketentuan halal dengan teliti, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan di pasar internasional.

Selain itu, sertifikasi halal juga mempengaruhi strategi pemasaran dan branding suatu produk atau layanan. Perusahaan perlu mengkomunikasikan dengan jelas kepada konsumen bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal yang diakui, untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim di berbagai pasar global. Ini menuntut transparansi yang tinggi dalam komunikasi dan promosi produk, serta konsistensi dalam mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasi perusahaan. Dengan memperhatikan tantangan ini secara cermat, perusahaan dapat mengoptimalkan peluang di pasar internasional yang sensitif terhadap nilai etis dan agama, sambil membangun citra merek yang kuat dan berkelanjutan.

Kompleksitas serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh bisnis Islam dalam perdagangan internasional, menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk menjaga integritas dan keberlanjutan dalam praktik bisnis global.

B. Etika Bisnis Islam Dalam Investasi Lintas Negara

a. Pengertian Investasi Lintas Negara dalam Islam

Investasi lintas negara dalam Islam mengacu pada praktik menempatkan modal atau aset keuangan dalam proyek atau bisnis di luar negeri, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, investasi tidak hanya mencakup penempatan dana untuk memperoleh keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek-etika, sosial, dan lingkungan. Praktik ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi investor serta masyarakat di negara yang diinvestasikan.

Dalam Islam, investasi lintas negara harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam industri yang dianggap tidak halal, seperti alkohol atau perjudian. Investasi harus dikelola dengan transparansi dan integritas tinggi, serta harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Investasi lintas negara dalam Islam juga mendorong kolaborasi dan kerjasama yang adil antara investor dan penerima investasi. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut bahwa setiap transaksi investasi harus adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat, tanpa mengeksploitasi atau merugikan pihak lain. Hal ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara negara-negara yang terlibat dalam investasi lintas negara, dengan memperkuat ikatan ekonomi, sosial, dan politik di antara mereka.

Investasi lintas negara dalam Islam juga mencakup prinsip diversifikasi portofolio yang cerdas. Investor dimotivasi untuk menyebar risiko mereka dengan berinvestasi di berbagai sektor ekonomi dan geografis, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan penyebaran risiko yang diajarkan dalam syariah. Diversifikasi ini membantu melindungi modal dari fluktuasi pasar yang tidak terduga, serta meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang dari portofolio investasi.

Dalam Islam, investasi lintas negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemanfaatan umum atau maslahah. Investasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, baik melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, maupun pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Dengan mempertimbangkan dan menerapkan semua aspek ini, investasi lintas negara dalam Islam dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan internasional berdasarkan pada nilai-nilai etis dan moral yang dianut dalam Islam.

b. Landasan Hukum Investasi Lintas Negara dalam Islam

a) Al-Quran

1. Surah Al-Hujurat (49): 10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat*." Ayat ini menekankan persaudaraan di antara orang-orang mukmin, dan pentingnya menjaga perdamaian serta saling memaafkan dalam hubungan internasional. Takwa kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan rahmat-Nya.

2. Surah Al-Mumtahanah (60) :8-9

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Artinya: "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada*

memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya berperilaku terhadap non-muslim yang tidak bermaksud untuk melawan agama Islam atau mengusir umat Islam dari negeri mereka. Prinsip keadilan dan perlakuan yang baik tetap ditekankan.

3. Surah An-Nisa (4): 36

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu dan kepada karib-kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil dan kepada hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri*."

Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua orang, termasuk dalam konteks hubungan internasional. Islam mengajarkan untuk menyebarkan kebaikan kepada semua, tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Ibnu Majah
   Rasulullah bersabda, "Barang siapa membeli makanan hendaknya ia jangan menjualnya sebelum ia menerimanya." Hadis ini mengajarkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh menjual barang sebelum barang

tersebut diterimanya dengan jelas. Ini relevan dalam konteks investasi lintas negara yang melibatkan pengiriman barang atau komoditas dari satu negara ke negara lain.

2. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Rasulullah bersabda, "Tidak sah suatu jual beli melainkan (dengan adanya) pertukaran (barter) dan tidak sah (juga) melainkan (dengan adanya) pertukaran secara sukarela." Hadis ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan kesepakatan dan sukarela antara kedua belah pihak. Ini relevan dalam konteks investasi lintas negara yang mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas dan penuh ridha dari semua pihak yang terlibat.

3. Hadis Riwayat Abu Dawud
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba yang tidak menahan barang yang ada padanya untuk dirinya sendiri, dan tidak juga menahannya untuk menjualkannya, serta tidak pula untuk memberi pinjamkan, kecuali dia mengambilnya sebagai harta perbendaharaan dari mereka yang tidak mampu membayar." Hadis ini mengajarkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Ini relevan dalam konteks investasi lintas negara yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki kondisi ekonomi serta sosial di negara yang menjadi tujuan investasi.

4. Hadis Riwayat Muslim
   Rasulullah bersabda, "Tidak boleh seorang muslim menipu saudaranya." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia berniaga?" Beliau menjawab, "Jangan sampai

salah seorang di antara kalian menipu saudaranya." Hadis ini menekankan larangan terhadap segala bentuk penipuan dalam bisnis dan investasi, termasuk dalam konteks investasi lintas negara. Integritas dan kejujuran dalam transaksi harus dijaga dengan baik.

5. Hadis Riwayat Abu Dawud
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian dari memakan harta riba, dan menjauhilah dari keserakahan." Hadis ini menunjukkan larangan Islam terhadap riba dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan dalam perdagangan internasional. Islam mendorong untuk berdagang dengan jujur dan menjauhi segala bentuk penindasan atau eksploitasi.

6. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas pula. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang tidak jelas), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya." Hadis ini mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk syubhat (yang tidak jelas status halal atau haramnya), termasuk dalam perdagangan internasional. Memahami prinsip-prinsip yang jelas dalam Islam membantu menjaga kebersihan agama dan kehormatan seseorang.

c. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Investasi Lintas Negara

Pentingnya etika dalam investasi lintas negara tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi global, pembangunan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan urgensi etika dalam investasi lintas negara:

a) Membangun Kepercayaan dan Reputasi

Membangun kepercayaan dan reputasi dalam hubungan internasional adalah pondasi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang saling menguntungkan antar negara. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi dalam memenuhi komitmen, transparansi dalam kebijakan dan tindakan, serta integritas dalam menjalankan hubungan bilateral atau multilateral. Ketika negara-negara dapat mempercayai satu sama lain, mereka cenderung lebih terbuka untuk berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya, yang secara langsung menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di masing-masing negara.

Reputasi yang baik dalam hubungan internasional juga memainkan peran kunci dalam menarik investasi asing dan memperluas akses pasar untuk produk-produk domestik. Negara-negara dengan reputasi yang kuat untuk stabilitas politik, hukum yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak investor lebih mungkin menarik minat investor asing yang mencari peluang investasi jangka panjang yang aman dan menguntungkan. Oleh karena itu, membangun dan memelihara reputasi yang positif di panggung internasional bukan hanya tentang citra, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas global secara keseluruhan.

b) Menyediakan Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur

Menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam investasi lintas negara yang beretika. Infrastruktur yang memadai merupakan pondasi yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun berkembang. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, energi, dan teknologi informasi tidak hanya

meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang baru untuk investasi sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Investasi yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan ini tidak hanya memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitas yang terlibat. Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c) Memfasilitasi Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan dalam konteks investasi lintas negara memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif. Transfer teknologi melibatkan pengenalan, adopsi, dan pengembangan teknologi baru di negara-negara penerima investasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas akses terhadap inovasi terkini yang dapat mengubah industri dan layanan. Dengan memfasilitasi akses terhadap teknologi, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari pengetahuan dan teknologi canggih untuk meningkatkan daya saing global mereka.

Selain itu, transfer pengetahuan juga berperan dalam memperkuat kapasitas manusia dan institusi di negara penerima investasi. Melalui pelatihan, pendidikan, dan

kolaborasi riset antar negara, transfer pengetahuan membantu mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas. Ini tidak hanya membuka peluang pekerjaan dan pengembangan karir, tetapi juga meningkatkan kemampuan lokal untuk berinovasi dan menanggapi tantangan global. Dengan demikian, investasi yang memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas inovasi dan pengembangan manusia, menjadikan mereka aset berharga dalam mendorong kemajuan global yang berkelanjutan.

d) Pertumbuhan Pasar Global yang Adil

Pertumbuhan pasar global yang adil mencakup penciptaan kondisi ekonomi yang memungkinkan semua negara, terutama negara-negara berkembang, untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dengan cara yang adil dan merata. Hal ini melibatkan pengurangan disparitas ekonomi antar-negara melalui kebijakan perdagangan yang inklusif dan pemberdayaan ekonomi yang merata. Pertumbuhan yang adil memastikan bahwa manfaat ekonomi dari globalisasi dan perdagangan bebas dirasakan secara luas oleh semua sektor masyarakat, bukan hanya oleh segelintir pemain besar atau negara maju.

Upaya untuk mencapai pertumbuhan pasar global yang adil juga mencakup pengurangan hambatan perdagangan, penyediaan akses yang setara terhadap pasar global bagi semua negara, serta dukungan untuk pengembangan infrastruktur dan kemampuan institusional di negara-negara berkembang. Hal ini membantu menciptakan peluang yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dengan mempromosikan pertumbuhan pasar global

yang adil, komunitas internasional dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan dan menguntungkan semua negara dan warganya secara adil.

e) Mendukung Perdamaian dan Stabilitas Global

Mendukung perdamaian dan stabilitas global merupakan prioritas utama dalam hubungan internasional karena hal ini menciptakan landasan yang kokoh bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik secara global. Perdamaian yang terjaga memungkinkan negara-negara untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa terganggu oleh konflik bersenjata atau ketegangan politik yang meruncing. Stabilitas global juga memberikan kepastian kepada pasar internasional dan investor, mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian politik atau keamanan, serta memungkinkan untuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

Di samping itu, mendukung perdamaian dan stabilitas global juga mengarah pada kerjasama internasional yang lebih erat dalam mengatasi tantangan global bersama seperti perubahan iklim, perdagangan ilegal, dan pandemi global. Kerjasama ini melibatkan negosiasi diplomasi yang efektif, pengembangan perjanjian internasional yang mengikat, serta partisipasi aktif dalam forum-forum multilateral. Dengan membangun fondasi perdamaian yang kuat, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan terhadap masalah-masalah kompleks ini, menciptakan masa depan yang lebih aman dan makmur bagi seluruh umat manusia.

Melalui penerapan etika dalam investasi lintas negara, kita dapat membangun ekonomi global yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Etika bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang

memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari setiap keputusan investasi. Dengan demikian, investasi lintas negara yang beretika dapat menjadi kekuatan positif dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

d. Nilai-Nilai Etis dalam Investasi Lintas Negara

Nilai etis dalam investasi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari investor dan entitas yang terlibat dalam kegiatan investasi. Nilai-nilai ini membentuk dasar untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa nilai etis yang penting dalam konteks investasi:

a) Pembagian Risiko dan Keuntungan yang Adil

Pembagian risiko dan keuntungan yang adil merupakan prinsip penting dalam hubungan bisnis internasional yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Prinsip ini mengacu pada kesepakatan yang adil antara investor dan pihak yang menerima investasi internasional, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi, tanggung jawab, dan kapasitas masing-masing pihak. Dengan menerapkan pembagian yang adil ini, bisnis internasional dapat meminimalkan ketidakseimbangan yang dapat mengarah pada ketegangan atau konflik di antara negara-negara mitra.

Selain itu, pembagian risiko dan keuntungan yang adil juga menciptakan dasar yang stabil untuk kerja sama jangka panjang dan kemitraan yang berkelanjutan. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk merencanakan dan mengelola risiko dengan lebih efektif, serta memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam mencari solusi bersama untuk tantangan yang mungkin

timbul selama perjalanan bisnis internasional. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya tentang keadilan dalam pembagian hasil ekonomi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.

b) Inklusivitas dan Partisipasi Masyarakat

Inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam konteks investasi lintas negara merupakan strategi yang krusial untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari investasi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini melibatkan pengembangan proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan komunitas-komunitas yang lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan, implementasi, dan manfaat dari investasi, dapat diciptakan iklim ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam investasi lintas negara juga memperkuat legitimasi proyek-proyek tersebut di mata publik. Melalui dialog terbuka, transparansi informasi, dan keterlibatan aktif dalam proses keputusan, masyarakat dapat merasa lebih terhubung dengan proyek investasi yang dilakukan di wilayah mereka. Ini tidak hanya mengurangi resistensi terhadap perubahan dan konflik sosial, tetapi juga membangun dukungan yang lebih luas untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, inklusivitas dan partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi aspek etika yang penting dalam investasi lintas negara, tetapi juga menjadi strategi yang cerdas dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi dan sosial jangka panjang.

c) Komitmen Jangka Panjang

Komitmen jangka panjang dalam nilai etis investasi lintas negara dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip yang menuntut para investor untuk menjaga keberlanjutan dan dampak positif dari investasi mereka dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu aspek utama dari komitmen jangka panjang adalah istiqamah, yaitu kesetiaan dan konsistensi dalam menjalankan investasi dengan mematuhi nilai-nilai moral dan etika Islam. Ini berarti tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari keputusan investasi.

Selain itu, komitmen jangka panjang dalam investasi lintas negara Islam juga mencakup pertimbangan terhadap prinsip taklif, yaitu tanggung jawab moral untuk memperhatikan kesejahteraan umum dalam setiap keputusan investasi. Hal ini mencakup memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi investor tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan tempat investasi berlangsung. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, investor dalam Islam diharapkan dapat membangun portofolio investasi yang berkelanjutan, mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif, dan memberikan dampak positif yang berkesinambungan bagi negara-negara dan masyarakat yang mereka investasikan.

d) Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi dan pembangunan berkelanjutan dalam nilai etis investasi lintas negara Islam menekankan pentingnya mempromosikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif, sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Inovasi dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk menciptakan solusi baru dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, teknologi, dan praktik bisnis yang dapat memberikan manfaat jangka

panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Para investor Islam dianjurkan untuk mendukung inovasi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, seiring dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan dalam investasi lintas negara Islam melibatkan upaya untuk membangun ekonomi yang inklusif dan adil, yang memberdayakan masyarakat setempat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar-negara. Prinsip taklif dalam Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini mencakup memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan mempromosikan pengembangan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan. Dengan mengikuti nilai-nilai inovasi dan pembangunan berkelanjutan ini, investor Islam dapat memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi global menuju keberlanjutan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh umat manusia.

Nilai-nilai etis dalam investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang baik, tetapi juga membantu membangun kepercayaan, meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa investasi memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, investor dapat memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Investasi Lintas Negara

Berikut beberapa tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam investasi lintas negara:

a) Kepatuhan Terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan aspek krusial dalam konteks investasi lintas negara dalam bisnis Islam. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam dan penerapan yang akurat terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara-negara tempat investasi dilakukan, sekaligus memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan utamanya adalah ketika ada perbedaan antara hukum lokal dan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam regulasi keuangan, perlindungan konsumen, atau kebijakan lingkungan. Investor Islam harus menjaga keseimbangan yang tepat antara mematuhi hukum setempat untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kesesuaian dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasari prinsip investasinya. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengadopsi pendekatan yang teliti dan kreatif dalam strategi kepatuhan hukum, sering kali melibatkan konsultasi dengan ahli syariah dan pengacara yang memahami baik konteks hukum setempat maupun prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi dan integritas dalam menjalankan bisnis di berbagai yurisdiksi yang mungkin memiliki persyaratan hukum yang berbeda-beda. Ini memerlukan ketelitian dalam merancang struktur kontrak dan transaksi, serta mengelola risiko hukum yang dapat timbul dari perbedaan interpretasi atau pelaksanaan hukum di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan ini, investor dan perusahaan Islam perlu mengembangkan keahlian khusus dalam kepatuhan hukum yang berbasis pada nilai-nilai etis Islam, sambil terus

berupaya untuk mencapai tujuan bisnis mereka secara efektif dan berkelanjutan dalam lingkungan global yang kompleks.

b) Pengelolaan Portofolio Syariah

Pengelolaan portofolio syariah merupakan tantangan penting dalam investasi lintas negara dalam konteks bisnis Islam. Portofolio syariah harus mematuhi prinsip-prinsip etika Islam yang meliputi larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam industri yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tantangan utama adalah memastikan bahwa semua investasi dan aset dalam portofolio sesuai dengan ketentuan syariah, seperti memilih instrumen investasi yang tidak mengandung bunga atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang syariah dan kemampuan untuk menilai dan memantau kompatibilitas setiap investasi dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, pengelolaan portofolio syariah juga melibatkan aspek diversifikasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investor harus mencari cara untuk mendiversifikasi portofolio mereka secara etis, menghindari sektor-sektor atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap tidak halal atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Ini sering kali melibatkan tantangan ekstra dalam menilai dan memilih investasi yang tidak hanya memenuhi kriteria keuangan, tetapi juga etika dalam konteks investasi internasional yang beragam. Dengan demikian, manajemen portofolio syariah memerlukan pendekatan yang hati-hati, pengetahuan yang mendalam tentang syariah, serta strategi investasi yang dapat memenuhi tuntutan hukum dan nilai-nilai moral yang dianut dalam bisnis Islam.

c) Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengelolaan konflik kepentingan dalam konteks investasi lintas negara dalam bisnis Islam menjadi penting karena adanya potensi untuk terlibat dalam situasi di mana kepentingan finansial bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Konflik kepentingan dapat muncul ketika investor atau perusahaan memiliki kepentingan yang saling bertentangan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti dalam investasi pada industri yang terlibat dalam praktik yang dianggap tidak halal. Untuk mengelola tantangan ini, penting bagi para investor untuk membangun kebijakan internal yang jelas tentang identifikasi, pengungkapan, dan penanganan konflik kepentingan. Hal ini melibatkan adopsi prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan investasi, serta keterlibatan ahli syariah untuk memberikan nasihat yang sesuai.

Selain itu, pengelolaan konflik kepentingan juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap investasi atau transaksi tidak hanya mematuhi hukum setempat tetapi juga prinsip-prinsip etika Islam. Ini mencakup evaluasi mendalam terhadap risiko etika dan keuangan yang terlibat dalam setiap langkah investasi, serta kesiapan untuk mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi konflik antara keuntungan finansial dan integritas syariah. Dengan pendekatan yang proaktif dan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, investor Islam dapat mengelola konflik kepentingan dengan baik dan membangun reputasi yang kuat dalam investasi lintas negara yang sesuai dengan nilai-nilai etis Islam.

d) Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas dalam konteks investasi lintas negara dalam bisnis Islam adalah suatu keharusan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan dalam operasi bisnis internasional. Tantangan utamanya

adalah membangun tim manajemen dan staf yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola investasi secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai etis Islam. Ini melibatkan pengembangan keahlian dalam analisis risiko yang berbasis syariah, penilaian yang teliti terhadap potensi investasi, serta kemampuan untuk menjalankan operasi bisnis dengan integritas dan transparansi.

Selain itu, pengembangan kapasitas juga mencakup pendidikan dan pelatihan terus-menerus bagi personel tentang perkembangan terbaru dalam hukum syariah dan tren bisnis global. Ini membantu mereka menghadapi tantangan kompleks yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah, seperti interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip syariah atau perubahan dalam regulasi internasional yang mempengaruhi bisnis lintas negara. Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan kapasitas ini, perusahaan Islam dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam investasi lintas negara, sambil tetap berkomitmen pada nilai-nilai etika Islam yang menjadi landasan operasional mereka.

Memahami dan mengelola tantangan ini dengan bijak akan membantu memastikan bahwa investasi lintas negara yang dilakukan tidak hanya memenuhi tujuan finansial tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Rangkuman

Etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara menekankan pada prinsip-prinsip moral dan hukum syariah yang membimbing praktik bisnis Muslim di skala global. Dalam konteks perdagangan internasional, etika

bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam semua transaksi. Ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan praktik bisnis yang merugikan atau menguntungkan satu pihak secara tidak adil. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam interaksi antara perusahaan Muslim dengan konsumen dan mitra bisnis internasional, tetapi juga dalam cara perusahaan mengelola rantai pasok mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis Islam.

Sementara itu, dalam investasi lintas negara, etika bisnis Islam menambahkan lapisan kompleksitas karena investor harus memastikan bahwa setiap investasi mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan evaluasi yang cermat terhadap potensi investasi, termasuk aspek hukum, keuangan, sosial, dan lingkungan. Investasi yang sesuai dengan syariah harus menghindari sektor-sektor atau praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri alkohol, perjudian, atau industri lainnya yang dianggap tidak halal. Selain itu, investasi lintas negara dalam bisnis Islam menekankan pentingnya membangun hubungan yang berlandaskan pada kepercayaan, saling menghormati, dan keadilan, baik dengan pihak lokal maupun internasional.

Dalam kedua konteks ini, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi setempat juga menjadi fokus utama. Etika bisnis Islam mengharuskan bahwa semua praktik bisnis dan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat dan kepatuhan terhadap norma-norma etis yang berlaku di masyarakat lokal dan global. Kesadaran terhadap keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam kedua aspek ini, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan bisnis dan investasi.

Selain itu, etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara mendorong adanya

inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Investor dan perusahaan Islam dianjurkan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini sejalan dengan tujuan Islam untuk mendorong kemajuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup umat manusia secara keseluruhan.

Selain itu, dalam konteks perdagangan internasional dan investasi lintas negara, etika bisnis Islam juga mendorong untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara berbagai pihak yang terlibat. Ini termasuk membangun kemitraan strategis yang mempromosikan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara negara-negara dan budaya-budaya yang berbeda. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi global secara menyeluruh sambil mempertahankan nilai-nilai etis dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Dalam kesimpulan, etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melandasi setiap aspek praktik bisnis dan keputusan investasi. Ini mencakup keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan inovasi. Dengan mengikuti nilai-nilai etis ini, perusahaan dan investor Islam dapat membangun reputasi yang kuat dalam skena bisnis global, sambil memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia.

D. Penilaian Formatif

a. Pilihan Ganda

1. Prinsip utama yang ditekankan dalam etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara adalah...

a) Keuntungan finansial semata
b) Kebebasan dalam praktik bisnis
c) Keadilan, kejujuran, dan transparansi
d) Penghindaran terhadap regulasi lokal

2. Salah satu aspek penting dari etika perdagangan internasional dalam Islam adalah...
   a) Memperlakukan konsumen non-Muslim dengan diskriminatif
   b) Mengutamakan keuntungan finansial tanpa memperhatikan keadilan sosial
   c) Menjaga komitmen terhadap transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi
   d) Memaksimalkan keuntungan tanpa memedulikan dampak lingkungan.
3. Investasi lintas negara dalam Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang...
   a) Kemitraan strategis
   b) Investasi berdasarkan penilaian risiko
   c) Praktik bisnis yang dianggap tidak halal
   d) Pengembangan teknologi berkelanjutan
4. Diversifikasi portofolio investasi dalam Islam bertujuan untuk...
   a) Meminimalkan risiko investasi
   b) Menghindari perdagangan internasional
   c) Memaksimalkan spekulasi berlebihan
   d) Membatasi kegiatan bisnis
5. Fokus utama etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional adalah memastikan...
   a) Profitabilitas yang tinggi
   b) Keberlanjutan lingkungan
   c) Monopoli pasar global
   d) Praktik spekulatif yang intens

6. Prinsip etika bisnis Islam mengharuskan bahwa investasi lintas negara harus membangun hubungan yang didasarkan pada...
   a) Eksklusivitas dan dominasi pasar
   b) Keuntungan individu yang maksimal
   c) Keadilan, kepercayaan, dan saling menghormati
   d) Strategi penghindaran risiko
7. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam investasi lintas negara dalam Islam meliputi...
   a) Diversifikasi risiko dan regulasi lokal
   b) Penyembunyian informasi dan spekulasi
   c) Penghindaran tanggung jawab sosial
   d) Monopoli pasar dan profitabilitas tinggi
8. Etika bisnis Islam mendorong untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan untuk...
   a) Menekan biaya produksi
   b) Menguntungkan bisnis lokal
   c) Meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi
   d) Memaksimalkan laba dalam jangka pendek
9. Secara garis besar, etika bisnis Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara menekankan pentingnya...
   a) Pengembangan industri minuman beralkohol
   b) Pengelolaan risiko tanpa pertimbangan etika
   c) Keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam semua aspek bisnis
   d) Keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak sosial
10. Investasi lintas negara dalam Islam harus memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan...
    a) Kepentingan pribadi investor

b) Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan
c) Monopoli pasar dan pengendalian sumber daya
d) Spekulasi finansial dan kerugian sosial

b. Benar/Salah

1. (Benar/Salah) Prinsip saling menguntungkan dalam perdagangan internasional Islam berarti semua pihak harus merasa adil dan mendapat keuntungan yang seimbang.
2. (Benar/Salah) Islam menganjurkan praktik perdagangan yang membatasi akses terhadap produk atau jasa tertentu hanya kepada komunitas Muslim.
3. (Benar/Salah) Perdagangan internasional dalam Islam mendorong keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam semua transaksi.
4. (Benar/Salah) Dalam Islam, investasi lintas negara harus memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di negara yang diinvestasikan.
5. (Benar/Salah) Investasi lintas negara Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), judi, dan investasi dalam industri alkohol atau daging babi.
6. (Benar/Salah) Islam membenarkan praktik penyuapan dan korupsi dalam investasi lintas negara jika itu menguntungkan bisnis.
7. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam menyarankan pengusaha Muslim untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas keadilan sosial dan ekologis
8. (Benar/Salah) Praktik perdagangan dan investasi dalam Islam tidak boleh melanggar hukum-hukum negara tempat beroperasinya bisnis tersebut.

9. (Benar/Salah) Konsep musyarakah dan mudarabah adalah bentuk-bentuk investasi yang disetujui dalam prinsip investasi Islam.
10. (Benar/Salah) Islam mengizinkan praktik monopoli dan pengendalian harga dalam perdagangan internasional demi keuntungan.

c. Esai

1. Jelaskan nilai-nilai etis dalam konteks perdagangan internasional dalam konteks etika bisnis Islam.
2. Bagaimana Islam memandang perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam konteks perdagangan internasional?
3. Bagaimana konsep saling menguntungkan (win-win) diterapkan dalam perdagangan internasional dalam Islam?
4. Jelaskan nilai-nilai etis yang harus diikuti dalam investasi lintas negara menurut etika bisnis Islam.
5. Bagaimana Islam memandang keberlanjutan lingkungan dalam konteks investasi lintas negara?
6. Bandingkan antara nilai etis Isla dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Apa persamaan dan perbedaannya?
7. Bagaimana etika bisnis Islam dapat membantu dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama antarbangsa?
8. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis Muslim dalam menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara?
9. Bagaimana etika bisnis Islam dapat mengatasi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks perdagangan internasional dan investasi?
10. Apa peran pemimpin bisnis Muslim dalam mempromosikan etika bisnis Islam dalam skala global?

d. Studi Kasus

1. Jelaskan bagaimana pentingnya keadilan dalam perdagangan internasional dalam Islam dapat meningkatkan reputasi bisnis Anda di tingkat global.
2. Anda adalah seorang eksportir produk halal dari sebuah negara Muslim ke pasar internasional yang beragam. Bagaimana Anda akan mempromosikan keunggulan produk Anda sambil mempertahankan integritas etika bisnis Islam?
3. Sebagai seorang pengusaha Muslim, Anda ingin menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan non-Muslim dalam konteks perdagangan internasional. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa kemitraan ini mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam?
4. Gambarkan skenario di mana praktik perdagangan internasional dalam Islam dapat berkontribusi secara positif terhadap pengembangan ekonomi di negara berkembang.
5. Buatlah rencana investasi lintas negara yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, dengan mempertimbangkan pandangan Islam tentang pemeliharaan alam.
6. Anda ingin berinvestasi di sebuah negara dengan budaya yang berbeda dengan negara asal Anda. Bagaimana Anda akan menyesuaikan strategi bisnis Anda agar menghormati kebudayaan dan nilai-nilai lokal sesuai dengan etika bisnis Islam?
7. Buatlah inisiatif baru untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara-negara Muslim berdasarkan nilai-nilai etika bisnis Islam.
8. Gambarkan bagaimana teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk memperkuat penerapan etika bisnis

Islam dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara.

9. Anda adalah seorang penasihat ekonomi untuk sebuah lembaga pemerintah di negara mayoritas Muslim. Bagaimana Anda akan memberikan saran untuk meningkatkan perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam?
10. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam forum internasional, apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan dan mengapa itu relevan?

TOPIK 3
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KONTEKS GLOBAL II

A. Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara

a. Pengertian Kerjasama Industri Kreatif dalam Islam

Industri kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berkembang pesat dan menggabungkan kreativitas, keahlian, dan kebudayaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial melalui produk-produk dan layanan-layanan yang berbasis pada kekreatifan dan intelektualitas. Industri kreatif meliputi berbagai bidang yang menggabungkan kreativitas, keahlian teknis, dan kebudayaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Ini termasuk seni rupa, desain grafis, arsitektur, musik, film dan televisi, permainan video, penerbitan, mode, periklanan, serta sektor-sektor baru seperti seni digital dan konten online. Kunci dari industri kreatif adalah penggunaan ide-ide kreatif, keterampilan teknis, dan teknologi modern untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan menarik bagi pasar global maupun lokal.

Industri kreatif tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui ekspresi budaya, identitas lokal, dan berbagai bentuk inovasi dalam bentuk yang menarik dan komersial, menjadikannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kreatif. Keberhasilan industri kreatif sering kali terkait erat dengan kemampuannya untuk menggabungkan unsur-unsur budaya, teknologi, dan bisnis dalam bentuk yang menarik dan komersial. Selain itu, industri kreatif juga memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, memajukan kehidupan budaya, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui penciptaan ekosistem yang mendukung pengembangan bakat dan kreativitas.

Industri kreatif dalam Islam merupakan sektor ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, industri kreatif tidak hanya dianggap sebagai alat untuk menciptakan kekayaan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan yang tercermin dalam nilai-nilai agama. Industri kreatif dalam Islam mendorong penggunaan kreativitas dan keahlian untuk menghasilkan produk-produk dan layanan-layanan yang tidak hanya estetis dan inovatif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang dianjurkan oleh agama Islam.

Lebih lanjut, industri kreatif dalam Islam mempromosikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari setiap aspek produksi dan distribusi. Praktik bisnis dalam industri kreatif harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menghormati hak-hak individu dan kolektif. Secara holistik, industri kreatif dalam Islam bukan hanya tentang menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan penciptanya, dengan tujuan akhir mencapai keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kerjasama industri kreatif dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang islami dalam konteks kerjasama antar negara dalam bidang seni, desain, teknologi, dan hiburan. Dalam Islam, kerjasama dianggap sebagai bagian dari konsep *ukhuwah* (persaudaraan) dan *takaful* (saling tolong-menolong), yang menekankan pentingnya saling mendukung dan saling memperkuat antara individu, komunitas, dan negara-negara. Dalam konteks industri kreatif, kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, mendorong inovasi, dan

memperluas dampak positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks etika bisnis Islam, kerjasama industri kreatif juga menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap tahapan proses kerjasama. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan yang adil dan bijaksana atas sumber daya, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta nilai-nilai lokal di mana kerjasama itu terjadi. Kerjasama industri kreatif dalam Islam juga menuntut agar setiap pihak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis mereka terhadap kepentingan umum dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, kerjasama ini bukan hanya tentang menciptakan nilai ekonomi tetapi juga tentang mewujudkan visi yang lebih luas untuk kesejahteraan bersama dan kemajuan yang berkelanjutan bagi umat manusia.

b. Landasan Hukum Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara dalam Islam

a. Al-Quran

1. Surah Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ...

Artinya: "*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*." Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks kerjasama industri kreatif antar negara, prinsip ini dapat mengarahkan pada kolaborasi yang membangun, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas,

dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak bermanfaat.

2. Surah Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dan saling mendukung di antara manusia, termasuk dalam kerjasama antar negara dalam industri kreatif. Prinsip kasih sayang, rasa hormat, dan kerjasama yang baik harus dijaga dalam setiap interaksi, sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

3. Surah Al-An'am (6): 151

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "*Katakanlah: 'Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan (yang ditakutkan) oleh kamu dan oleh mereka. Kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah*

kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Demikianlah Allah menyuruh kamu supaya kamu memahaminya'."

Ayat ini memuat perintah yang mencerminkan etika dalam Islam, termasuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks industri kreatif antar negara, prinsip ini mengajarkan untuk menghindari praktik tidak etis serta untuk menghargai dan melindungi kreativitas, hak kekayaan intelektual, dan keberagaman budaya.

b. Hadits

1. Hadis Riwayat Bukhari

   Dari Anas bin Malik ra.: Rasulullah bersabda, "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." Hadis ini menegaskan pentingnya kerjasama dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan ketaqwaan, yang dapat diterapkan dalam kolaborasi antar negara untuk memajukan bidang industri kreatif secara bertanggung jawab.

2. Hadis Riwayat Ahmad

   Dari Abdullah bin Amr bin Al-As ra.: Rasulullah bersabda, "Orang yang paling dicintai Allah di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis ini menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada sesama, yang relevan dalam konteks kerjasama antar negara untuk mengembangkan potensi industri kreatif secara adil dan berkelanjutan.

3. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah." Hadis ini menunjukkan pentingnya menghargai kontribusi dan bantuan dari orang lain, yang penting dalam menjalin kerjasama internasional di bidang industri kreatif.

4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   *Dari Abdullah bin Mas'ud ra.: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya."*Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas tindakannya, yang relevan dalam konteks kerjasama antar negara dalam mengelola industri kreatif dengan baik.

5. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menghilangkan kerusakan dari jalan, janganlah kalian jadikan pelayaran di laut menjadi kehancuran dan janganlah kalian membahayakan orang lain." Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dan keselamatan, yang relevan dalam konteks pengembangan industri kreatif yang bertanggung jawab dan aman.

6. Hadis Riwayat Tirmidzi
   Dari Anas bin Malik ra.: Rasulullah bersabda, "Mudah-mudahan engkau diberkahi dalam perdaganganmu, dan semoga engkau diberkahi dalam pemberianmu, dan semoga engkau diberkahi dalam pengikatan tali persaudaraan." Hadis ini menekankan pentingnya perdagangan yang berkah dan kerjasama yang baik di

antara saudara-saudara seiman, yang dapat diterapkan dalam konteks kerjasama internasional untuk memajukan industri kreatif secara berkelanjutan dan adil.

c. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara lebih menekankan pada beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengembangan Industri Kreatif

Etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara penting dalam pengembangan karya seni, desain, media, dan konten kreatif karena menawarkan prinsip-prinsip yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan penghargaan atas nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, keadilan merupakan aspek yang sangat relevan karena etika bisnis Islam menekankan perlunya memperlakukan semua pihak dengan adil, termasuk dalam pembagian keuntungan dan penghargaan atas karya seni dan konten kreatif. Hal ini menghindarkan praktik eksploitasi dan ketidakadilan yang sering kali dapat merugikan seniman dan kreator.

Etika bisnis Islam juga menekankan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Ini mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, yang menjadi semakin penting dalam industri kreatif yang sering kali mengandalkan sumber daya alam dan memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat menghasilkan karya seni dan konten kreatif yang tidak hanya inovatif tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan sosial.

Penghargaan atas nilai-nilai budaya merupakan aspek lain dari urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif. Etika bisnis Islam mendorong penghormatan

terhadap nilai-nilai budaya lokal dan global, serta mendorong integrasi nilai-nilai yang positif dalam karya-karya seni dan konten kreatif. Hal ini tidak hanya memperkaya kekayaan kultural global tetapi juga memastikan bahwa kerjasama antar negara dalam industri kreatif tidak mengorbankan nilai-nilai kultural dalam prosesnya. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya membantu dalam pengembangan industri kreatif secara ekonomi, tetapi juga secara kultural dan sosial, menjadikan kerjasama lintas negara lebih berarti dan berdampak positif bagi masyarakat global secara luas.

b) Produksi Industri Kreatif

Etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara menjadi krusial dalam konteks produksi karya seni, desain, media, dan konten kreatif karena menawarkan kerangka kerja yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Salah satu aspek utama dari etika bisnis Islam adalah konsep keadilan dalam produksi. Ini mencakup perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, termasuk seniman, desainer, dan kreator konten. Keadilan ini menghindarkan praktik eksploitasi dan penindasan dalam industri kreatif, serta memastikan bahwa semua kontributor mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kontribusi mereka.

Selain keadilan, etika bisnis Islam juga menekankan transparansi dalam proses produksi. Transparansi ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang proses produksi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta persyaratan kontrak yang jelas dan adil. Dengan mempromosikan transparansi, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak dan mengurangi risiko konflik atau ketidaksepakatan yang dapat menghambat kemajuan produksi dan kolaborasi.

Etika bisnis Islam juga mendorong keberlanjutan dalam produksi karya seni, desain, media, dan konten kreatif. Prinsip keberlanjutan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, menghormati nilai-nilai budaya lokal, dan memperhatikan dampak sosial dari aktivitas produksi. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ini, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat menghasilkan produk-produk yang tidak hanya inovatif dan berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal dan global. Oleh karena itu, urgensi etika bisnis Islam dalam produksi karya seni, desain, media, dan konten kreatif tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan nilai-nilai etika yang tinggi dalam seluruh proses produksi.

c) Distribusi Industri Kreatif

Etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara juga penting dalam konteks distribusi karya seni, desain, media, dan konten kreatif. Etika bisnis Islam menawarkan kerangka kerja yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan dalam distribusi hasil, transparansi dalam transaksi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Keadilan dalam distribusi hasil merupakan prinsip utama yang menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi karya seni dan konten kreatif mendapatkan pengakuan dan imbalan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka. Hal ini menghindarkan praktik eksploitasi dan penguasaan yang tidak adil atas karya intelektual.

Transparansi dalam transaksi juga menjadi aspek penting dalam etika bisnis Islam. Dengan mengutamakan transparansi, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat berjalan lebih efisien dan terpercaya. Pihak-pihak yang

terlibat dalam distribusi karya seni dan konten kreatif dapat saling memahami kondisi dan kewajiban mereka secara jelas, mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kerjasama jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, etika bisnis Islam juga mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sosial. Dalam konteks distribusi karya seni dan konten kreatif, hal ini berarti menghormati dan mempertimbangkan dampak lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, kerjasama antar negara dalam industri kreatif tidak hanya mempromosikan inovasi dan kreasi baru, tetapi juga bertanggung jawab terhadap warisan budaya dan lingkungan global. Ini memastikan bahwa distribusi karya seni dan konten kreatif tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat global.

d) Memberikan Kontribusi Signifikan terhadap Ekonomi Kreatif Global

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kreatif global. Etika bisnis Islam menawarkan prinsip-prinsip yang dapat memperkuat struktur dan pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Salah satu prinsip utamanya adalah keadilan dalam transaksi ekonomi, yang memastikan bahwa distribusi keuntungan dan imbalan dalam industri kreatif dilakukan dengan adil kepada semua pihak yang terlibat, termasuk seniman, produsen, dan distributor. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menguntungkan bagi semua stakeholders.

Etika bisnis Islam juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif. Dengan mengutamakan

nilai-nilai seperti integritas, keberanian untuk bereksperimen, dan tanggung jawab sosial, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat menghasilkan produk-produk yang lebih bermakna dan berdaya saing tinggi di pasar global. Inovasi ini tidak hanya mencakup aspek teknologi dan desain, tetapi juga dalam pendekatan bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Terakhir, etika bisnis Islam mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang kuat, yang mendorong perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ekonomi kreatif global, ini berarti bahwa kerjasama antar negara tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga pada pembaruan struktural dan nilai-nilai yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat global.

e) Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara pun mencakup penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan. Etika bisnis Islam mendorong prinsip-prinsip seperti keadilan dalam kesempatan kerja dan distribusi hasil, yang berpotensi menghasilkan lingkungan bisnis yang inklusif dan merata. Dalam industri kreatif, ini berarti memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai talenta kreatif dari berbagai negara untuk berpartisipasi dan mengembangkan karir mereka tanpa diskriminasi.

Etika bisnis Islam mendorong inovasi dalam pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi dan sosial, kerjasama antar negara dalam industri kreatif dapat menciptakan platform yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), serta wirausahawan kreatif. Ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru melalui peluang-peluang bisnis baru yang muncul dari kolaborasi lintas negara.

Etika bisnis Islam juga menekankan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang kuat, yang dapat menggerakkan industri kreatif untuk memprioritaskan dampak positif bagi masyarakat luas. Melalui program-program TJSP yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan komunitas lokal, kerjasama industri kreatif antar negara dapat membantu mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan secara sosial. Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat global.

f) Mempromosikan Budaya dan Identitas Bangsa melalui Karya Seni dan Kreativitas

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara sangat relevan dalam konteks mempromosikan budaya dan identitas bangsa melalui karya seni dan kreativitas. Etika bisnis Islam mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan global, serta mempromosikan keragaman sebagai sumber kekayaan. Dalam industri kreatif, hal ini berarti menjaga keaslian budaya setempat dalam karya-karya seni dan konten kreatif

yang dihasilkan, sehingga masyarakat dapat merasa terwakili dan dihargai dalam ranah internasional.

Selain itu, etika bisnis Islam mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang luas. Dalam kerjasama antar negara dalam industri kreatif, hal ini berarti berkontribusi pada pembangunan sosial melalui karya seni yang menginspirasi, mendidik, dan merangkul nilai-nilai kemanusiaan universal. Pengembangan kerjasama ini tidak hanya menghasilkan karya seni yang berkualitas tinggi, tetapi juga membawa pesan-pesan yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kesatuan di antara berbagai budaya dan identitas bangsa.

Terakhir, etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan inklusif dalam mengelola kerjasama lintas budaya. Dengan membangun jembatan antar negara melalui karya seni dan kreativitas, etika bisnis Islam mendorong dialog dan pemahaman saling antar budaya. Ini membantu memperkuat hubungan antar bangsa dan membangun fondasi untuk kerjasama yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam industri kreatif global. Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara tidak hanya terletak pada aspek ekonomi dan bisnis, tetapi juga pada memperkokoh budaya, identitas bangsa, serta mempromosikan perdamaian dan harmoni di tingkat global.

d. Nilai-Nilai Etis dalam Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara

Beberapa nilai etis yang penting dalam konteks kerjasama industri kreatif antar negara meliputi:

a) Inovasi

Inovasi dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara mengacu pada pengembangan ide, produk, atau layanan baru yang dapat meningkatkan pengalaman

wisatawan dan memperkuat daya saing destinasi pariwisata. Hal ini mencakup penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan aplikasi dan platform digital untuk pengelolaan destinasi dan pelayanan kepada wisatawan, serta pengembangan atraksi wisata yang unik dan menarik. Dalam praktiknya, inovasi dapat membantu meningkatkan pengalaman wisatawan dengan menyediakan pilihan yang lebih beragam dan berkelas, serta memperluas basis kunjungan ke destinasi pariwisata yang lebih luas.

Sementara itu, dalam industri kreatif antar negara, inovasi mencakup eksplorasi dan pengembangan baru dalam seni, desain, media, dan konten kreatif lainnya yang melintasi batas-batas budaya. Inovasi dalam konteks ini dapat berupa penggabungan teknologi baru dengan ekspresi seni tradisional, penciptaan produk-produk yang berbeda dan inovatif, serta adaptasi karya-karya kreatif untuk pasar global yang lebih luas. Dengan mendorong inovasi dalam industri kreatif, kerjasama antar negara dapat menghasilkan pertukaran ide yang produktif, memperkuat koneksi budaya, dan mempromosikan pengakuan terhadap kekayaan budaya yang beragam di seluruh dunia.

b) Promosi Kreativitas Lokal

Promosi kreativitas lokal dalam kerjasama pariwisata antar negara menekankan pentingnya mendukung dan memajukan ekspresi seni, desain, musik, dan budaya lokal di destinasi pariwisata. Ini melibatkan pengakuan terhadap keunikan dan kekayaan budaya setempat serta upaya untuk memperluas apresiasi terhadap seni tradisional dan kontemporer. Dengan mendorong kreativitas lokal, pariwisata dapat menjadi platform untuk mempromosikan warisan budaya yang berharga, memperkaya pengalaman wisatawan dengan konten yang otentik dan beragam, serta

menciptakan peluang ekonomi baru bagi komunitas seniman dan pengrajin lokal.

Di sisi lain, dalam industri kreatif antar negara, promosi kreativitas lokal mengacu pada dukungan terhadap produksi dan distribusi karya-karya kreatif yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya dari berbagai negara. Hal ini tidak hanya membantu melindungi dan memperluas pasar untuk produk-produk lokal, tetapi juga memungkinkan pertukaran ide yang kreatif dan kolaborasi lintas-budaya yang menguntungkan. Dengan mempromosikan kreativitas lokal dalam industri kreatif, kerjasama antar negara dapat memperkaya landscape budaya global, menginspirasi inovasi baru, serta memperluas pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman seni dan budaya di seluruh dunia.

c) Kolaborasi dan Inklusi

Dalam konteks kolaborasi dan inklusi dalam kerjasama pariwisata antar negara, penting untuk mempromosikan keterlibatan aktif semua pihak terkait dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kegiatan pariwisata. Hal ini meliputi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-profit untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan dan aspirasi semua stakeholder. Kolaborasi yang kuat dapat menciptakan sinergi yang memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Di industri kreatif antar negara, kolaborasi berarti menggalang hubungan yang saling menguntungkan antara seniman, desainer, produsen, dan distributor dari berbagai negara. Ini melibatkan pertukaran ide dan teknologi, penggabungan kreativitas lokal dengan inovasi global, serta

menciptakan produk-produk yang memadukan nilai-nilai budaya dari berbagai tradisi. Kolaborasi lintas-budaya ini tidak hanya memperluas pasar dan meningkatkan eksposur global bagi para kreator lokal, tetapi juga mempromosikan pemahaman lintas budaya dan memperkaya pengalaman kreatif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kolaborasi dan inklusi dalam kedua konteks ini merupakan landasan penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antar negara dalam bidang pariwisata dan industri kreatif.

d) Pertukaran Pengetahuan: Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknik antar budaya untuk memperluas cakrawala kreatif dan teknologi

Dalam konteks pertukaran pengetahuan dalam kerjasama pariwisata antar negara, penting untuk memfasilitasi aliran informasi dan praktik terbaik antara destinasi pariwisata. Ini melibatkan pertukaran pengalaman dalam pengelolaan destinasi, strategi pemasaran yang efektif, pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, serta pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Dengan saling belajar dari pengalaman positif dan negatif dari berbagai negara, pariwisata dapat berkembang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada wisatawan.

Sementara itu, dalam industri kreatif antar negara, pertukaran pengetahuan mencakup transfer teknik, strategi pemasaran, dan pengetahuan industri antara seniman, desainer, dan profesional kreatif dari berbagai latar belakang budaya. Kolaborasi lintas-budaya ini tidak hanya memperkaya kualitas karya-karya kreatif, tetapi juga memfasilitasi integrasi ide-ide baru dan inovasi dalam produksi seni dan desain. Dengan mempromosikan

pertukaran pengetahuan yang aktif, industri kreatif dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika global, sambil mempertahankan dan menghormati kekayaan budaya yang menjadi basis inspirasi bagi kreativitas global.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Industri Kreatif Antar Negara

Tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif antar negara mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a) Perlindungan Hak Cipta

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama industri kreatif adalah perlindungan hak cipta terkait dengan warisan budaya dan kekayaan intelektual. Destinasi pariwisata sering kali menjadi tujuan untuk promosi budaya lokal, seni tradisional, dan produk kreatif lainnya yang unik. Namun, kehadiran pariwisata internasional juga membawa risiko pelanggaran hak cipta, seperti reproduksi atau penggunaan komersial tanpa izin dari karya seni atau inovasi lokal.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini dimulai dengan penguatan regulasi hak cipta yang efektif di tingkat nasional dan internasional. Negara-negara yang berpartisipasi dalam kerjasama pariwisata perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di sektor pariwisata. Hal ini melibatkan penyusunan undang-undang yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif, serta kolaborasi lintas batas untuk memastikan perlindungan hak cipta yang konsisten di berbagai destinasi pariwisata.

Selain regulasi yang kuat, pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya hak cipta juga merupakan bagian dari solusi. Ini mencakup edukasi kepada pelaku pariwisata, seperti pengusaha, operator tur, dan pemandu wisata, tentang

konsep dan implikasi dari pelanggaran hak cipta. Wisatawan juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak cipta dan mematuhi aturan setempat terkait dengan penggunaan karya seni atau produk budaya.

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi inovatif untuk melindungi hak cipta dapat menjadi langkah maju. Ini termasuk dalam pendorong teknologi yang memungkinkan pelacakan dan pengawasan terhadap penggunaan karya seni dan produk kreatif, serta pengembangan model bisnis yang memastikan para kreator mendapatkan manfaat dari eksploitasi budaya mereka tanpa kehilangan hak-hak intelektual mereka.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis etika bisnis Islam, yang menghargai hak-hak individu dan kekayaan intelektual, kerjasama pariwisata antar negara dapat meningkatkan perlindungan terhadap warisan budaya dan kekayaan intelektual lokal. Ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan budaya, tetapi juga akan memperkuat hubungan antarbangsa dalam konteks pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

b) Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Tantangan yang signifikan dihadapi oleh penerapan etika bisnis Islam dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara adalah terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang yang melindungi inovasi dan kreativitas dari praktik komersial yang tidak sah atau pencurian ide. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga kekayaan intelektual yang merupakan bagian integral dari budaya dan produk kreatif lokal dari eksploitasi yang tidak diinginkan atau penggunaan yang tidak sah di industri pariwisata.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di tingkat nasional dan internasional. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama pariwisata harus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hak cipta dan merek dagang, serta memastikan adanya sistem penegakan hukum yang efektif. Hal ini melibatkan penyusunan undang-undang yang jelas, perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional, dan memperkuat penegakan hukum untuk menanggulangi pelanggaran yang mungkin terjadi di sektor pariwisata.

Selain perlindungan hukum yang kuat, edukasi dan kesadaran tentang pentingnya kekayaan intelektual juga menjadi bagian penting dari solusi. Pelaku industri pariwisata, termasuk pengusaha lokal, pemandu wisata, dan operator pariwisata, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak kekayaan intelektual dan implikasi dari pelanggaran tersebut. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mengedukasi masyarakat dan pelaku pariwisata tentang pentingnya menghormati dan melindungi kekayaan intelektual dalam konteks pariwisata yang global.

Terakhir, kolaborasi lintas batas antara negara-negara dalam hal peningkatan pengelolaan kekayaan intelektual juga menjadi kunci dalam menanggapi tantangan ini secara efektif. Kerjasama dalam hal pertukaran informasi, pengembangan praktik terbaik, dan teknologi pengawasan dapat membantu memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di berbagai destinasi pariwisata. Dengan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kerjasama pariwisata antar negara dapat menjadi lebih berdaya guna dan memastikan bahwa kekayaan intelektual lokal dihormati dan dipertahankan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya akan mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan beretika, tetapi juga akan memastikan bahwa kekayaan intelektual dan budaya lokal dijaga dengan baik dalam era globalisasi dan komersialisasi pariwisata.

c) Harmonisasi antara Kebutuhan Pasar Global dengan Nilai-Nilai Lokal

Penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara menghadapi tantangan dalam menemukan harmonisasi antara kebutuhan pasar global dengan nilai-nilai lokal yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan dan mempromosikan identitas budaya dan nilai-nilai spiritual dalam menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar global yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini dimulai dengan memperkuat pendekatan berbasis lokal dalam pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup promosi destinasi pariwisata berdasarkan keunikan budaya, sejarah, dan tradisi lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, keberagaman, dan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata. Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati dan dilindungi.

Selain itu, edukasi dan kesadaran terhadap nilai-nilai lokal dan etika bisnis Islam juga merupakan solusi penting. Pengusaha pariwisata dan wisatawan harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang keunikan budaya dan spiritualitas lokal, serta pentingnya menghormati dan mendukung ekonomi lokal dalam praktik bisnis mereka.

Program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam dalam bisnis pariwisata dapat membantu mempromosikan praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.

Terakhir, pentingnya membangun kesadaran global tentang pentingnya nilai-nilai lokal dan kebutuhan untuk melindungi warisan budaya juga harus diperhatikan. Kerjasama antar negara dalam promosi pariwisata harus mempertimbangkan tanggung jawab untuk menghormati dan melestarikan kekayaan budaya setempat, bukan hanya untuk kepentingan komersial semata. Ini mencakup promosi pariwisata yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang mengutamakan keberlanjutan budaya dan lingkungan.

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara dapat mempromosikan harmonisasi yang seimbang antara kebutuhan pasar global dengan nilai-nilai lokal yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Ini tidak hanya akan memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga akan membangun fondasi untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal dan global secara bersama-sama.

d) Pluralitas Budaya

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penerapan etika bisnis Islam adalah bagaimana menghormati dan mempromosikan pluralitas budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan spiritual yang mendasari prinsip-prinsip Islam. Destinasi pariwisata sering kali memiliki keragaman budaya yang kaya, dengan berbagai tradisi, bahasa, dan kepercayaan agama yang menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional. Namun, dalam mengelola keragaman ini, terdapat risiko potensial untuk munculnya konflik budaya

atau ketegangan antar kelompok, terutama jika tidak dielola dengan bijaksana.

Salah satu solusi kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mendorong dialog antarbudaya yang saling menghormati. Hal ini mencakup promosi penghargaan terhadap keberagaman budaya, edukasi tentang nilai-nilai universal yang dihormati oleh Islam seperti keadilan, persamaan, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Program pendidikan dan pertukaran budaya antar negara dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kepercayaan dan praktik budaya, sehingga mengurangi risiko konflik dan meningkatkan toleransi antar masyarakat yang berbeda.

Selain itu, pentingnya integrasi keberlanjutan budaya dalam pembangunan pariwisata juga merupakan solusi yang penting. Ini mencakup pengembangan pariwisata yang menghormati dan mendukung keberlanjutan budaya lokal, seperti melindungi situs bersejarah, mendukung seniman dan pengrajin lokal, dan mempromosikan produk lokal yang terkait dengan identitas budaya. Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya mereka.

Terakhir, pengelolaan yang berbasis pada nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan penting dalam membangun kerjasama pariwisata yang berkelanjutan antar negara. Promosi kebijakan yang memperkuat praktik bisnis yang beretika, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun kesejahteraan sosial, akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi destinasi pariwisata. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kerjasama pariwisata antar negara dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, keberagaman budaya, dan keadilan sosial, sekaligus

mempromosikan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam.

e) Toleransi terhadap Perbedaan Pendapat

Tantangan bagi penerapan etika dalam kerjasama pariwisata antar negara juga termasuk dalam mempromosikan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan kepercayaan di antara masyarakat yang beragam budaya dan agama. Destinasi pariwisata sering kali menjadi titik pertemuan berbagai latar belakang budaya dan keyakinan, yang dapat menimbulkan potensi konflik atau ketegangan jika tidak dielola dengan baik.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mendorong dialog antarbudaya yang menghormati keberagaman. Ini melibatkan promosi nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pendekatan inklusif dalam menyikapi keragaman budaya. Program pendidikan dan kegiatan budaya yang mengedepankan saling penghargaan dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka, serta meningkatkan pemahaman antar kelompok dalam masyarakat pariwisata.

Selain itu, pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai etika Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan hormat terhadap perbedaan, juga merupakan solusi yang krusial. Etika bisnis Islam menekankan pada pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan menghargai hak-hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang budaya atau agama mereka. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti memastikan bahwa semua wisatawan dan komunitas lokal diperlakukan dengan hormat dan kesetaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan atau identitas mereka.

Terakhir, kolaborasi antar negara dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung

toleransi dan keberagaman juga sangat penting. Hal ini mencakup penerapan regulasi yang menghormati kebebasan beragama dan berpendapat, serta mendukung inisiatif yang mempromosikan dialog antarbudaya dan pemahaman saling antara masyarakat yang berbeda. Dengan membangun fondasi kerjasama yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam, pariwisata antar negara dapat menjadi wahana untuk memperkuat toleransi, mengurangi konflik budaya, dan membangun hubungan harmonis yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

f) Integrasi Seni dengan Nilai-Nilai Universal

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan seni dan budaya lokal dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam, seperti keadilan, persamaan, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Destinasi pariwisata sering kali merupakan cerminan dari kekayaan seni dan budaya setempat, yang menarik minat wisatawan internasional. Namun, tantangan muncul ketika upaya untuk memasarkan dan mengkomersialisasikan aspek-aspek budaya ini dapat mempengaruhi integritas budaya, nilai-nilai spiritual, dan moral yang dipertahankan dalam prinsip-prinsip Islam.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mempromosikan pendekatan yang menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini melibatkan pendekatan yang hati-hati dalam pengelolaan pariwisata untuk memastikan bahwa eksploitasi komersial tidak mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata perlu bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mempertahankan keaslian budaya, sambil tetap memungkinkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pentingnya edukasi dan kesadaran tentang nilai-nilai etika Islam juga menjadi bagian solusi yang penting. Pelaku pariwisata, termasuk pengusaha lokal, pemandu wisata, dan operator pariwisata, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mempertahankan integritas budaya dan moral dalam menjalankan bisnis pariwisata. Program pelatihan dan pendidikan tentang nilai-nilai Islam dalam konteks pariwisata dapat membantu membangun kesadaran tentang cara yang tepat untuk mempromosikan seni dan budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral yang dijunjung tinggi.

Terakhir, pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap praktik-praktik yang tidak etis dalam pengelolaan pariwisata juga perlu diperhatikan. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan etika bisnis Islam akan membantu memastikan bahwa semua kegiatan pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh masyarakat setempat dan nilai-nilai Islam.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara dapat mempromosikan integrasi seni dan budaya lokal dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Ini akan memungkinkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai masyarakat di seluruh dunia.

B. Etika Bisnis Islam Dalam Kerjasama Pariwisata Antar Negara

a. Pengertian Kerjasama Pariwisata dalam Islam

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan atau kunjungan sementara seseorang ke tempat-tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, atau kegiatan lainnya. Tujuan utama pariwisata adalah untuk mengalami dan mengeksplorasi atraksi budaya, alam, sejarah, atau kegiatan tertentu yang tidak tersedia di tempat asal pengunjung. Aktivitas pariwisata dapat meliputi kunjungan ke tempat wisata alam seperti pantai, gunung, dan taman nasional, serta kunjungan ke situs bersejarah, museum, acara budaya, atau pusat perbelanjaan di destinasi wisata.

Pariwisata meliputi berbagai kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan perjalanan sementara ke destinasi yang berbeda dari tempat tinggal, termasuk akomodasi seperti hotel dan penginapan, transportasi seperti penerbangan dan kereta api, makanan dan minuman, serta berbagai aktivitas rekreasi dan kebudayaan seperti kunjungan ke tempat wisata alam, sejarah, budaya, dan belanja. Selain itu, pariwisata juga mencakup panduan wisata, pameran seni, acara budaya, dan berbagai bentuk hiburan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi para wisatawan yang mencari pengalaman baru dan menarik di destinasi yang mereka kunjungi.

Selain sebagai pengalaman pribadi, pariwisata juga merupakan industri penting dalam perekonomian global, yang mencakup berbagai layanan dan infrastruktur seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, dan berbagai aktivitas pendukung lainnya. Perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang semakin baik telah mengubah wajah industri pariwisata, memungkinkan lebih banyak orang untuk menjelajahi dan mengalami berbagai destinasi di seluruh dunia, serta memberikan dampak positif dalam hal penghasilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan budaya dan lingkungan di destinasi tersebut.

Pariwisata dalam Islam adalah aktivitas yang dipandang sebagai kesempatan untuk memperluas pemahaman dan

penghormatan terhadap ciptaan Allah, melalui penjelajahan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, alam, atau budaya yang penting dalam konteks agama dan moral. Konsep pariwisata dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik perjalanan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, di mana perjalanan tersebut dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, menelusuri jejak-jejak sejarah para nabi, atau menghormati keindahan alam yang diciptakan oleh-Nya. Selain itu, pariwisata dalam Islam juga mendorong untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek perjalanan, termasuk dalam interaksi dengan masyarakat setempat dan pengelolaan lingkungan alam, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam tentang keadilan, kebersihan, dan tanggung jawab sosial.

Lebih jauh lagi, pariwisata dalam Islam juga dipandang sebagai sarana untuk mempromosikan dialog dan saling pemahaman antara berbagai budaya dan agama, melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keindahan. Ini mencakup upaya untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat manusia, memperluas toleransi, dan membangun citra Islam yang positif di mata dunia, dengan menunjukkan nilai-nilai universal seperti keramahan, kedermawanan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Dengan demikian, pariwisata dalam Islam tidak sekadar aktivitas wisata biasa, tetapi juga menjadi bagian dari usaha yang lebih luas dalam membangun kedamaian, keberkahan, dan keadilan di dunia ini.

Kerjasama pariwisata dalam Islam merujuk pada upaya kolaboratif antara negara-negara atau komunitas Muslim untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Pariwisata dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mempromosikan destinasi dan menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada dunia dan membangun pemahaman lintas-budaya yang lebih dalam.

Kerjasama ini didorong oleh tujuan untuk mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerukunan antar umat manusia, serta memperluas manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terlibat.

Pertama-tama, kerjasama pariwisata dalam Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam pengembangan dan promosi destinasi pariwisata. Ini mencakup penghormatan terhadap budaya dan tradisi lokal, serta upaya untuk mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memelihara lingkungan dan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan pariwisata.

Dalam konteks hubungan antar negara, kerjasama pariwisata dalam Islam juga mempromosikan *ukhuwah islamiyah* atau persaudaraan di antara umat Muslim. Kerjasama ini mencakup pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri pariwisata secara global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan krisis kesehatan. Selain itu, kerjasama pariwisata dalam Islam juga melibatkan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama antar negara dan antara sektor publik dan swasta. Ini mencakup inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata yang memadai, meningkatkan konektivitas transportasi, dan mempromosikan paket perjalanan yang mencakup aspek spiritual dan budaya bagi para wisatawan Muslim dan non-Muslim.

Secara keseluruhan, kerjasama pariwisata dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata dan meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga untuk mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, keberlanjutan, dan kesadaran lintas-budaya. Hal ini mencerminkan komitmen

untuk membangun hubungan yang harmonis antar negara dan memperluas manfaat pariwisata bagi umat manusia secara keseluruhan, sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, kerjasama, dan keberkahan hidup bersama.

b. Landasan Hukum Kerjasama Pariwisata Antar Negara dalam Islam

a) Al-Quran

1. Surah Al-Qasas (28):77

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kedudukan) di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*."

Ayat ini mengajarkan untuk memanfaatkan nikmat dunia dengan bijaksana dan untuk tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat setempat dalam konteks pariwisata.

2. Surah Al-Mulk (67): 15

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

Artinya: " *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*."

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta berbagi keindahan alam sebagai anugerah Allah yang bersama dinikmati. Kerjasama pariwisata yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan kebudayaan lokal, serta saling menghargai di antara negara, dapat membawa manfaat baik dalam mempromosikan perdamaian berkelanjutan.

3. Surah Al-Baqarah (2): 164

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan padanya segala jenis makhluk, angin yang bertiup dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan*."

Ayat ini mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman alam serta kebudayaan antar bangsa. Kerjasama pariwisata yang berbasis pada nilai-nilai keindahan alam, pelestarian lingkungan, dan saling menghormati dapat membawa dampak positif dalam mempererat hubungan antarnegara.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Dari Anas bin Malik ra.: Rasulullah bersabda, "Perjalanan itu bagian dari siksaan, Allah SWT menurunkan rahmat-Nya pada mereka yang di antara mereka memudahkan urusan perjalanan dan ada di antara mereka yang mempersulit." Hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan para musafir dengan baik dan memberikan kemudahan dalam perjalanan mereka, yang relevan dengan industri pariwisata dalam memberikan pelayanan yang ramah dan efisien kepada para wisatawan.

2. Hadis Riwayat Bukhari
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang memanfaatkan waktu istirahat, maka dia memanfaatkan waktu yang berkah." Hadis ini mengajarkan pentingnya menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan baik saat berwisata, baik untuk beristirahat maupun untuk mengeksplorasi tempat-tempat baru dengan bijak.

3. Hadis Riwayat Muslim
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya berjalan kaki di bumi Allah itu ibadah, dan memandang ke langit-Nya itu ibadah." Hadis ini menunjukkan bahwa eksplorasi dan menikmati keindahan ciptaan Allah merupakan bentuk ibadah, yang relevan dengan aktivitas wisata untuk menghargai keindahan alam dan keberagaman budaya.

4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amal shalih, karena bencana-bencana seperti potongan-potongan malam yang gelap terbentang di hadapan kalian." Hadis ini mengajarkan pentingnya berlomba dalam kebaikan, yang dapat diaplikasikan dalam konteks pariwisata untuk

mempromosikan kegiatan yang bermanfaat dan positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

5. Hadis Riwayat Muslim
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya sama dalam kebaikan. Hendaklah kalian berusaha untuk mencari yang bermanfaat bagi kalian, mintalah pertolongan Allah, dan janganlah merasa lemah." Hadis ini mengajarkan pentingnya kemandirian dan ketekunan dalam mencari kebaikan, yang dapat diaplikasikan dalam mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan berdaya guna.

6. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah bersabda, "Tidak sah ibadah bagi seseorang yang tidak memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang mungkar." Hadis ini menekankan pentingnya mengedepankan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pariwisata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

c. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Pariwisata Antar Negara

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara lebih berfokus pada beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara mencakup pengelolaan destinasi pariwisata dengan memperhatikan nilai-nilai moral, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya

memperlakukan lingkungan alam dan budaya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata, hal ini mengarah pada perlunya mempertahankan keaslian budaya lokal, melindungi lingkungan alam, serta menghormati nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat. Dengan membangun kerjasama yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, negara-negara dapat mengelola pariwisata mereka secara berkelanjutan, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan manfaat positif bagi masyarakat lokal.

Selain itu, etika bisnis Islam mendorong adanya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari industri pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata yang berorientasi pada keadilan sosial berarti memastikan bahwa pendapatan dan peluang ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal, termasuk pemberdayaan UKM dan komunitas lokal untuk terlibat dalam industri ini. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Terakhir, etika bisnis Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Melalui praktik-praktik yang transparan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengelola pariwisata dengan lebih efisien dan menghindari konflik kepentingan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, kerjasama pariwisata antar negara dapat membangun kepercayaan antara berbagai pihak, termasuk wisatawan, investasi bisnis, dan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara menjanjikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya guna bagi seluruh stakeholders yang terlibat.

b) Pengembangan Infrastruktur Pariwisata yang Berkelanjutan

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara sangat relevan dalam konteks pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan. Etika bisnis Islam mendorong perlakuan yang adil terhadap lingkungan alam dan masyarakat lokal dalam setiap fase pembangunan infrastruktur pariwisata. Hal ini termasuk memperhatikan dampak lingkungan dari konstruksi infrastruktur, seperti pemeliharaan keberlanjutan sumber daya air dan tanah serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, kerjasama antar negara dalam pengembangan infrastruktur pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam yang penting bagi ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Kemudian, etika bisnis Islam juga menekankan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari infrastruktur pariwisata. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan harus memberikan kesempatan ekonomi yang adil kepada masyarakat lokal, termasuk pemberdayaan ekonomi komunitas melalui pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Ini tidak hanya mengurangi disparitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal untuk mendukung dan menjaga infrastruktur pariwisata yang ada.

Etika bisnis Islam mengajarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur pariwisata. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, kerjasama antar negara dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar yang diperlukan untuk keberlanjutan dan kualitas. Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya mengarah pada

pembangunan infrastruktur yang lebih baik secara teknis, tetapi juga infrastruktur yang lebih adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal serta alam sekitarnya.

c) Pelestarian Lingkungan

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tercermin dalam upaya pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang memperhatikan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan, hal ini mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rentan. Dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan, kerjasama antar negara dalam pariwisata dapat menjaga warisan alam yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem global.

Etika bisnis Islam menekankan tanggung jawab sosial perusahaan yang luas dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti mengintegrasikan pendekatan yang memperhatikan masyarakat lokal, melibatkan mereka dalam kegiatan pelestarian, dan memberdayakan mereka untuk menjadi pelindung alam setempat. Dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan pariwisata, kerjasama antar negara dapat menciptakan model yang berkelanjutan secara ekologis dan memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Terakhir, etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan mengungkapkan secara jelas dampak dari aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, serta melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan,

kerjasama antar negara dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dalam upaya pelestarian. Ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk melestarikan lingkungan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama untuk generasi mendatang.

d) Penghormatan terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Lokal

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tercermin juga dalam penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Etika bisnis Islam mendorong untuk menghargai dan mempertahankan keunikan budaya serta nilai-nilai tradisional setiap destinasi pariwisata. Hal ini mencakup perlakuan yang sensitif terhadap situs-situs bersejarah, upacara adat, dan praktik budaya lokal. Dalam konteks ini, kerjasama antar negara dalam pariwisata dapat mempromosikan pertukaran budaya yang positif dan saling menghormati, tanpa mengorbankan integritas budaya setempat.

Selain itu, etika bisnis Islam menekankan perlunya menghindari komersialisasi yang berlebihan terhadap budaya lokal. Ini berarti mengembangkan pariwisata dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa aktivitas pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada mereka tanpa mengubah esensi budaya asli. Dengan mempromosikan pendekatan yang menghormati dan berkelanjutan terhadap budaya lokal, kerjasama pariwisata antar negara dapat memperkaya pengalaman wisatawan sambil melestarikan identitas budaya setempat.

Etika bisnis Islam mendorong untuk membangun dialog dan kemitraan yang kuat antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata. Ini termasuk melibatkan komunitas lokal, pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, dan organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan dan praktik yang menghormati budaya serta nilai-nilai lokal. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak, kerjasama antar negara dapat menciptakan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, berdaya guna, dan memperkaya bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan pengembangan infrastruktur, tetapi juga pada penghargaan yang mendalam terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik pariwisata, negara-negara dapat membangun hubungan yang lebih kuat, saling menghormati, dan berkelanjutan dalam menjaga keberagaman budaya di seluruh dunia.

e) Edukasi dan Kesadaran Wisatawan

Urgensi selanjutnya tercermin dalam upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran wisatawan. Etika bisnis Islam mendorong untuk memberikan informasi yang akurat dan edukasi kepada wisatawan tentang nilai-nilai budaya, tradisi, serta norma-norma sosial yang berlaku di destinasi pariwisata. Hal ini penting untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai atau mengganggu, serta untuk mempromosikan penghargaan terhadap budaya lokal.

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dan sosial bagi wisatawan. Dalam kerjasama pariwisata antar negara, hal ini berarti mengedukasi wisatawan tentang praktik yang berkelanjutan seperti

pengurangan limbah, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan flora dan fauna lokal. Dengan meningkatkan kesadaran ini, wisatawan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal yang mereka kunjungi.

Berikutnya, etika bisnis Islam mendorong untuk mempromosikan turisme yang bertanggung jawab dan beretika. Ini mencakup menghindari bentuk eksploitasi terhadap masyarakat lokal, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik pariwisata, kerjasama antar negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah lingkungan, dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi, tetapi juga pada edukasi dan kesadaran wisatawan tentang nilai-nilai budaya, lingkungan, dan sosial. Dengan meningkatkan pemahaman ini, pariwisata dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan toleransi, dialog antar budaya, serta kesejahteraan bersama di tingkat global.

f) Pembangunan Ekonomi Lokal melalui Industri Pariwisata

Urgensi berikutnya mencakup pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui industri pariwisata. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, dengan memberikan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, kerjasama antar negara dalam pariwisata dapat berperan sebagai motor penggerak untuk pertumbuhan ekonomi mikro dan kecil (UMK), serta membantu mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Selain itu, etika bisnis Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Dalam industri pariwisata, ini berarti memastikan bahwa pendapatan dan peluang bisnis yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata didistribusikan secara merata dan adil kepada masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya mencakup sektor perhotelan dan transportasi, tetapi juga industri lokal lainnya seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan layanan lokal lainnya.

Etika bisnis Islam mendorong untuk menghindari dependensi ekonomi yang berlebihan terhadap pariwisata. Ini berarti mengembangkan diversifikasi ekonomi di destinasi pariwisata, dengan mempromosikan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur dasar. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, kerjasama pariwisata antar negara dapat menjadi alat untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi dalam industri pariwisata.

Dengan demikian, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada inklusi sosial, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, kerjasama antar negara dalam pariwisata dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran secara menyeluruh.

g) Mempromosikan Perdamaian serta Pemahaman Lintas Budaya melalui Pertukaran Budaya dan Pendidikan

Urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara meliputi upaya untuk mempromosikan

perdamaian serta pemahaman lintas budaya melalui pertukaran budaya dan pendidikan. Etika bisnis Islam mendorong untuk membangun jembatan antar budaya dengan menghargai keragaman dan menghormati nilai-nilai budaya setempat dalam setiap destinasi pariwisata. Dalam konteks ini, kerjasama antar negara dalam pariwisata dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman dan mengurangi ketegangan antar bangsa melalui dialog yang lebih mendalam dan terbuka.

Selain itu, etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan kesadaran budaya bagi wisatawan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya di tempat yang mereka kunjungi, wisatawan dapat menghormati dan menghargai budaya lokal dengan lebih baik. Ini tidak hanya membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang kaya, tetapi juga membantu dalam membangun toleransi dan rasa saling menghormati antar berbagai komunitas.

Terakhir, etika bisnis Islam mendorong untuk mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai universal seperti perdamaian, toleransi, dan kesetaraan dalam pengalaman pariwisata. Melalui program-program pendidikan dan kegiatan budaya, kerjasama pariwisata antar negara dapat mempromosikan pesan-pesan positif yang membangun kesadaran akan kebutuhan akan harmoni dan kerjasama lintas budaya. Dengan demikian, pariwisata dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam memperkuat hubungan antar bangsa dan mempromosikan perdamaian global.

Secara keseluruhan, urgensi etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada promosi perdamaian, pemahaman lintas budaya, dan pengembangan hubungan yang harmonis di tingkat global. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam

praktik pariwisata, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk saling menghormati, belajar dari satu sama lain, dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik.

d. Nilai-Nilai Etis dalam Kerjasama Pariwisata Antar Negara

Beberapa nilai etis yang penting dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara meliputi:

a) Pelestarian Budaya:

Pelestarian budaya dalam kerjasama pariwisata antar negara sangat penting karena melibatkan upaya untuk menjaga, memelihara, dan menghormati warisan budaya yang unik dari setiap destinasi. Hal ini mencakup situs-situs bersejarah, tradisi adat, bahasa, seni, musik, dan berbagai aspek kehidupan budaya lainnya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu komunitas. Dalam konteks pariwisata, pelestarian budaya memainkan peran kunci dalam mempertahankan keaslian dan daya tarik destinasi. Upaya pelestarian tidak hanya memungkinkan wisatawan untuk mengalami dan mempelajari kekayaan budaya yang berbeda, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan kesadaran global tentang pentingnya menjaga keragaman budaya.

Di sisi lain, dalam industri kreatif antar negara, pelestarian budaya mencakup penghargaan terhadap tradisi lokal dalam penciptaan karya seni dan desain. Ini melibatkan pengekspresian kreativitas yang menghormati nilai-nilai budaya dan memanfaatkan inspirasi dari warisan budaya untuk inovasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam kedua konteks ini, pelestarian budaya bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan identitas budaya serta mempromosikan pengertian dan penghargaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki dunia.

b) Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara adalah esensial untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem alami yang menjadi daya tarik utama destinasi. Ini melibatkan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati. Langkah-langkah konkret seperti pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan energi terbarukan, dan praktik ramah lingkungan dalam konstruksi infrastruktur pariwisata menjadi kunci dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Di sisi lain, dalam industri kreatif antar negara, keberlanjutan lingkungan juga memainkan peran penting dalam siklus produksi dan distribusi karya seni, desain, dan konten kreatif. Etika bisnis Islam, misalnya, mendorong untuk menghormati dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan produk akhir. Hal ini mencakup praktik penggunaan bahan ramah lingkungan, daur ulang, dan pengurangan jejak karbon sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keseimbangan ekologis global.

Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga strategi yang esensial dalam menjaga daya tarik dan integritas destinasi pariwisata serta mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri kreatif global.

c) Pemberdayaan Komunitas Lokal

Pemberdayaan komunitas lokal dalam konteks pariwisata antar negara adalah suatu pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa manfaat dari industri pariwisata benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini melibatkan pelibatan aktif masyarakat dalam

pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan keterampilan untuk pekerja pariwisata lokal, memberikan kesempatan kerja yang adil, serta mendukung inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal, pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan membangun keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam industri kreatif antar negara, pemberdayaan komunitas lokal juga berarti memberikan platform dan dukungan bagi seniman dan kreator lokal untuk mengekspresikan keunikan budaya mereka melalui karya-karya kreatif. Ini melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai tradisional dan modern dalam seni dan desain lokal, serta mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan antara seniman lokal dengan mitra internasional. Dengan cara ini, industri kreatif tidak hanya mendorong kreativitas dan inovasi, tetapi juga membangun kebanggaan identitas budaya lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghargaan dan pemahaman lintas budaya di tingkat global.

d) Penghargaan terhadap Keberagaman Sosial

Penghargaan terhadap keberagaman sosial dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara mencerminkan pentingnya menghormati dan mengakui perbedaan sosial, budaya, dan agama di antara masyarakat yang berbeda. Ini melibatkan pendekatan inklusif dalam pengelolaan pariwisata yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas etnis, agama, dan gender. Dengan mempromosikan kesadaran tentang keberagaman ini, pariwisata dapat

berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat toleransi, mengurangi prasangka, dan membangun jembatan antar budaya.

Di sisi lain, dalam konteks industri kreatif antar negara, penghargaan terhadap keberagaman sosial menuntut adanya representasi yang seimbang dan adil dari berbagai kelompok masyarakat dalam produksi dan distribusi karya seni, desain, dan media kreatif. Ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda, tetapi juga memastikan bahwa berbagai perspektif dan pengalaman dihargai dan diintegrasikan dalam karya-karya kreatif. Dengan demikian, penghargaan terhadap keberagaman sosial dalam industri kreatif tidak hanya menjadi simbol inklusi, tetapi juga sumber kekuatan untuk menginspirasi inovasi lebih beragam dan representatif global.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama Pariwisata Antar Negara

Tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengelolaan Bencana Alam

Penerapan etika bisnis Islam dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pengelolaan bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau badai tropis dapat secara serius mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat lokal, serta merusak infrastruktur pariwisata dan lingkungan alam. Tantangan utamanya adalah bagaimana destinasi pariwisata dapat mengantisipasi, menangani, dan merespons bencana alam dengan efektif.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini termasuk dalam meningkatkan kesiapan dan responsibilitas dalam menghadapi bencana. Setiap destinasi pariwisata harus

memiliki rencana darurat yang komprehensif, termasuk sistem peringatan dini yang efektif, prosedur evakuasi yang terkoordinasi, dan manajemen krisis yang efisien. Kerjasama antar negara sangat penting dalam hal ini, dengan pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan bencana, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas respon darurat di setiap level.

Selain itu, pengelolaan risiko yang cermat juga merupakan langkah penting. Destinasi pariwisata perlu secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bencana alam yang mungkin terjadi, serta mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Ini termasuk dalam pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan yang dirancang untuk menghadapi gempa atau sistem drainase yang mampu mengatasi banjir. Pendekatan berkelanjutan juga harus diterapkan, mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pengembangan pariwisata.

Terakhir, pentingnya mempromosikan kesadaran akan pengelolaan bencana alam di antara wisatawan juga tidak boleh diabaikan. Program pendidikan dan kesadaran publik tentang langkah-langkah keselamatan dan tanggung jawab saat berkunjung ke destinasi pariwisata dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas dan terpercaya tentang tindakan darurat yang harus diambil dalam situasi bencana, serta mengedukasi tentang pentingnya menghormati aturan setempat dan kepekaan terhadap budaya lokal.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kerjasama pariwisata antar negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan bencana yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melindungi wisatawan dan masyarakat

lokal, tetapi juga mempromosikan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab dan berdaya tahan terhadap tantangan alamiah yang mungkin terjadi.

b) Perlindungan terhadap Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Tantangan berikutnya yang dihadapi penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara adalah terkait dengan perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Destinasi pariwisata sering kali menjadi tempat sensitif yang rentan terhadap dampak lingkungan seperti degradasi habitat, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem akibat dari pembangunan infrastruktur pariwisata dan aktivitas manusia lainnya. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola pertumbuhan pariwisata tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu solusi kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup memprioritaskan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, seperti menggunakan teknologi yang lebih bersih dan efisien, mengelola limbah secara bijaksana, dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan infrastruktur. Misalnya, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan praktik restorasi ekosistem dapat membantu mengurangi jejak lingkungan dari aktivitas pariwisata.

Selain itu, edukasi dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan juga merupakan bagian penting dari solusi. Pendidikan kepada masyarakat lokal, operator pariwisata, dan wisatawan tentang nilai-nilai ekologi dan cara menjaga lingkungan adalah langkah yang dapat membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam

menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Program pendidikan lingkungan yang melibatkan komunitas lokal juga dapat membantu memperkuat partisipasi dan dukungan terhadap praktik pariwisata yang berkelanjutan.

Terakhir, pentingnya pengelolaan yang berbasis pada kemitraan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan juga tidak boleh diabaikan. Kerjasama antar negara dalam hal pengelolaan lintas batas sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dapat memperkuat upaya untuk melindungi lingkungan yang rentan terhadap dampak pariwisata. Inisiatif bersama dalam pelestarian dan restorasi habitat alam juga dapat mengamankan keanekaragaman hayati untuk masa depan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis etika bisnis Islam, di mana keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap alam ditekankan, kerjasama pariwisata antar negara dapat menjadi motor bagi pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini tidak hanya akan melindungi lingkungan alamiah dan keanekaragaman hayati, tetapi juga akan memperkuat reputasi destinasi pariwisata sebagai tempat yang bertanggung jawab dan memikirkan masa depan.

c) Pengaturan Kegiatan Pariwisata yang Tidak Merusak Warisan Budaya

Penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara juga menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pengaturan kegiatan pariwisata untuk menjaga dan tidak merusak warisan budaya lokal. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola pariwisata tanpa mengorbankan keunikan budaya dan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Destinasi pariwisata sering kali menghadapi risiko komersialisasi yang berlebihan

atau penyederhanaan budaya untuk memenuhi ekspektasi wisatawan internasional.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menerapkan pendekatan yang memadukan pembangunan pariwisata dengan pelestarian budaya. Pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menghormati dan mempromosikan budaya lokal menjadi kunci utama. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun kebijakan dan regulasi yang mempertahankan integritas budaya, seperti pembatasan pada pembangunan yang mengganggu situs bersejarah atau mengatur jumlah kunjungan ke tempat-tempat suci.

Selain itu, dialog aktif dengan komunitas lokal dan penghargaan terhadap kearifan lokal juga merupakan bagian dari solusi. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata dapat memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati dan nilai-nilai budaya mereka dipertahankan. Ini mencakup mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta memberdayakan komunitas untuk mendapatkan manfaat dari industri pariwisata tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Terakhir, pendidikan dan kesadaran kepada wisatawan tentang pentingnya menghargai budaya lokal dan etika dalam kunjungan mereka juga merupakan langkah penting. Program pendidikan bagi wisatawan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya yang ada di destinasi yang mereka kunjungi, serta tata cara yang tepat dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal. Ini dapat mengurangi risiko ketegangan budaya dan meningkatkan pengalaman positif wisatawan dalam mengeksplorasi kekayaan budaya yang berbeda di seluruh dunia.

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara dapat

mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, menghormati keanekaragaman budaya, dan memberdayakan masyarakat setempat. Ini tidak hanya akan memastikan perlindungan terhadap warisan budaya yang berharga, tetapi juga akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang inklusif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

d) Keamanan dan Privasi Wisatawan

Keamanan dan privasi wisatawan merupakan dua aspek penting yang menjadi tantangan bagi penerapan etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara. Keamanan wisatawan menjadi priotitas utama untuk memastikan bahwa pengalaman wisata berlangsung aman dan terhindar dari potensi ancaman seperti kejahatan, terorisme, atau bencana alam. Hal ini memerlukan koordinasi yang efektif antara negara-negara tujuan wisata, termasuk penguatan keamanan di area pariwisata dan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Solusi untuk mengatasi tantangan keamanan wisatawan termasuk dalam peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional, seperti penerapan teknologi keamanan canggih di bandara dan tempat-tempat publik, serta pelatihan bagi petugas keamanan dalam menghadapi situasi darurat. Kerjasama antar negara dalam hal pertukaran intelijen dan informasi keamanan juga krusial untuk mencegah ancaman lintas batas.

Selain keamanan, privasi wisatawan juga menjadi perhatian penting dalam kerjasama pariwisata. Etika bisnis Islam menekankan perlindungan terhadap privasi individu dan menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam konteks pengumpulan dan penggunaan data pribadi wisatawan. Solusi untuk menjaga privasi wisatawan termasuk dalam penerapan kebijakan privasi yang ketat oleh

operator pariwisata dan penyedia layanan, serta edukasi kepada wisatawan tentang hak-hak mereka terkait dengan privasi data.

Terakhir, transparansi dalam komunikasi dan informasi kepada wisatawan juga merupakan bagian dari solusi untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan mereka. Informasi yang jelas tentang kondisi keamanan di destinasi pariwisata, prosedur keadaan darurat, serta hak dan kewajiban wisatawan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih aman selama perjalanan mereka.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berlandaskan etika bisnis Islam, di mana keamanan, privasi, dan perlindungan hak-hak individu dihormati, kerjasama pariwisata antar negara dapat mempromosikan pengalaman wisata yang lebih positif dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini juga akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

e) Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan

Penerapan etika bisnis Islam dalam konteks kerjasama pariwisata antar negara juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan beretika. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan. Destinasi pariwisata sering kali mengalami tekanan untuk mengembangkan infrastruktur baru seperti hotel, jalan raya, dan fasilitas lainnya yang dapat berdampak negatif pada lingkungan alamiah seperti kehilangan habitat, polusi air, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, dan material bangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dipandu oleh studi dampak lingkungan yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan alamiah serta upaya untuk mengurangi jejak karbon dan limbah.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur pariwisata. Etika bisnis Islam menekankan pada keterlibatan komunitas dan konsultasi yang luas dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka. Ini dapat dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat lokal, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka.

Terakhir, pentingnya pengawasan dan pengawalan dalam penerapan kebijakan lingkungan juga merupakan solusi yang penting. Negara-negara yang bekerja sama dalam kerjasama pariwisata harus mengadopsi regulasi yang ketat terkait dengan lingkungan, dan memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Audit independen dan mekanisme pengawasan transparan dapat membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata mematuhi praktik-praktik yang ramah lingkungan.

Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, etika bisnis Islam dalam kerjasama pariwisata antar negara dapat

mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi keanekaragaman alamiah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di destinasi pariwisata.

C. Rangkuman

Keterkaitan antara nilai-nilai etis dalam kerjasama pariwisata antar negara dan dalam kerjasama industri kreatif antar negara mencerminkan komitmen untuk mempromosikan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan di antara bangsa-bangsa. Dalam konteks pariwisata, nilai-nilai etis seperti keberlanjutan lingkungan, penghargaan terhadap budaya lokal, dan penghargaan terhadap kepentingan komunitas setempat menjadi sangat penting. Negara-negara yang berkolaborasi dalam industri pariwisata berupaya untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata tidak merusak lingkungan alam, melainkan mempromosikan pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya dan alam setempat.

Sementara dalam industri kreatif, nilai-nilai etis seperti penghargaan terhadap kekayaan intelektual, kerja sama yang adil, dan inklusi budaya juga sangat relevan. Kolaborasi antar negara dalam industri kreatif sering kali melibatkan pertukaran ide, inovasi, dan praktik terbaik dalam bidang seperti seni, desain, musik, dan fashion. Pentingnya nilai-nilai etis seperti menghormati hak kekayaan intelektual memastikan bahwa kontribusi budaya dari setiap pihak dihargai dan dilindungi, serta mendorong kreativitas yang berkelanjutan tanpa penyalahgunaan atau eksploitasi.

Kedua bidang kerjasama ini juga menekankan pentingnya etika dalam promosi dan pemasaran. Dalam pariwisata, promosi yang jujur dan etis mengenai destinasi dan pengalaman memastikan bahwa wisatawan mendapatkan informasi yang

akurat dan transparan sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Di sisi industri kreatif, promosi yang etis mendorong penghargaan terhadap karya seni dan produk kreatif yang dihasilkan, serta menjaga integritas dalam merek dan citra merek di pasar global. Selain itu, nilai-nilai etis dalam kedua bidang ini juga menyoroti pentingnya dialog antar budaya dan pemahaman saling menghormati. Dalam kerjasama pariwisata, pertukaran budaya dan pengalaman antar negara menghasilkan saling pengertian yang lebih dalam antara masyarakat yang berbeda. Di sektor industri kreatif, kolaborasi lintas batas menghasilkan produk-produk yang mungkin menggabungkan elemen budaya dari berbagai negara, menciptakan kesempatan untuk memperluas pandangan dan menghargai keberagaman budaya global.

Terakhir, keterkaitan antara nilai-nilai etis dalam kerjasama pariwisata dan industri kreatif antar negara menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan dampak positif terhadap masyarakat setempat. Baik dalam pariwisata maupun industri kreatif, nilai-nilai etis memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor-sektor ini memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi semua pihak terlibat, termasuk masyarakat lokal dan ekosistem budaya mereka. Dengan memprioritaskan nilai-nilai ini, kerjasama antar negara dalam kedua bidang ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan perdamaian, pengertian, dan kemajuan yang berkelanjutan di panggung global.

D. Penilaian Formatif

a. Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan pariwisata?
   a) Perjalanan ibadah
   b) Perjalanan untuk tujuan rekreasi atau bisnis
   c) Perjalanan untuk belajar
   d) Perjalanan untuk misi sosial

2. Manfaat ekonomi dari industri pariwisata meliputi?
    a) Penyimpanan lingkungan
    b) Pembangunan infrastruktur masyarakat
    c) Penurunan biaya hidup
    d) Pengurangan pekerjaan lokal
3. Nilai-nilai etis dalam pariwisata termasuk?
    a) Eksploitasi lingkungan
    b) Penghargaan terhadap budaya lokal
    c) Penyalahgunaan tenaga kerja
    d) Promosi tidak jujur
4. Apa yang dimaksud dengan industri kreatif?
    a) Industri yang hanya melibatkan seni rupa
    b) Industri yang mencakup semua jenis produksi
    c) Industri yang berfokus pada teknologi
    d) Industri yang menggunakan bahan baku alami
5. Prinsip etika dalam industri kreatif Islam mencakup?
    a) Keadilan, kejujuran, dan menghormati nilai-nilai agama
    b) Membentuk stereotip budaya
    c) Meniru karya seni dari budaya lain
    d) Memperbanyak produksi tanpa memperhatikan etika
6. Bagaimana industri kreatif dapat mendukung kehidupan budaya dalam Islam?
    a) Dengan mengabaikan nilai-nilai budaya
    b) Dengan menciptakan produk-produk yang bertentangan dengan nilai agama
    c) Dengan memperkaya kehidupan spiritual dan sosial
    d) Dengan membatasi inovasi dan kreativitas
7. Mengapa penting bagi industri pariwisata untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan?
    a) Agar dapat meningkatkan biaya hidup
    b) Untuk mempromosikan pelestarian dan pelestarian alam

c) Untuk mengeksplorasi sumber daya secara berlebihan
d) Untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar

8. Bagaimana dampak pariwisata yang tidak terkelola dengan baik terhadap masyarakat lokal?
   a) Meningkatkan kualitas hidup mereka
   b) Menyebabkan peningkatan keragaman budaya
   c) Menimbulkan masalah sosial dan ekonomi
   d) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata

9. Bagaimana Islam memandang industri kreatif sebagai alat untuk memperkaya kehidupan spiritual dan sosial?
   a) Dengan membatasi kreativitas
   b) Dengan menciptakan produk tanpa nilai tambah
   c) Dengan mengeksploitasi budaya lain
   d) Dengan menciptakan karya-karya yang mendidik dan menginspirasi
10. Mengapa penting bagi industri kreatif dalam Islam untuk menghindari konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama?
   a) Untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan
   b) Untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab
   c) Untuk menjaga integritas dalam representasi budaya
   d) Untuk mengeksploitasi tenaga kerja

b. Benar/Salah

1. (Benar/Salah) Industri pariwisata mencakup perjalanan untuk tujuan rekreasi, liburan, atau bisnis
2. (Benar/Salah) Industri kreatif hanya mencakup produksi manufaktur.

3. (Benar/Salah) Nilai-nilai etis dalam pariwisata meliputi penghargaan terhadap budaya lokal dan pelestarian lingkungan.
4. (Benar/Salah) Industri kreatif dalam Islam harus menghormati nilai-nilai budaya yang ada di berbagai negara.
5. (Benar/Salah) Promosi yang etis dalam industri pariwisata mencakup menyediakan informasi yang akurat dan jujur kepada wisatawan potensial.
6. (Benar/Salah) Industri kreatif dalam Islam dianjurkan untuk menciptakan karya-karya yang mendidik dan menginspirasi.
7. (Benar/Salah) Pariwisata dapat menjadi alat untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas budaya antar bangsa.
8. (Benar/Salah) Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam industri kreatif.
9. (Benar/Salah) Industri pariwisata tidak memiliki dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal.
10. (Benar/Salah) Industri kreatif mencakup bidang seperti seni rupa, desain, musik, dan fashion.

c. Esai

1. Jelaskan peran nilai-nilai etis dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Berikan contoh konkret untuk mendukung argumen Anda.
2. Bagaimana dampak positif dan negatif pariwisata terhadap masyarakat lokal? Diskusikan dengan mendalam.
3. Apa saja prinsip-prinsip etika dalam industri kreatif dan mengapa penting untuk diikuti? Berikan contoh kasus di mana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan.

4. Bagaimana Islam memandang industri kreatif sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai budaya? Diskusikan perspektif ini dengan mengutip sumber-sumber Islam yang relevan.
5. Apa yang dapat dilakukan industri pariwisata untuk mengatasi tantangan terkait dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan pelestarian lingkungan?
6. Bagaimana nilai-nilai etis dalam pariwisata dan industri kreatif saling terkait? Jelaskan hubungan ini dengan memberikan contoh konkret.
7. Apa tantangan utama yang dihadapi industri kreatif dalam mempromosikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Berikan solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan ini.
8. Jelaskan bagaimana pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat lokal.
9. Diskusikan peran budaya dan warisan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan keaslian budaya lokal di era globalisasi?
10. Bagaimana industri kreatif dapat menjadi alat untuk membangun jembatan antara berbagai komunitas budaya dan agama? Berikan contoh konkret untuk mendukung argumen Anda.

d. Studi Kasus

1. Rancanglah kampanye promosi pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai etis seperti keberlanjutan lingkungan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Jelaskan strategi promosi yang akan Anda terapkan.
2. Buatlah desain paket wisata yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi

masyarakat lokal. Jelaskan itinerary dan aktivitas yang akan disertakan dalam paket wisata ini.

3. Buatlah video pendek yang mengangkat tema tentang keindahan alam dan keberagaman budaya dalam konteks pariwisata. Ceritakan alur cerita, lokasi pengambilan gambar, dan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada penonton.
4. Rancanglah sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu wisatawan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan selama perjalanan mereka. Apa fitur-fitur utama yang akan Anda sertakan dalam aplikasi ini?
5. Buatlah desain pakaian atau aksesori fashion yang menggabungkan elemen tradisional dan modern dari berbagai budaya Islam. Jelaskan inspirasi dan filosofi di balik desain Anda.
6. Idekan sebuah kampanye sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap budaya lokal dalam industri kreatif. Bagaimana Anda akan menjangkau audiens yang lebih luas?
7. Rancanglah sebuah program pelatihan atau workshop untuk pengusaha atau pelaku industri kreatif dalam mengimplementasikan nilai-nilai etis Islam dalam praktik bisnis mereka. Apa topik dan metode yang akan Anda ajarkan?
8. Rancanglah sebuah kampanye *crowdfunding* untuk mendukung pelestarian lingkungan dan budaya di sebuah destinasi pariwisata. Bagaimana Anda akan membangun kasus dan motivasi untuk mendapatkan dukungan dari komunitas global?
9. Rancanglah sebuah inisiatif komunitas untuk melibatkan penduduk lokal dalam promosi dan pelestarian warisan budaya mereka melalui seni dan kreativitas. Apa

langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mendorong partisipasi aktif mereka?

10. Idekan konsep seni instalasi yang menggabungkan elemen alam dan budaya lokal dari destinasi pariwisata tertentu. Bagaimana instalasi ini dapat menarik perhatian wisatawan dan menginspirasi mereka?

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Sofi Mubarok dan Muhammad. "Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan". *Jurnal Dauliyah*. Vol. 3. No. 1 (2018).

Ahmad, Riansyah. "Meningkatkan Kewirausahaan Masyarakat: Pendekatan Kolaboratif untuk Pemberdayaan Ekonomi". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1 (2023).

Ardianto, Fetra. "Efektivitas Peran Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) dalam Menurunkan Ketimpangan Ekonomi di Negara-Negara Islam". *Bhuvana: Journal of Global Studies*. Vol. 1, No. 2 (2023).

Azwina, Rafika et al. "Peran Ekonomi Kreatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Industri Kreatif dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Medan". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah.* Vol. 5, No. 6 (2023).

Bangsawan, Moh. Indra & Resky Gustiandi Candra Imansyah. "Pengembangan Industri Kreatif Melalui Pemberdayaan Etika Bisnis yang Islami". *Prosiding Seminar Nasional*. Vol. 6, No. 1 (November, 2017).

Delanova Mariane Olivia et al, "Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dan Pemerintah Kota Petaling Jaya (Malaysia) dalam Meningkatkan Industri Ekonomi Kreatif

Bandung, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, (2018): 102-105.

Deti, Sri. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syari'ah". *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 5. No 1 (2017).

Fadilla, Mutia et al. "Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Persfektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2. No. 1 (2022).

Ghafur, Abdul. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 4, No. 1 (Januari, 2018).

Gultom, Andi Fransiskus. "Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*. Vol. 10, No. 2 (2020).

Gustini, Dewi Rahmawati et al. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Untuk Membangun Industri Pariwisata Halal di Indonesia". *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Habib, M. A. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif". *Jurnal Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy.* Vol. 1. No. 2 (2021).

Hariyanto, Mabarroh Azizah. "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Green Economys". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2 (2021).

Hartana dan Komang Dian Judita. "Pentingnya Organisasi Internasional dalam Suatu Negara dalam Mewujudkan *Good Governance* dan Hubungan Baik antara Negara di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha* Vol. 10, No. 1 (Februari 2022).

Humaida, Nida et al. "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*". Vol. 18. No. 1 (2020).

Ismail, Lukman et al. “Pandangan terhadap Penyelesaian Konflik Anatar Agama”. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 5. No. 1 (2024).

Januarsi, Ery Tri dan Agus Salim Burhanuddin. “Kerjasama Indonesia-Australia dalam Mewujudkan Visi *International Maritime Organization* (IMO) Dalam Merealisasikan Laut Bersih”, *Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim* Vol. 2, No. 4 (Desember 2023).

K, Mariane Olivia Delanova. “Strategi Pengembangan Industri Kreatif Bandung Oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Mengantisipasi Implementasi Asean Free Trade Area dan Asean Economic Community”. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 4*,* No. 1 (Agustus, 2019).

Klaudia, Sura, et. al. “Menakar Pengaruh Risiko, Return, Pemahaman Investasi terhadap Minat UMKM dalam Memilih Jenis Investasi”, *Jurnal PETA* Vol. 3, No. 1 (Januari 2018).

Kosasih, Elisabeth Djuniasih dan Aceng. “Penerapan Karakter Toleransi Beragama Pada Masyarakat Cigugur Kuningan Yang Pluralis”. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 10. No. 1 (2019).

M, Istana. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam”. *jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics.* Vol. 2. No. 1 (2017).

Marisa, Astari. “Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Austarlia dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019”, *Jurnal Transborder,* Vol. 4, No. 1 (Desember 2020).

Mariska, Refi dan Chuzaimah Batubara. “Implementasi Manajemen Syariah sebagai Pengembangan Keuangan dan Bisnis Berkelanjutan pada Industri Halal”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* Vol. 3 No. 2 (Maret, 2023).

Mubarok, Abdullah. “Investasi Etis (Konsep Dasar Pertimbangan dan Pendekatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah,* Vol. 5, No. 1 (Juni 2022).

Muslim, Moh. "Urgensi Etika Bisnis di Era Global". *Jurnal Manajemen Bisnis.* Vol. 20, No. 2 (2017).

Nurcahyo, M. A. "*Estimating the Impact of* ASEAN China *Free Trade Agreement on Indonesia's Trade Balance*", *Customs Research and Applications Journal,* Vol. 1, No. 1 (Agustus 2019).

Nurhasanah, Hisam Ahyani dan Elah. "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. vol. 3. No 1 (2020).

Nurhayati, Siti. "Peranan Manajemen Keuangan dalam Suatu Perusahaan", *JBMA,* Vol. 4, No. 1 (Maret 2017).

Panggabean, Amestia Prasinata. "Kualitas Interaksi Sosial antara Penjual dan Pembeli di Taman Pintar Book Store Yogyakarta", *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikolog* Vol. 2, No. 2 (2017).

Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2 (2017).

Paryadi, D. "Analisis Dampak dan Strategi Untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi Indonesia EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE CEPA)", *Jurnal Ekonomi Indonesia,* Vol. 9, No. 2 (Juli 2020).

Ridwan, Sulaeman dan Ahmad Hasan. "Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen.* Vol. 1. No. 2 (2023).

Rosalina, Tita et al. "Etika Bisnis Perjalanan Wisata Menurut Pandangan Al-Qur'an". *Nizham.* Vol. 11, No. 1 (Januari-Juni, 2023).

Rozikan dan Muhammad Zakiy. "Pengaruh Religiusitas dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Etos Kerja Islami pada Karyawan Lembaga Filantropi", *Islamadina* Vol. 20, No. 2 (September 2019).

Sa'ban, L.M. Azhar et al. "Promotion Tourism Wawoangi Village". *Jurnal Inovasi Penelitian.* Vol. 3, No. 8 (Januari, 2023).

Safri, Hayanuddin. "Globalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam ", *Jurnal Ecobisma* Vol. 5, No. 1 (Januari 2018).

Sahputri, Ria Anjriani & Hendra Ibrahim. "Peran Diplomasi Ekonomi dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarnegara". *Jurnal Minfo Polgan.* Vol. 12, No. 2 (Desember, 2023).

Sahputri, Ria Anjriani & Hendra Ibrahim. "Peran Diplomasi Ekonomi dalam Kebijakan Untuk Meningkatkan Kerjasama Bisnis Antarnegara". *Jurnal Minfo Polgan.* Vol. 12, No. 2 (Desember, 2023).

Santoso, Budiyono & Muhammad Djakfar. "Nilai Ke-Islaman dan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Halal Pasca Covid 19 di Kota Malang". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 7, No. 1 (April, 2022).

Subagyo Herry. "Pengembangan Etika Bisnis dalam Manajemen Investasi", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan,* Vol. 4, No. 5 (April 2022).

Surya, Aelina dan Ahmad S. Bukhari. "Peluang dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia dengan Negara-Negara Visegrad", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. 9, No. 1 (Juni 2019).

Taufiqqurachman, F dan D. Handoyo. Analisis Dampak IA-CEPA Terhadap Perekonomian Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan,* Vol. 15, No. 1, (November 2021).

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (2020).

Usnan, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir", *J-Al-Mutharahah* Vol. 16, No. 2 (Juli-Desember 2019).

Utomo, Nurul Budi. “Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) terhadap Neraca Perdagangan, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai,* Vol. 7, No. 2 (Desember 2023).

Wulandari, Alvira Rizki dan Dadan Suryadipura. “Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)”, *Padjadjaran Journal of International Relations* Vol. 3 No. 2 (Agustus 2021).

Wulandari, Laili Monita, dan Saifudin Zuhri. “Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2007- 2017”, *Jurnal REP* (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol. 4, No. 2 (2019).

Bahan Ajar 6
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM DISKUSI KONTEMPORER

Bahan Ajar 6
ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM DISKUSI KONTEMPORER

OVERVIEW

A. Deskripsi Singkat Materi Yang Akan Dibahas

Modul Etika Bisnis Islam dalam Diskusi Kontemporer ini mengupas secara mendalam mengenai Eksplorasi Literatur dan Fatwa terkait Etika Bisnis Islam, serta Etika Islam dalam Praktik Bisnis Islam. Modul ini terdiri dari dua topik bagian yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip yang mendasari etika bisnis Islam dalam konteks diskusi kontemporer.

Topik pertama, Eksplorasi Literatur dan Fatwa Terkait Etika Bisnis Islam, akan memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam yang didasarkan pada literatur klasik dan kontemporer. Materi ini akan mengeksplorasi berbagai karya penting dari ulama dan cendekiawan Muslim yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ini. Selain itu, akan dibahas juga fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa terkemuka, yang memberikan panduan tentang praktik bisnis yang sesuai dengan syariah. Melalui eksplorasi ini, peserta akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai Islam diaplikasikan dalam konteks bisnis modern.

Topik kedua, Etika Islam dalam Praktik Bisnis Islam, akan fokus pada penerapan praktis dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam dua sektor bisnis yang berbeda, yaitu sektor pengadaan barang dan sektor penyediaan jasa. Pada sektor pengadaan barang, materi akan mencakup bagaimana prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab diterapkan dalam

proses pengadaan, termasuk pengelolaan risiko, pengawasan, dan akuntabilitas. Studi kasus akan digunakan untuk menggambarkan tantangan dan solusi yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, pada sektor penyediaan jasa, diskusi akan berfokus pada pentingnya kualitas layanan, interaksi yang etis dengan pelanggan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Peserta akan belajar tentang pengembangan kebijakan berbasis etika, pengelolaan konflik kepentingan, dan bagaimana mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis. Dengan mempelajari kedua sektor ini, peserta akan dapat memahami perbedaan dan keterkaitan antara keduanya, serta bagaimana menerapkan etika bisnis Islam secara holistik dalam berbagai konteks bisnis.

B. Relevansi

Modul Etika Bisnis Islam dalam Diskusi Kontemporer ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks bisnis modern yang semakin kompleks dan global. Topik pertama, Eksplorasi Literatur dan Fatwa Terkait Etika Bisnis Islam, penting untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi para profesional dan akademisi. Dengan memahami literatur klasik dan fatwa kontemporer, peserta akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diaplikasikan dalam situasi bisnis yang beragam. Pengetahuan ini sangat penting bagi para pemimpin bisnis, pengambil kebijakan, dan akademisi yang ingin memastikan bahwa operasi bisnis mereka sejalan dengan nilai-nilai syariah, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Topik kedua, Etika Islam dalam Praktik Bisnis Islam, sangat relevan dalam memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam dua sektor bisnis yang berbeda namun saling terkait, yiatu sektor

pengadaan barang dan sektor penyediaan jasa. Pengadaan barang dan penyediaan jasa adalah dua pilar utama dalam ekonomi global, dan penerapan etika Islam dalam kedua sektor ini akan membantu perusahaan dalam mengelola operasi mereka dengan lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam sektor pengadaan barang, penerapan prinsip-prinsip etika dapat membantu menghindari praktik korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Sementara dalam sektor penyediaan jasa, fokus pada kualitas layanan dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, modul ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam dunia bisnis nyata, membantu peserta untuk menjadi pemimpin yang lebih etis dan efektif.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Modul Etika Bisnis Islam dalam Diskusi Kontemporer ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai etika bisnis Islam, dengan fokus pada dua topik utama: Eksplorasi Literatur dan Fatwa Terkait Etika Bisnis Islam dan Etika Islam dalam Praktik Bisnis Islam Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu mencapai beberapa capaian pembelajaran yang signifikan.

Pertama, peserta akan mampu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam yang diambil dari literatur klasik dan fatwa-fatwa kontemporer. Mereka akan dapat menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks bisnis modern, serta mengevaluasi keputusan bisnis berdasarkan panduan syariah. Kemampuan ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi peserta untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang etika bisnis Islam.

Kedua, peserta akan menguasai penerapan praktis dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam bisnis Islam sektor pengadaan barang dan penyediaan jasa. Mereka akan mampu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang, serta memahami bagaimana memastikan kualitas layanan dan tanggung jawab sosial dalam penyediaan jasa. Peserta juga akan dilatih untuk mengelola risiko, mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan menyelesaikan konflik kepentingan dengan bijaksana.

Terakhir, peserta akan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan ini dalam lingkungan bisnis nyata, baik sebagai pemimpin perusahaan, konsultan, maupun akademisi. Mereka akan dilengkapi dengan alat dan metode untuk membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, modul ini akan membantu mencetak profesional yang mampu berkontribusi positif dalam menciptakan dunia bisnis yang lebih adil dan bermartabat.

TOPIK 1
EKSPLORASI LITERATUR DAN FATWA TERKAIT ETIKA BISNIS ISLAM

A. Literatur Klasik Terkait Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Literatur Klasik

Literatur klasik merujuk pada karya-karya tulis yang memiliki nilai estetika, budaya, dan intelektual tinggi serta diakui sebagai warisan penting dari suatu peradaban atau tradisi sastra. Karya-karya ini biasanya meliputi tulisan-tulisan yang telah melewati rentang waktu dan terus relevan serta dihargai oleh berbagai generasi. Karya-karya yang termasuk dalam kategori literatur klasik seringkali dianggap sebagai model sempurna dari kebijaksanaan, seni, dan nilai-nilai moral yang tinggi. Mereka mencerminkan aspirasi, konflik, dan keindahan dari masyarakat yang melahirkannya, serta menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia.

Dalam tradisi Barat, literatur klasik sering kali merujuk pada karya-karya dari Yunani dan Roma kuno, seperti tulisan-tulisan Homeros, Sofokles, Plato, dan Virgil. Karya-karya ini tidak hanya penting dari segi sejarah dan budaya, tetapi juga terus mempengaruhi pemikiran modern dalam berbagai disiplin ilmu. Di dunia Islam, literatur klasik mencakup karya-karya seperti Al-Qur'an, hadis, serta tulisan-tulisan ulama dan cendekiawan besar seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Rumi. Karya-karya ini memberikan landasan bagi pemikiran dan praktik keagamaan, filosofis, dan sosial di dunia Muslim.

Salah satu karakteristik utama dari literatur klasik adalah kemampuan mereka untuk memberikan wawasan dan pelajaran yang universal dan abadi. Meskipun konteks sejarahnya mungkin spesifik, pesan dan nilai-nilai yang diungkapkan tetap relevan bagi manusia di berbagai tempat dan waktu. Literatur

klasik juga dikenal karena kekayaan bahasa dan keindahan narasinya. Penggunaan bahasa yang elegan, simbolisme yang mendalam, dan struktur naratif yang kompleks seringkali menjadi ciri khas karya-karya ini, membuatnya menjadi subjek studi yang tak pernah habis dieksplorasi.

Selain nilai estetikanya, literatur klasik juga berfungsi sebagai cermin dari zaman di mana karya tersebut diciptakan. Mereka memberikan gambaran tentang norma sosial, nilai-nilai, keyakinan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa tersebut. Literatur klasik tidak terbatas pada satu genre atau bentuk. Mereka dapat berupa puisi, drama, prosa, esai, filsafat, dan bahkan teks keagamaan. Keragaman bentuk ini menunjukkan luasnya pengaruh dan penerapan literatur klasik dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, literatur klasik sering dianggap sebagai bagian penting dari kurikulum. Membaca dan mempelajari karya-karya ini dianggap membantu mengembangkan pemikiran kritis, pemahaman budaya, serta apresiasi terhadap keindahan bahasa dan seni. Interpretasi dan analisis literatur klasik juga menjadi bidang studi yang penting. Karya-karya ini seringkali dianalisis melalui berbagai pendekatan teoretis, termasuk kritik sastra, sejarah, psikologi, dan studi budaya, untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan kompleks.

Literatur klasik juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya dan nasional. Mereka sering dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Karya-karya klasik sering diadaptasi dan diinterpretasikan ulang dalam berbagai bentuk media, termasuk film, teater, musik, dan seni visual. Adaptasi ini menunjukkan keluwesan dan daya tarik abadi dari literatur klasik yang terus menemukan relevansinya dalam konteks kontemporer.

Secara keseluruhan, literatur klasik merupakan harta karun intelektual dan budaya yang kaya. Mereka tidak hanya menawarkan hiburan dan keindahan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan, moralitas, dan kemanusiaan. Melalui karya-karya ini, kita dapat menjelajahi sejarah, memahami kompleksitas manusia, dan menemukan inspirasi yang abadi.

b. Kedudukan Literatur Klasik dalam Islam

Berikut adalah kedudukan literatur klasik dalam Islam yang dijelaskan dalam bentuk poin:

a) Sumber Utama Ajaran Islam

Dalam Islam, literatur klasik seperti Al-Qur'an dan hadis memegang kedudukan yang sangat penting sebagai sumber utama ajaran agama. Al-Qur'an, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran fundamental mengenai tauhid, hukum-hukum syariah, moralitas, dan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai literatur klasik, Al-Qur'an tidak hanya dihormati karena isinya yang sakral, tetapi juga karena keindahan bahasa dan gaya penyampaiannya yang tinggi.

Hadis, yang merupakan kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, melengkapi Al-Qur'an dengan memberikan penjelasan rinci tentang cara menerapkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hadis berfungsi sebagai penjelasan praktis dan interpretatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta menjadi sumber hukum kedua dalam syariah Islam. Keduanya, Al-Qur'an dan hadis, merupakan fondasi bagi pemikiran, hukum, dan etika Islam, serta menjadi referensi utama dalam semua bidang keilmuan Islam, termasuk fiqh, teologi, dan etika bisnis.

b) Pembentukan Hukum dan Etika

Dalam Islam, literatur klasik seperti Al-Qur'an dan hadis memegang peran krusial dalam pembentukan hukum dan etika. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama yang mengandung prinsip-prinsip dasar tentang apa yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang). Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan landasan hukum dan moral yang menjadi acuan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an meliputi berbagai aspek, termasuk peribadatan, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), serta hukuman bagi pelanggaran tertentu.

Hadis, sebagai kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, melengkapi Al-Qur'an dengan memberikan panduan yang lebih rinci dan praktis. Hadis-hadis ini membantu menjelaskan dan mengkonkretkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Melalui hadis, umat Muslim dapat memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam berbagai situasi kehidupan nyata, termasuk dalam konteks bisnis dan etika. Dengan demikian, literatur klasik ini menjadi landasan yang kokoh dalam pembentukan sistem hukum dan etika yang komprehensif dalam Islam.

c) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Literatur klasik dalam Islam berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karya-karya dari cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Sina (Avicenna), dan Ibn Khaldun telah menjadi dasar bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, kedokteran, dan sejarah. Tulisan-tulisan mereka tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, tetapi juga mempengaruhi pemikiran ilmiah di

dunia Barat. Misalnya, karya Ibn Sina dalam bidang kedokteran, "Al-Qanun fi al-Tibb" (The Canon of Medicine), menjadi referensi utama di Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai bahan ajar di universitas-universitas Eropa hingga zaman Renaisans.

Selain itu, literatur klasik ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak terpisah dalam pandangan Islam, tetapi saling melengkapi. Cendekiawan Muslim menganggap bahwa mempelajari alam semesta adalah cara untuk memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan didorong dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Literatur klasik Islam juga mencakup berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kimia, dan geografi, yang menunjukkan betapa luasnya kontribusi ilmuwan Muslim dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan global.

d) Pelestarian dan Penyebaran Pengetahuan

Literatur klasik dalam Islam berperan sentral dalam pelestarian dan penyebaran pengetahuan yang luas. Karya-karya seperti Al-Qur'an, hadis, dan tulisan-tulisan ulama besar tidak hanya menyimpan ajaran agama, tetapi juga menyajikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Al-Qur'an, sebagai kitab suci, tidak hanya menjadi panduan spiritual tetapi juga menyediakan dasar bagi ilmu pengetahuan Islam yang meliputi berbagai disiplin seperti astronomi, matematika, dan kedokteran. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengklarifikasi dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik dan etika Islam.

Selain itu, karya-karya ulama besar seperti Ibn Sina dalam bidang kedokteran dan Al-Ghazali dalam filsafat dan tasawuf (mistisisme Islam) telah menempatkan Islam di garis

depan dalam pengembangan dan pelestarian pengetahuan di dunia. Terjemahan karya-karya klasik ini ke dalam berbagai bahasa telah memungkinkan penyebaran ide-ide dan pengetahuan Islam ke seluruh dunia, memperkuat warisan intelektual dan budaya yang luas. Dengan demikian, literatur klasik Islam tidak hanya berperan dalam membentuk identitas dan keyakinan umat Muslim, tetapi juga sebagai jembatan pengetahuan antara peradaban-peradaban di berbagai belahan dunia.

e) Pembentukan Identitas dan Budaya Islam

Literatur klasik dalam Islam berperan penting dalam pembentukan identitas dan budaya Islam. Karya-karya seperti Al-Qur'an, hadis, dan tulisan-tulisan para ulama besar memberikan dasar filosofis dan etis yang membentuk cara pandang umat Muslim terhadap dunia. Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan ajaran yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah, berinteraksi sosial, hingga menjalankan bisnis. Selain itu, karya-karya ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Rumi mengembangkan tradisi intelektual dan spiritual yang kaya, yang kemudian membentuk identitas kolektif umat Muslim di berbagai belahan dunia.

Budaya Islam juga diperkaya melalui sastra, puisi, dan seni yang berkembang dari literatur klasik ini. Misalnya, puisi-puisi Rumi dan karya sastra lainnya menggambarkan keindahan dan kedalaman spiritual Islam, sekaligus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang diajarkan dalam agama. Literatur klasik ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan, tetapi juga menghubungkan umat Muslim dengan warisan budaya dan sejarah mereka. Dengan demikian, literatur klasik Islam memainkan peran integral dalam menjaga dan

mentransmisikan identitas dan budaya Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya.

f) Inspirasi dan Motivasi Spiritual

Literatur klasik Islam memberikan inspirasi dan motivasi spiritual yang mendalam bagi umat Muslim. Karya-karya sufi seperti yang ditulis oleh Rumi, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi, misalnya, menggambarkan perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Allah. Puisi-puisi Rumi, dengan keindahan bahasanya, menyentuh aspek-aspek terdalam dari jiwa manusia dan mendorong pembacanya untuk mencari makna yang lebih dalam dalam hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan. Karya-karya ini tidak hanya memberikan inspirasi spiritual, tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga mengandung banyak pelajaran spiritual yang berharga. Kisah-kisah tentang kehidupan Nabi, kesabarannya, ketabahannya, dan kasih sayangnya menjadi teladan bagi umat Muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan. Literatur klasik ini mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, berbuat baik kepada sesama, dan menjalani kehidupan dengan penuh integritas dan keikhlasan. Dengan demikian, literatur klasik Islam tidak hanya memberikan panduan hukum dan etika, tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual umat Muslim, membantu mereka mencapai kedamaian batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta.

g) Kritik dan Diskusi Intelektual

Literatur klasik dalam Islam mendorong kritik dan diskusi intelektual yang mendalam. Karya-karya seperti Al-Qur'an dan hadis, serta tulisan-tulisan ulama besar, memberikan landasan untuk pemikiran kritis dan analisis

teoritis dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Misalnya, Al-Ghazali dalam karyanya mengenai filsafat dan teologi Islam tidak hanya menawarkan pemahaman mendalam tentang keyakinan agama, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertanyakan dan mempertimbangkan aspek-aspek kunci dari kepercayaan mereka. Hal ini mengarah pada tradisi diskusi yang terbuka dan dinamis di kalangan cendekiawan Muslim, yang terus mengembangkan dan mengeksplorasi berbagai pandangan dalam kerangka keilmuan.

Diskusi intelektual dalam literatur klasik juga berfokus pada pengembangan metodologi penelitian dan argumentasi yang kuat. Ulama seperti Ibn Khaldun, dalam karyanya tentang sejarah dan ilmu sosial, mengeksplorasi pola sejarah dan struktur masyarakat dengan pendekatan empiris yang maju untuk masanya. Ini mencerminkan semangat intelektualitas yang terbuka terhadap perdebatan dan evaluasi berdasarkan bukti, serta mendorong kemajuan ilmiah dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, literatur klasik Islam tidak hanya mempertahankan tradisi keagamaan, tetapi menginspirasi dan memfasilitasi diskusi kritis dan produktif dalam upaya mencapai pemahaman lebih mendalam tentang kehidupan dan alam semesta.

h) Pengayaan Bahasa Arab

Literatur klasik dalam bahasa Arab memainkan peran sentral dalam pengayaan dan pengembangan bahasa tersebut. Karya sastra, puisi, dan prosa dari masa lampau tidak hanya menjadi contoh keindahan bahasa, tetapi juga membentuk standar dalam penggunaan dan penyusunan kata-kata. Penyair besar seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabbi dikenal karena kemampuan mereka dalam merangkai kata yang indah dan puitis, yang tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi pembaca dengan kekayaan maknanya.

Selain itu, literatur klasik Arab juga menjadi sumber referensi utama untuk studi bahasa dan linguistik. Karya-karya filologis dari ulama seperti Ibn Manzur dalam "Lisan al-Arab" atau Ibn Sina dalam "Kitab al-Shifa" memberikan analisis mendalam tentang struktur bahasa Arab dan penggunaannya dalam konteks yang berbeda. Pemahaman yang mendalam terhadap literatur klasik ini bukan hanya penting untuk melestarikan warisan budaya Arab, tetapi juga untuk memahami akar dan evolusi bahasa Arab sebagai salah satu dari bahasa-bahasa besar dunia yang telah memberikan kontribusi besar dalam literatur, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia.

i) Meningkatkan Kualitas Ibadah

Literatur klasik Islam berperan penting dalam meningkatkan kualitas ibadah umat Muslim. Karya-karya seperti Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji, serta nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam menjalankan ibadah tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan instruksi yang spesifik tentang cara beribadah dengan khusyuk dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Hadis, sebagai tambahan dari Al-Qur'an, memberikan contoh konkret dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Hadis-hadis ini tidak hanya menjelaskan tata cara, tetapi juga menginspirasi umat Muslim untuk meningkatkan kecintaan dan dedikasi dalam beribadah, dengan memberikan perhatian pada aspek-aspek spiritual dan moral.

Selain itu, literatur klasik Islam juga menyediakan wawasan tentang pentingnya niat dan keikhlasan dalam melakukan ibadah. Ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal, Ihya Ulumuddin (Revitalisasi Ilmu-ilmu Agama), mengulas tentang bagaimana

memperbaiki batin dan menjaga kesucian niat dalam beribadah. Literatur klasik ini mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas formal, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan spiritualitas individu. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran dari literatur klasik ini, umat Muslim dapat merasakan manfaat yang mendalam dalam meningkatkan kualitas ibadah mereka, serta membawa dampak positif dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka secara keseluruhan.

c. Literatur Klasik yang Membahas Etika Bisnis Islam

Berikut adalah beberapa literatur klasik dalam sejarah pemikiran Islam tentang etika bisnis, seperti teks-teks klasik atau karya-karya ulama besar yang memberikan panduan tentang bagaimana berbisnis dengan prinsip-prinsip Islam:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an, yang berarti "bacaan" atau "pembacaan" dalam bahasa Arab, merupakan kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu ini disampaikan melalui perantaraan Malaikat Jibril selama periode misi kenabian selama 23 tahun. Al-Qur'an terdiri dari 114 surah atau bab, yang masing-masing berisi ayat-ayat yang diturunkan dalam berbagai situasi dan konteks yang berbeda selama hidup Nabi Muhammad. Kitab suci ini ditulis dalam bahasa Arab, yang dipandang oleh umat Islam sebagai puncak keindahan dan kejelasan bahasa, serta sebagai mukjizat linguistik yang tidak dapat ditandingi oleh manusia.

Al-Qur'an dianggap sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Teks Al-Qur'an tidak hanya berisi ajaran-ajaran agama seperti ibadah, akhlak, dan hukum syariah, tetapi juga memberikan panduan moral,

sosial, ekonomi, politik, dan spiritual yang komprehensif. Setiap ayat di dalam Al-Qur'an diyakini sebagai wahyu ilahi yang memberikan petunjuk langsung dari Allah tentang cara hidup yang benar dan keputusan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam, yang diterapkan dalam pengaturan kehidupan individu dan masyarakat umat Muslim.

Keberadaan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang tidak berubah sejak awal penurunannya menjadi salah satu aspek sentral dalam kepercayaan umat Islam. Teksnya dianggap suci dan tidak dapat diragukan keasliannya, sehingga setiap interpretasi atau pemahaman terhadapnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dalam konteks bahasa Arab aslinya. Al-Qur'an juga dipandang sebagai bukti nyata akan keberadaan Allah dan mukjizat Nabi Muhammad, karena keindahan bahasa dan ketepatan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Al-Qur'an memuat berbagai tema yang relevan untuk setiap zaman, termasuk nilai-nilai keadilan, perdamaian, persatuan, dan kasih sayang. Surah-surahnya mengandung petunjuk tentang bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Selain itu, Al-Qur'an juga memuat cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, pelajaran moral dari kejadian-kejadian sejarah, serta tantangan dan solusi yang dihadapi umat manusia dalam pencarian kebahagiaan dan keselamatan.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks suci yang dihormati, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, hukum, dan pedoman bagi umat Islam dalam membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang tinggi. Kitab suci ini terus menjadi pusat kajian, refleksi, dan kehidupan umat Islam di seluruh dunia,

memberikan arah yang jelas dan harmoni bagi individu dan masyarakat yang berpegang teguh pada ajarannya.

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan paling otoritatif dalam Islam yang memberikan pedoman komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk etika bisnis. Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa tema utama yang relevan dalam konteks etika bisnis Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Quarn seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, kejujuran dan amanah, pentingnya berbagi dan keadilan sosial, penghindaran dari kecurangan dan tipu daya, dan sebagainya,

Dengan memahami ayat-ayat etika bisnis Islam dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, praktisi bisnis Muslim diharapkan dapat mengembangkan sikap etis yang kuat dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka. Al-Qur'an bukan hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga memberikan landasan moral dan etis yang kuat bagi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b) Hadis Nabi

Hadis merujuk kepada perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang diketahui atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an, dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan hukum dan praktik keagamaan umat Islam. Kehadiran hadis membantu menguatkan dan menjelaskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta memberikan panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan etika.

Dalam tradisi Islam, kajian terhadap hadis melibatkan metodologi yang cermat dalam menentukan keaslian dan

kredibilitas setiap riwayat. Para ulama hadis telah mengembangkan disiplin ilmu untuk meneliti sanad (rantai perawi) dan matan (teks) hadis, sehingga dapat memastikan validitas dan akurasi informasi yang disampaikan. Proses ini melibatkan kritik terhadap perawi hadis untuk memverifikasi keabsahan setiap riwayat yang dilaporkan dari generasi ke generasi.

Setiap hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum atau petunjuk praktis, tetapi juga sebagai warisan intelektual yang menyediakan wawasan mendalam tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih dan diterima umum memberikan penjelasan tentang nilai moral, kebijaksanaan, serta norma-norma perilaku yang seharusnya diikuti oleh umat Islam. Dengan memahami hadis-hadis ini, umat Muslim dapat mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, menjadikannya pedoman yang relevan dan praktis dalam berbagai situasi kehidupan.

Secara historis, pengumpulan dan penulisan hadis dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk menjaga integritas ajaran Islam dari generasi ke generasi. Hadis-hadis yang dikenal luas sering kali dikompilasi dalam koleksi-koleksi terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Karya-karya ini tidak hanya menjadi rujukan untuk studi hadis, tetapi juga menjadi landasan hukum dan moral bagi umat Islam dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama.

Secara keseluruhan, hadis memberikan panduan komprehensif tentang etika bisnis dalam Islam, meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Ajaran ini menekankan integrasi nilai-nilai etis ke dalam praktik bisnis sehari-hari, menciptakan lingkungan kepercayaan dan integritas yang bermanfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, hadis bukan

hanya merupakan tambahan penting untuk pemahaman Al-Qur'an, tetapi juga memberikan dimensi praktis yang penting dalam memandu kehidupan umat Islam. Melalui studi dan aplikasi hadis, umat Muslim dapat memperdalam pengertian mereka tentang Islam sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari spiritualitas hingga tata cara berinteraksi sosial dan ekonomi.

c) Kitab Klasik oleh Ulama

Berikut adalah lima contoh karya ulama terkenal yang membahas etika bisnis dalam Islam:

1. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali

Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya ulama Islam yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang sejarah. Karya ini terdiri dari empat jilid yang secara komprehensif mengulas berbagai aspek kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran spiritual, termasuk dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Dia menyoroti bahaya mencari keuntungan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moralitas Islam seperti kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Karya ini juga memberikan panduan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berdagang dengan mempertimbangkan etika Islam, menjaga kesucian niat, dan berlaku adil kepada semua pihak terlibat dalam transaksi.

Ihya Ulumuddin tidak hanya menjadi sumber referensi bagi ilmu agama, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran moral yang tinggi. Melalui karyanya ini, Imam Al-Ghazali berusaha untuk mengajak umat Islam agar tidak hanya sukses secara materi, tetapi

juga spiritual dalam berbisnis dan ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan berkah bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, karya ini terus menjadi inspirasi bagi para pemikir dan praktisi Muslim dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan modern.

2. Al-Muwatta Imam Malik

Al-Muwatta adalah salah satu karya ulama terkenal, Imam Malik ibn Anas, yang memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan fiqih. Karya ini merupakan salah satu dari yang pertama dalam genre hadis dan fiqih, yang dikumpulkan oleh Imam Malik dengan tujuan untuk memberikan panduan praktis tentang ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bisnis dan ekonomi. Dalam Al-Muwatta, Imam Malik menghimpun hadis-hadis yang dianggapnya paling sahih dan relevan untuk memandu umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi perdagangan dan prinsip-prinsip etika bisnis.

Al-Muwatta tidak hanya menyajikan hukum-hukum fiqih dalam mazhab Maliki, tetapi juga memuat petunjuk moral yang mendalam tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dalam bisnis. Imam Malik menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain dalam setiap transaksi ekonomi. Karya ini menjadi sumber referensi yang penting bagi umat Islam dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks berdagang dan berbisnis. Dengan demikian, Al-Muwatta tidak hanya menjadi panduan hukum tetapi juga pedoman moral yang berharga bagi umat Muslim untuk menjalankan bisnis

sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

3. Fath al-Bari Ibnu Hajar al-Asqalani

   Fath al-Bari adalah sebuah syarah (komentar) terkenal yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani atas kitab hadis Sahih Bukhari. Karya ini dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam ilmu hadis Islam, yang memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

   Fath al-Bari tidak hanya menguraikan keabsahan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, tetapi juga memberikan konteks, penjelasan, dan analisis yang mendalam terhadap hadis-hadis tersebut. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan panduan tentang prinsip-prinsip etika bisnis yang berdasarkan ajaran Islam, yang tergambar dalam hadis-hadis yang dijelaskan. Karya ini menjadi sumber penting bagi ulama dan umat Muslim dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moral serta hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis dalam Islam.

   Dengan demikian, Fath al-Bari tidak hanya memberikan wawasan hukum fiqih dan hadis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalankan bisnis dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam yang ditegaskan dalam hadis-hadis Sahih Bukhari. Karya ini terus menjadi rujukan utama dalam dunia ilmu hadis dan hukum Islam, memastikan bahwa praktek bisnis umat Islam berada dalam kerangka hukum dan moral yang benar.

4. Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun

   Muqaddimah adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Muslim abad ke-14 yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Karya ini juga

dikenal sebagai "Prolegomena" dalam bahasa Inggris, yang memuat analisis mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks sejarah dan sosial. Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus sejarah dan mempelajari pola-pola perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat.

Dalam konteks bisnis dan ekonomi, Ibnu Khaldun mengulas tentang pentingnya faktor-faktor ekonomi dalam memahami perkembangan masyarakat. Ia membahas tentang peran perdagangan, produksi, dan distribusi dalam kehidupan ekonomi masyarakat, serta pentingnya menjaga etika dalam berbisnis. Ibnu Khaldun menyoroti bahwa faktor-faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi kemakmuran suatu masyarakat, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang harus dipertahankan agar masyarakat tetap harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, Al-Muqaddimah tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan sosial, tetapi juga memberikan pandangan yang kaya akan relevansi nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam yang tergambar dari analisisnya tentang dinamika ekonomi dan sosial.

5. Kitab al-Buyu' oleh Ibnu Qudamah

Kitab al-Buyu' adalah karya terkenal yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Karya ini adalah salah satu referensi utama dalam mazhab Hanbali yang menguraikan hukum-hukum tentang transaksi jual beli dan berbagai aspek perdagangan dalam Islam. Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Buyu' tidak hanya membahas tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan transaksi bisnis, tetapi juga memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya etika bisnis dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam karyanya, Ibnu Qudamah mengulas berbagai situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dalam praktik bisnis, serta memberikan panduan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dalam setiap aspek transaksi. Ia menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan niat yang baik dalam berdagang, serta melarang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam seperti penipuan dan manipulasi. Kitab al-Buyu' menjadi sumber rujukan yang penting bagi umat Muslim dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mulia.

Karya-karya ulama besar ini tidak hanya memberikan panduan hukum dan praktis dalam menjalankan bisnis, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aspek ekonomi. Mereka menjadi sumber inspirasi dan rujukan utama bagi umat Islam dalam mengembangkan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Kutub al-Fiqh

Fikih, dalam konteks Islam, merujuk pada studi dan pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ibadah hingga muamalah (transaksi dan hubungan sosial). Kajian fikih berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat-pendapat ulama yang dianggap sebagai otoritas dalam masing-masing mazhab hukum Islam.

Pentingnya fikih dalam Islam terletak pada upaya untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara tepat dan relevan dalam berbagai konteks

kehidupan. Fikih tidak hanya mengatur ritual keagamaan seperti shalat dan puasa, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan mulai dari pernikahan, perceraian, warisan, hingga bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, fikih menjadi landasan hukum yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama.

Setiap mazhab hukum Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami dan menginterpretasikan hukum-hukum syariah. Misalnya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perbedaan dalam hal metodologi interpretasi, prioritas hukum, dan penekanan pada berbagai aspek. Namun, inti dari fikih adalah untuk mencari pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan adil dan berdasarkan hukum yang benar.

Dalam konteks bisnis, fikih menegaskan pentingnya etika dalam berdagang, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, transparansi dalam transaksi, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, studi fikih tentang bisnis menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam berada dalam kerangka hukum yang sahih dan moral yang terpuji.

Dengan memahami dan menerapkan fikih secara tepat, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam yang tinggi, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara luas. Ini juga mencerminkan komitmen untuk membangun ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip keadilan sosial dan spiritualitas yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Literatur Klasik sebagai Solusi Tantangan Etika Bisnis Islam

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik bisnis modern. Berikut beberapa cara bagaimana literatur klasik tersebut dapat memberikan kontribusi:

a) Pedoman Moral dan Etika

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam menawarkan panduan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan dalam praktik bisnis modern. Karya-karya seperti Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun dan Ihya Ulummudin oleh Al-Ghazali menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sangat relevan dalam konteks bisnis saat ini. Prinsip-prinsip seperti penghindaran riba dan gharar, serta pentingnya zakat dan waqf, memberikan kerangka kerja yang mendukung redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam kehidupan bisnis mengarahkan pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak etis dari keputusan mereka, yang pada gilirannya membantu mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Selain itu, literatur klasik juga menekankan prinsip musyawarah dan shura dalam pengambilan keputusan bisnis, yang meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab kolektif. Dengan menekankan etika kerja yang baik, produktivitas, dan perlindungan hak konsumen, literatur ini membantu menciptakan praktik bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam literatur

klasik ini tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan bisnis secara material, tetapi juga memastikan bahwa bisnis tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

b) Prinsip-Prinsip Bisnis yang Berkelanjutan

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam menyediakan fondasi yang kokoh untuk pengembangan praktik bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan spiritual. Karya-karya seperti Al-Risalah oleh Al-Shafi'i dan Qawa'id al-Ahkam oleh Ibn Abd al-Salam menyoroti pentingnya integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam segala aspek bisnis. Mereka mengajarkan agar pelaku bisnis mempertimbangkan tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga dampak sosial dan moral dari keputusan bisnis mereka. Prinsip-prinsip seperti pengelolaan risiko yang sesuai dengan syariah, perlindungan hak konsumen, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa bisnis tidak hanya beroperasi untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk kesejahteraan umum.

Literatur klasik ini juga menekankan pentingnya etika kerja yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua transaksi bisnis. Dengan mengikuti pedoman ini, pelaku bisnis dapat membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan di antara konsumen, investor, dan masyarakat secara luas. Mereka juga diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan, distribusi keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, literatur klasik etika bisnis Islam memberikan landasan yang solid bagi praktik bisnis

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam konteks global saat ini.

c) Penekanan pada Keadilan Ekonomi

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan ekonomi sebagai salah satu pijakan utama dalam praktik bisnis yang beretika. Keadilan ekonomi dalam konteks ini mencakup distribusi kekayaan yang adil dan pengurangan kesenjangan sosial yang dapat terjadi akibat ketidakadilan ekonomi. Karya-karya seperti Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun mengajarkan bahwa keadilan ekonomi bukan hanya sebagai tujuan moral tetapi juga sebagai prasyarat untuk stabilitas sosial yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti zakat (sumbangan amal wajib) dan waqf (hibah amal) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dikonsolidasikan di tangan sedikit orang tetapi didistribusikan secara adil untuk mendukung kesejahteraan umum.

Selain itu, literatur klasik mengajarkan bahwa keadilan ekonomi juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, penghindaran praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan), serta upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel. Pendidikan dalam etika bisnis Islam, seperti yang dipromosikan dalam karya-karya seperti Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali, membantu para pelaku bisnis memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh dicapai dengan merugikan pihak lain atau dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi ini, bisnis dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam mengatasi ketidakadilan ekonomi global dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif.

d) Pendekatan Holistik terhadap Bisnis

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam mengadopsi pendekatan holistik yang memadukan aspek spiritual, moral, dan material dalam praktik bisnis. Karya-karya seperti Ihya Ulummudin oleh Al-Ghazali menekankan bahwa bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan spiritual dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengajarkan pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari setiap keputusan bisnis mereka, menciptakan lingkungan di mana integritas dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari strategi bisnis.

Selain itu, literatur klasik menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat dalam menjalankan bisnis. Ini mencakup penghindaran praktik-praktik yang tidak etis atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba dan gharar. Pendekatan holistik ini tidak hanya membantu menciptakan bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga memberikan arahan spiritual yang mendalam bagi pelaku bisnis untuk memperoleh keberkahan dalam usaha mereka. Dengan demikian, literatur klasik dalam etika bisnis Islam bukan hanya menawarkan pedoman praktis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi pelaku bisnis untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan mengikuti nilai-nilai etika dan moral yang kuat.

e) Peran Sosial dan Kemanusiaan

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam memberikan penekanan yang kuat pada peran sosial dan kemanusiaan dalam praktik bisnis. Karya-karya seperti Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis terhadap masyarakat luas. Mereka mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya tentang mencari

keuntungan pribadi tetapi juga memberikan kontribusi yang positif kepada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip seperti zakat dan waqf, yang mendorong pemberian amal wajib dan hibah untuk kepentingan umum, memberikan landasan untuk distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif dalam masyarakat.

Selain itu, literatur klasik menekankan pentingnya menghormati hak-hak karyawan, konsumen, dan stakeholder lainnya dalam setiap aspek bisnis. Mereka mengajarkan bahwa etika kerja yang baik dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak terlibat merupakan bagian integral dari menjalankan bisnis yang beretika. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pelaku bisnis tidak hanya membangun reputasi yang baik tetapi juga memastikan bahwa bisnis mereka berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

f) Pendidikan dan Pelatihan Etika Bisnis

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip etika dalam konteks bisnis. Karya-karya seperti Al-Risalah oleh Al-Shafi'i dan Ihya Ulummudin oleh Al-Ghazali tidak hanya memberikan pedoman moral tetapi juga mendorong pendidikan yang menyeluruh tentang nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Pendidikan ini tidak hanya meliputi aspek hukum syariah terkait transaksi bisnis, tetapi juga melibatkan pembelajaran tentang integritas, tanggung jawab sosial, dan bagaimana mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan bisnis.

Selain itu, literatur klasik mengajarkan perlunya pelatihan kontinu dalam etika kerja dan manajemen risiko

syariah. Ini membantu memastikan bahwa para pelaku bisnis tidak hanya memahami prinsip-prinsip etika secara teori tetapi juga dapat menerapkannya secara praktis dalam situasi bisnis yang berbeda-beda. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang kuat dalam etika bisnis Islam, para pelaku bisnis diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih beretika dan berkelanjutan.

g) Pengelolaan Risiko dengan Prinsip Syariah

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam menawarkan pendekatan unik dalam pengelolaan risiko, yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Prinsip ini mencakup penghindaran riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan), serta mendorong penggunaan kontrak yang jelas dan transparan untuk mengelola risiko yang melekat dalam bisnis. Karya-karya seperti Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi dan perlunya menghindari spekulasi yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam jangka panjang.

Selain itu, literatur klasik mengajarkan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya tentang menghindari kerugian finansial tetapi juga tentang mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan bisnis. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, keadilan dalam distribusi keuntungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat membangun reputasi yang kuat dan berkelanjutan serta memainkan peran yang positif dalam mempromosikan prinsip-prinsip keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab dalam konteks global yang kompleks saat ini.

h) Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Literatur klasik dalam etika bisnis Islam memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Karya-karya seperti Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun menyoroti pentingnya distribusi yang adil dari hasil ekonomi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti zakat dan waqf, yang mendorong pemberian amal wajib dan hibah untuk kesejahteraan umum, membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, literatur klasik menekankan perlunya memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak hanya mempromosikan inklusi ekonomi tetapi juga menciptakan lingkungan di mana potensi ekonomi setiap individu dapat diberdayakan secara maksimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat berperan dalam membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi semua pihak, sejalan dengan visi etika bisnis Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam literatur klasik etika bisnis Islam, pelaku bisnis dapat membangun fondasi yang kuat untuk praktik bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya bermanfaat bagi

perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih harmonis dan berkeadilan.

B. Fatwa Kontemporer Terkait Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Fatwa Kontemporer

Fatwa kontemporer merupakan sebuah keputusan atau panduan hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau badan fatwa dalam menanggapi isu-isu modern yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa ini berfungsi untuk menjelaskan hukum syariah mengenai berbagai persoalan yang muncul di era modern, yang mungkin tidak dibahas secara spesifik dalam teks-teks klasik. Dengan demikian, fatwa kontemporer memainkan peran penting dalam menjembatani ajaran Islam dengan dinamika kehidupan modern.

Dalam konteks perkembangan zaman, banyak persoalan baru yang muncul dan membutuhkan panduan syariah. Isu-isu seperti teknologi informasi, bioteknologi, globalisasi ekonomi, dan berbagai bentuk interaksi sosial yang modern menuntut adanya penyesuaian hukum Islam. Fatwa kontemporer hadir untuk memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual terhadap persoalan-persoalan ini, sehingga umat Islam dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di tengah perubahan yang cepat.

Proses penerbitan fatwa kontemporer melibatkan penelitian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Para mufti dan ulama biasanya akan mempertimbangkan konteks masalah yang dihadapi, melakukan diskusi mendalam, dan merujuk pada pendapat-pendapat ulama terdahulu sebelum mengeluarkan sebuah fatwa. Dengan demikian, fatwa kontemporer diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan kondisi zaman.

Salah satu karakteristik utama dari fatwa kontemporer adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Fatwa kontemporer tidak bersifat statis, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial yang berubah. Ini memungkinkan fatwa untuk tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, fatwa kontemporer sering kali bersifat kontekstual, mempertimbangkan keadaan khusus dari komunitas atau individu yang memintanya.

Fatwa kontemporer mencakup berbagai bidang kajian, mulai dari ekonomi dan keuangan, sosial dan budaya, teknologi dan informasi, hingga kesehatan dan bioteknologi. Misalnya, dalam bidang ekonomi dan keuangan, fatwa kontemporer dapat membahas masalah seperti perbankan syariah, investasi halal, dan asuransi syariah. Di bidang teknologi dan informasi, fatwa dapat memberikan panduan mengenai penggunaan media sosial, transaksi online, dan keamanan data.

Fatwa kontemporer sangat penting bagi umat Islam karena membantu mereka untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang kompleks. Dengan adanya fatwa kontemporer, umat Islam dapat menjalankan kegiatan mereka dengan keyakinan bahwa tindakan mereka sesuai dengan syariah. Fatwa ini juga membantu menghindarkan umat Islam dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama mereka.

Meskipun memiliki peran yang penting, fatwa kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Salah satunya adalah perbedaan pendapat antara ulama dalam menafsirkan teks-teks suci dan penerapannya dalam konteks modern. Selain itu, ada pula kritik mengenai kurangnya otoritas atau keahlian dari beberapa mufti atau badan fatwa yang mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada penelitian yang mendalam dan otoritas yang terpercaya.

Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap fatwa kontemporer. Dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi, fatwa yang dikeluarkan di satu negara dapat dengan cepat menyebar dan diadopsi oleh umat Islam di negara lain. Hal ini menuntut adanya kehati-hatian dalam penerbitan fatwa, agar tidak menimbulkan kebingungan atau perbedaan interpretasi yang berlebihan di kalangan umat Islam.

Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta al-Misriyyah, dan Islamic Fiqh Academy (IFA) memainkan peran krusial dalam mengeluarkan fatwa kontemporer. Lembaga-lembaga ini biasanya terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai syariah dan isu-isu kontemporer. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini cenderung lebih dapat diandalkan dan diterima oleh umat Islam secara luas.

Fatwa kontemporer juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi umat Islam. Misalnya, fatwa mengenai perbankan syariah telah mendorong berkembangnya industri perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin menghindari riba. Demikian pula, fatwa mengenai etika bisnis membantu memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan beretika, sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa kontemporer mendorong inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi yang sesuai dengan syariah untuk berbagai masalah modern. Misalnya, dalam bidang teknologi, fatwa dapat memberikan panduan mengenai pengembangan aplikasi yang membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, seperti aplikasi pengingat waktu shalat atau aplikasi yang menyediakan informasi mengenai produk halal.

Fatwa kontemporer sering kali berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang melengkapi sistem hukum yang ada. Meskipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, fatwa dapat mempengaruhi kebijakan publik dan peraturan yang diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dalam beberapa kasus, fatwa dapat dijadikan rujukan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara yang melibatkan isu-isu syariah.

Fatwa kontemporer merupakan instrumen penting dalam membantu umat Islam menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran syariah di tengah dinamika zaman modern. Dengan fleksibilitas dan adaptabilitasnya, fatwa kontemporer mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dan memberikan panduan yang relevan dan kontekstual. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, fatwa kontemporer tetap memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan umat Islam.

b. Kedudukan Fatwa Kontemporer

a) Panduan Hukum dan Etika

Fatwa kontemporer berfungsi sebagai panduan hukum dan etika yang membantu umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern. Fatwa ini memberikan penjelasan mengenai penerapan ajaran Islam pada situasi baru yang mungkin tidak dibahas secara spesifik dalam literatur klasik. Dengan merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas), fatwa kontemporer memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, fatwa kontemporer juga berperan sebagai instrumen penyelesaian masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika umat Islam menghadapi dilema atau situasi yang tidak memiliki jawaban langsung dari teks-teks klasik, fatwa kontemporer memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dengan demikian, fatwa ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta memberikan panduan yang relevan dan aplikatif untuk berbagai aspek kehidupan modern.

b) Instrumen Penyelesaian Masalah

Fatwa kontemporer berfungsi sebagai instrumen penyelesaian masalah dengan memberikan panduan hukum dan etika yang relevan untuk situasi modern. Ketika umat Islam menghadapi isu-isu baru seperti teknologi digital, ekonomi global, atau masalah kesehatan, fatwa kontemporer menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini memungkinkan umat Islam untuk menavigasi tantangan-tantangan baru dengan keyakinan bahwa tindakan mereka tetap sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, fatwa kontemporer memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam serta mempertimbangkan konteks zaman, fatwa ini membantu umat Islam menyelesaikan dilema yang tidak dijawab oleh literatur klasik. Ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, memungkinkan penerapan syariah yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

c) Kontekstualisasi Syariah

Fatwa kontemporer memainkan peran penting dalam kontekstualisasi syariah, yakni penerapan prinsip hukum Islam dalam konteks modern yang spesifik dan relevan. Dengan merujuk pada sumber utama hukum Islam, serta mempertimbangkan dinamika zaman, fatwa kontemporer memberikan solusi atas masalah baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini memastikan bahwa umat Islam dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan keyakinan bahwa

tindakan mereka tetap sesuai dengan ajaran agama, meskipun menghadapi situasi yang berbeda dari masa klasik.

Selain itu, fatwa kontemporer membantu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, memungkinkan penerapan syariah yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan memberikan panduan yang relevan dan kontekstual, fatwa memastikan ajaran Islam tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan demikian, fatwa kontemporer tidak hanya membantu umat Islam menavigasi tantangan-tantangan baru, tetapi juga mempertahankan relevansi dan aplikabilitas syariah dalam konteks dunia yang terus berubah.

d) Legitimasi dan Otoritas

Fatwa kontemporer memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat karena dikeluarkan oleh ulama atau lembaga fatwa yang diakui keahlian dan integritasnya dalam hukum Islam. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang, fatwa ini sangat dihormati dan dijadikan pedoman oleh umat Islam. Otoritas lembaga atau mufti yang mengeluarkan fatwa sangat penting karena memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa panduan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diandalkan.

Selain itu, fatwa kontemporer juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan publik dan peraturan pemerintah. Di beberapa negara, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh otoritas hukum atau dalam penyusunan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Dengan demikian, fatwa kontemporer tidak hanya menjadi pedoman bagi individu, tetapi juga mempengaruhi praktik dan regulasi

pada tingkat yang lebih luas, menunjukkan pentingnya legitimasi dan otoritas dalam proses penerbitannya.

e) Membentuk Opini Publik

Fatwa kontemporer memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik di kalangan umat Islam. Sebagai panduan hukum dan etika yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif, fatwa ini sering kali mempengaruhi pandangan dan sikap umat terhadap isu-isu kontemporer. Misalnya, fatwa mengenai vaksinasi atau lingkungan hidup dapat mempengaruhi cara umat Islam memahami dan menanggapi masalah-masalah tersebut. Ketika sebuah fatwa dikeluarkan, umat Islam cenderung mengambilnya sebagai pedoman moral yang penting dalam mengambil keputusan pribadi dan sosial mereka.

Selain itu, fatwa kontemporer juga dapat memengaruhi kebijakan publik dan regulasi pemerintah. Di beberapa negara, fatwa dapat diakui sebagai rujukan moral dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas. Kedudukan fatwa sebagai penentu sikap moral dan etika memberikan legitimasi pada pendekatan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan sosial. Dengan demikian, fatwa kontemporer bukan hanya menjadi instrumen bagi individu dalam mengambil keputusan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk norma dan kebijakan di tingkat yang lebih luas dalam masyarakat.

f) Responsif terhadap Isu-Isu Global

Fatwa kontemporer merupakan interpretasi hukum Islam yang relevan dengan zaman dan mengatasi isu-isu modern yang kompleks. Dikeluarkan oleh ulama-ulama yang terkemuka dan lembaga-lembaga fatwa resmi, fatwa ini memberikan panduan yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks kehidupan saat ini. Hal ini penting karena memungkinkan

umat Islam untuk tetap setia pada nilai-nilai agama sambil beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Fatwa kontemporer bersifat responsif terhadap isu-isu global yang mempengaruhi umat Islam di berbagai belahan dunia. Misalnya, fatwa mengenai vaksinasi dan kesehatan global, perlindungan hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Responsivitas ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang dinamis dapat menanggapi tantangan global dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual.

g) Penjaga Keberlanjutan Syariah

Fatwa kontemporer memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan syariah dalam konteks zaman yang terus berubah. Sebagai hasil dari kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan adaptasi terhadap realitas sosial dan teknologi modern, fatwa ini memastikan bahwa ajaran agama tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dengan cara ini, fatwa kontemporer membantu menjaga integritas syariah, memungkinkan umat Islam untuk tetap setia pada nilai-nilai fundamental agama sambil mengakomodasi perubahan dan tantangan zaman.

Selain itu, fatwa kontemporer juga berperan dalam memberikan panduan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang tetap, seperti maslahah (kemaslahatan umum) dan istihsan (penyelidikan), fatwa ini tidak hanya menanggapi kebutuhan dan perubahan umat Islam saat ini, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks masa depan. Dengan demikian, fatwa kontemporer bukan hanya menjaga keberlanjutan syariah dalam praktik umat Islam, tetapi juga menghadirkan dimensi

dinamis dalam penerapan ajaran agama sesuai dengan tuntutan zaman.

c. Fatwa Kontemporer yang Membahas Etika Bisnis Islam

Dalam konteks fatwa-fatwa terkait etika bisnis Islam, kategorisasi atau pengelompokan fatwa-fatwa dapat membantu dalam memahami berbagai aspek yang diatur oleh hukum Islam dalam konteks bisnis dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kategori yang umumnya dapat ditemui dalam fatwa-fatwa terkait etika bisnis Islam:

a) Fatwa tentang Riba

Untuk memahami pandangan Islam terhadap riba, fatwa-fatwa penting dari lembaga-lembaga ulama di Indonesia memberikan panduan yang jelas. Salah satunya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keuangan Syariah. Fatwa ini menguatkan larangan riba dalam segala bentuk transaksi keuangan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Misalnya, fatwa ini mengatur bahwa pinjaman dengan bunga dan praktik-praktik keuangan yang mengandung unsur riba dianggap tidak sah menurut syariah, mengingat potensi eksploitasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang lebih lemah.

Selain itu, fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memainkan peran penting dalam menetapkan standar syariah terkait riba. Contoh konkretnya adalah fatwa tentang perbankan syariah yang mengatur bahwa bank syariah harus beroperasi tanpa menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan, melainkan melalui mekanisme *profit-sharing* (bagi hasil) atau pembiayaan dengan skema lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan sistem keuangan yang adil dan beretika di Indonesia.

Penerapan fatwa-fatwa ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Misalnya, fatwa-fatwa ini menjadi panduan bagi pengusaha dan investor untuk memilih instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Di samping itu, fatwa-fatwa ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi regulasi pemerintah terkait dengan pengaturan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa tentang riba di Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini tidak hanya menetapkan aturan-aturan praktis, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mempromosikan sistem keuangan yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam di Indonesia.

b) Fatwa tentang Jual Beli

Fatwa tentang jual beli dalam Islam memainkan peran penting dalam mengatur transaksi ekonomi umat Muslim agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang terkait adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2000 tentang Jual Beli. Fatwa ini mengatur berbagai aspek penting dalam transaksi jual beli, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Contoh konkretnya adalah fatwa ini menetapkan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejelasan mengenai objek, harga, dan syarat-syarat lainnya yang saling dipahami oleh kedua belah pihak.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keuangan Syariah juga turut membahas aspek-aspek jual beli

dalam konteks keuangan syariah. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi, baik itu dalam bisnis maupun dalam keuangan perorangan. Fatwa ini juga mengatur larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, seperti penipuan atau manipulasi informasi.

Penerapan fatwa-fatwa ini tidak hanya berdampak pada praktik bisnis sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi yang diterapkan di Indonesia. Fatwa-fatwa ini sering kali menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih dan mengelola investasi, menjalankan usaha, dan bertransaksi dengan pihak lain, sehingga mendorong pembentukan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan demikian, fatwa-fatwa tentang jual beli di Indonesia tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

c) Fatwa tentang Investasi

Fatwa-fatwa tentang investasi dalam konteks etika bisnis Islam merupakan pedoman penting bagi umat Muslim dalam mengelola keuangan dan investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Investasi. Fatwa ini mengatur berbagai aspek investasi yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), spekulasi yang tidak jelas, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol atau perjudian. Fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam memilih instrumen-instrumen keuangan yang halal dan menghindari yang haram.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 juga mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti profit-sharing (bagi hasil) dan mudarabah (kerjasama investasi), yang mendorong untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil antara investor dan pengelola dana. Contoh konkret dari aplikasi fatwa ini adalah dalam industri keuangan syariah di Indonesia, di mana lembaga-lembaga keuangan mengikuti panduan tersebut untuk menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat Muslim.

Penerapan fatwa tentang investasi ini juga mencerminkan komitmen Majelis Ulama Indonesia dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Islam. Fatwa-fatwa ini tidak hanya menetapkan aturan hukum, tetapi juga mendorong inovasi dalam sistem keuangan yang lebih inklusif dan beretika. Di samping itu, fatwa-fatwa ini juga mempengaruhi pembentukan regulasi pemerintah terkait sektor keuangan dan investasi, sehingga memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa tentang investasi di Indonesia tidak hanya memberikan panduan praktis bagi umat Islam, tetapi juga berperan penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya praktik bisnis dan investasi yang beretika dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

d) Fatwa tentang Asuransi

Fatwa tentang asuransi dalam konteks etika bisnis Islam merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa

praktik asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Asuransi. Fatwa ini mengatur bahwa asuransi dalam Islam harus mematuhi beberapa prinsip, termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi (gharar), dan unsur-unsur perjudian (maisir). Contoh konkretnya adalah larangan untuk menggunakan pola asuransi yang memberikan manfaat dalam bentuk bunga atau riba kepada nasabah, karena hal ini dianggap melanggar prinsip keadilan dan transaksi yang adil dalam Islam.

Selain Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2000, terdapat juga fatwa-fatwa lain yang mengatur tentang asuransi dari berbagai lembaga fatwa di Indonesia. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang asuransi yang memperkuat prinsip-prinsip yang serupa dengan fatwa MUI. Fatwa dari DSN ini memastikan bahwa praktik asuransi tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek etika dalam perlindungan finansial, seperti kejelasan mengenai kontrak, kesepakatan yang saling menguntungkan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penerapan fatwa tentang asuransi ini sangat mempengaruhi industri keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perusahaan asuransi takaful, mengikuti panduan ini untuk mengembangkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh nyata dari hal ini adalah pengembangan pola asuransi takaful yang berbasis profit-sharing (bagi hasil) dan tidak melibatkan elemen riba, sehingga memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bagi masyarakat Muslim.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa tentang asuransi di Indonesia tidak hanya memberikan pedoman hukum, tetapi

juga mendorong inovasi dalam industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan beretika. Hal ini juga memperkuat komitmen umat Islam dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini bukan hanya sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam bertransaksi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam konteks asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam.

e) Fatwa tentang Etika Bisnis

Untuk memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga ulama di Indonesia memberikan pedoman yang penting. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Contoh konkretnya adalah fatwa ini menekankan bahwa setiap pengusaha atau pelaku bisnis harus menjalankan kegiatan mereka dengan memperhatikan nilai-nilai moral Islam, menghindari penipuan, manipulasi informasi, atau praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, Fatwa MUI juga mengeluarkan panduan tentang keadilan dalam hubungan kerja dan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti dalam Fatwa Nomor 44 Tahun 2013 tentang Keadilan dalam Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Fatwa ini menetapkan bahwa pengusaha harus memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Islam, dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Contoh implementasi dari fatwa ini adalah pengaturan upah dan kondisi kerja yang

memenuhi standar syariah, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Penerapan fatwa-fatwa ini tidak hanya mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia, tetapi juga berdampak pada regulasi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, fatwa-fatwa tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi landasan bagi pengembangan regulasi yang mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen untuk membangun ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa tentang etika bisnis di Indonesia tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam praktik bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk mindset bisnis yang beretika dan bertanggung jawab di kalangan umat Islam serta masyarakat luas di Indonesia.

Kategorisasi ini membantu para pelaku bisnis Muslim dan komunitas akademis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka secara lebih terstruktur dan kontekstual. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga membantu membangun kesadaran akan pentingnya etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam Islam.

d. Fatwa Kontemporer sebagai Solusi Tantangan Etika Bisnis Islam

Tentang fatwa kontemporer dalam konteks etika bisnis Islam, berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan:

a) Panduan Etika

Fatwa kontemporer dalam etika bisnis Islam memberikan panduan yang kritis dan relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan moral dan etika dalam dunia bisnis modern. Melalui fatwa-fatwa ini, umat Islam diberikan arahan yang jelas mengenai prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Contohnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Investasi mengatur bahwa investasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi yang tidak jelas, sementara juga mendorong pengembangan investasi yang berbasis profit-sharing untuk memastikan keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan.

Selain itu, fatwa-fatwa ini juga mengarahkan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, serta mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan demikian, fatwa kontemporer tidak hanya sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika dalam praktik bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

b) Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik

Fatwa kontemporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik dalam konteks ekonomi Islam. Melalui fatwa-fatwa ini, lembaga-lembaga ulama memberikan panduan yang tidak hanya berdampak

pada praktik bisnis individual, tetapi juga membentuk landasan hukum dan moral bagi regulasi pemerintah. Contoh nyata dari pengaruh ini adalah dalam pengembangan regulasi tentang industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa mengatur prinsip-prinsip seperti larangan riba dan keharusan membagi risiko secara adil, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal, insentif investasi, dan perlindungan konsumen yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah.

Selain itu, fatwa-fatwa juga mempengaruhi kebijakan dalam bidang sosial dan lingkungan. Misalnya, fatwa-fatwa yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Dengan demikian, fatwa kontemporer tidak hanya memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Islam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk kebijakan publik yang mempromosikan keadilan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

c) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Fatwa kontemporer dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Islam menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana perusahaan harus berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Misalnya, fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan dampak sosial dari kegiatan mereka, seperti memastikan upah yang adil bagi karyawan, menghormati hak-hak buruh, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas lokal. Selain itu, fatwa-fatwa juga mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi mereka, seperti pengelolaan limbah

yang bertanggung jawab dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu perusahaan membangun citra yang baik di mata masyarakat dan pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mematuhi fatwa-fatwa tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum dan regulasi, tetapi juga menjalankan bisnis mereka dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika Islam, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat.

d) Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Fatwa kontemporer dalam konteks inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam Islam mencerminkan upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Ini melibatkan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif, seperti obligasi syariah dan pembiayaan mikro syariah, yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Contoh nyata dari hal ini adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang mendukung kewirausahaan dan akses keuangan bagi segmen masyarakat yang lebih luas, yang pada gilirannya membantu menggerakkan ekonomi secara inklusif.

Penerapan fatwa-fatwa ini juga mendorong inovasi dalam sektor industri, teknologi, dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, fatwa-fatwa mendukung pengembangan proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar, seperti infrastruktur yang ramah lingkungan dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai moral dan etika Islam dalam strategi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat

mencapai kemajuan berkelanjutan dalam konteks global yang semakin kompleks ini.

e) Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Fatwa kontemporer memiliki dampak yang penting terhadap pengembangan kebijakan publik dalam konteks ekonomi Islam. Fatwa-fatwa ini tidak hanya mengatur praktik bisnis individual, tetapi juga memberikan landasan moral dan hukum bagi regulasi pemerintah. Contoh nyata dari pengaruh ini adalah dalam pengaturan industri keuangan syariah. Fatwa-fatwa mengatur prinsip-prinsip seperti larangan riba dan keharusan bagi lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip syariah dalam operasional mereka. Pemerintah sering mengadopsi fatwa-fatwa ini sebagai dasar merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah, seperti insentif fiskal, regulasi yang mendukung, dan perlindungan konsumen.

Selain itu, fatwa-fatwa juga mempengaruhi kebijakan dalam bidang sosial dan lingkungan. Contohnya adalah fatwa yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam, termasuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis pada fatwa-fatwa ini dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, fatwa kontemporer tidak hanya menjadi panduan moral dan etika bagi umat Islam, tetapi juga menjadi alat penting dalam membentuk kebijakan publik yang mendukung ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mematuhi nilai-nilai Islam.

f) Pengaturan Terhadap Industri Keuangan Syariah

Fatwa kontemporer yang mengatur industri keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman tentang bagaimana lembaga keuangan syariah harus beroperasi, termasuk dalam hal struktur produk, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan spekulasi. Contoh nyata dari penerapan fatwa-fatwa ini adalah pengembangan produk-produk keuangan syariah seperti mudarabah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan markup), dan ijara (penyewaan), yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, fatwa-fatwa ini juga berdampak pada pengaturan dan regulasi pemerintah terhadap sektor keuangan syariah. Pemerintah dapat menggunakan fatwa-fatwa sebagai dasar mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, seperti insentif fiskal dan infrastruktur kelembagaan yang memfasilitasi perkembangan sektor ini. Dengan demikian, fatwa kontemporer bukan hanya menjadi panduan praktik bisnis keuangan syariah, tetapi juga berperan dalam membangun fondasi ekonomi sesuai dengan nilai Islam di tingkat nasional dan internasional.

Melalui fatwa-fatwa ini, umat Islam dan masyarakat luas dapat memahami pentingnya praktik bisnis yang beretika dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemangku kepentingan juga memperoleh panduan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan adil.

C. Rangkuman

Literatur klasik dan fatwa kontemporer memiliki hubungan yang erat dalam memberikan panduan etis dan hukum syariah bagi umat Muslim dalam berbisnis. Literatur klasik seperti

karya Ibn Khaldun, al-Mawardi, dan Imam al-Ghazali menawarkan landasan filosofis dan hukum syariah yang mendalam terkait aktivitas ekonomi. Mereka menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam transaksi bisnis.

Karya-karya klasik ini mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam seperti adil, berkah, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Mereka juga membahas aspek-aspek moral dan sosial yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan umat Muslim. Literatur klasik juga memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya integritas dan amanah dalam bisnis, nilai-nilai ini tetap relevan dalam konteks kontemporer dan membantu menentukan arah dalam penerapan fatwa-fatwa terkait bisnis Islam.

Fatwa kontemporer merupakan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam literatur klasik. Mereka menafsirkan hukum-hukum Islam dalam konteks ekonomi dan bisnis modern, menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, teknologi digital, dan dinamika pasar global. Fatwa-fatwa kontemporer, yang dikeluarkan oleh badan otoritatif dan cendekiawan Islam, mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam bisnis dan teknologi serta masalah-masalah etis yang muncul seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi global.

Keterkaitan antara literatur klasik dan fatwa kontemporer memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya tetap relevan tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini menjamin bahwa panduan yang diberikan dapat diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Literatur klasik memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk memahami nilai-nilai etika bisnis Islam, sedangkan fatwa kontemporer memberikan aplikasi praktis dari nilai-nilai ini dalam konteks bisnis modern yang kompleks. Dalam konteks pendidikan dan penelitian, keterkaitan antara literatur klasik dan

fatwa kontemporer memungkinkan untuk pengembangan kurikulum yang holistik dalam studi etika bisnis Islam, menggabungkan teori dan aplikasi dari sumber-sumber yang berbeda namun saling melengkapi.

Pentingnya literatur klasik dalam etika bisnis Islam adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam, sementara fatwa kontemporer menjamin bahwa panduan yang diberikan relevan dan sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Secara keseluruhan, keterkaitan antara literatur klasik dan fatwa kontemporer membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Muslim dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

D. Penilaian Formatif

a. Pilihan Ganda

1. Apa yang menjadi fokus utama literatur klasik dalam etika bisnis Islam?
   a) Penggunaan teknologi digital
   b) Keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam transaksi bisnis
   c) Globalisasi pasar
   d) Kesenjangan ekonomi
2. Siapakah penulis dari karya Al-Muqaddimah, yang mengemukakan teori siklus sejarah dan dampak ekonomi perilaku manusia dalam masyarakat?
   a) Imam al-Ghazali
   b) Ibn Khaldun
   c) Al-Mawardi
   d) Ibn Rushd

3. Mengapa literatur klasik seperti karya-karya Ibn Khaldun dan al-Ghazali penting dalam etika bisnis Islam?
    a) Karena mereka menyarankan untuk mengabaikan prinsip etis
    b) Karena mereka memberikan landasan filosofis dan hukum syariah yang mendalam
    c) Karena mereka hanya relevan pada zaman mereka
    d) Karena mereka menolak keadilan dan transparansi
4. Bagaimana literatur klasik mendukung nilai-nilai seperti integritas dan amanah dalam bisnis?
    a) Dengan mengabaikan nilai-nilai tersebut
    b) Dengan memberikan perspektif yang mendalam
    c) Dengan tidak mempertimbangkan konteks kontemporer
    d) Dengan mengabaikan teknologi digital
5. Apa peran fatwa kontemporer dalam menjembatani literatur klasik dengan praktik bisnis modern?
    a) Mengabaikan relevansi literatur klasik
    b) Menginterpretasikan prinsip-prinsip literatur klasik dalam konteks masa kini
    c) Menolak keadilan dalam transaksi bisnis
    d) Tidak memperhitungkan hukum syariah
6. Bagaimana literatur klasik memberikan fondasi teoritis untuk memahami nilai-nilai etika bisnis Islam?
    a) Dengan mengabaikan nilai-nilai etis
    b) Dengan memberikan landasan filosofis dan hukum syariah yang mendalam
    c) Dengan tidak memperhitungkan konteks kontemporer
    d) Dengan tidak mempertimbangkan teknologi digital
7. Apa manfaat dari fatwa kontemporer terkait etika bisnis Islam dalam konteks globalisasi ?
    a) Mengabaikan dampak globalisasi

b) Menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas modern
c) Menolak transparansi dalam bisnis
d) Tidak memperhitungkan literatur klasik

8. Mengapa literatur klasik dan fatwa kontemporer penting dalam pendidikan dan penelitian etika bisnis Islam?
   a) Karena tidak ada hubungan antara keduanya
   b) Karena mereka memberikan perspektif holistik dalam studi etika bisnis Islam
   c) Karena mereka tidak relevan untuk dikaji
   d) Karena mereka hanya fokus pada aspek moral
9. Bagaimana fatwa kontemporer membantu dalam aplikasi praktis nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kehidupan sehari-hari?
   a) Dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai Islam
   b) Dengan mengabaikan literatur klasik
   c) Dengan memberikan panduan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini
   d) Dengan tidak mempertimbangkan transparansi dalam bisnis
10. Mengapa keterkaitan antara literatur klasik dan fatwa kontemporer penting dalam memahami dan mengimplementasikan etika bisnis Islam?
    a) Karena mereka tidak relevan untuk dikaji
    b) Karena mereka saling bertentangan
    c) Karena mereka memberikan kerangka kerja komprehensif
    d) Karena mereka hanya fokus pada aspek moral

b. Benar/Salah

1. (Benar/Salah) Literatur klasik dalam etika bisnis Islam membahas nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam transaksi bisnis.

2. (Benar/Salah) Fatwa kontemporer dalam etika bisnis Islam mengabaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam literatur klasik.
3. (Benar/Salah) Literatur klasik seperti karya Ibn Khaldun dan Imam al-Ghazali memberikan landasan filosofis dan hukum syariah yang mendalam terkait aktivitas ekonomi.
4. (Benar/Salah) Literatur klasik dan fatwa kontemporer saling bertentangan dalam pandangan mereka terhadap etika bisnis Islam.
5. (Benar/Salah) Fatwa kontemporer merupakan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam literatur klasik dalam konteks ekonomi modern.
6. (Benar/Salah) Literatur klasik memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk memahami nilai-nilai etika bisnis Islam.
7. (Benar/Salah) Fatwa kontemporer tidak relevan dalam konteks globalisasi dan teknologi digital.
8. (Benar/Salah) Ihya Ulumuddin karya Imam al-Ghazali mengajarkan nilai-nilai adil dalam bisnis.
9. (Benar/Salah) Fatwa kontemporer memberikan panduan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini dalam praktik bisnis Islam.
10. (Benar/Salah) Keterkaitan antara literatur klasik dan fatwa kontemporer membentuk kerangka kerja komprehensif dalam studi etika bisnis Islam.

c. Esai

a. Jelaskan kontribusi literatur klasik dalam mengembangkan pemahaman tentang integritas dan amanah dalam bisnis Islam.
b. Apa yang dimaksud dengan fatwa kontemporer dalam konteks etika bisnis Islam? Jelaskan aplikasi praktisnya.

c. Bandingkan pandangan Ibn Khaldun dan Imam al-Ghazali tentang keadilan dalam bisnis berdasarkan karya-karya mereka.
d. Jelaskan peran fatwa kontemporer dalam menafsirkan ulang prinsip-prinsip literatur klasik seperti yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin karya Imam al-Ghazali.
e. Mengapa penting untuk mengadaptasi prinsip-prinsip literatur klasik dalam fatwa kontemporer terkait etika bisnis Islam?
f. Bagaimana fatwa kontemporer menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan dinamika ekonomi global?
g. Bagaimana literatur klasik dan fatwa kontemporer saling melengkapi dalam memberikan panduan praktis dan teoritis dalam etika bisnis Islam?
h. Analisis bagaimana fatwa kontemporer mempertimbangkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam konteks globalisasi.
i. Diskusikan bagaimana literatur klasik dan fatwa kontemporer berkontribusi dalam pendidikan dan penelitian tentang etika bisnis Islam di era modern.
j. Jelaskan mengapa keterkaitan antara literatur klasik dan fatwa kontemporer penting dalam memastikan bahwa etika bisnis Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

d. Studi Kasus

1. Bagaimana literatur klasik seperti karya Imam al-Ghazali bisa diadaptasi dalam pengembangan teknologi keuangan syariah yang inovatif?
2. Buatlah gambaran tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam berdasarkan panduan dari literatur klasik.
3. Bagaimana pandangan Ibn Khaldun tentang siklus sejarah bisa memberikan wawasan tentang resesi

ekonomi dan strategi keluar dalam konteks bisnis modern?

4. Jika Anda dapat mengembangkan sebuah kursus tentang etika bisnis Islam yang berbasis pada literatur klasik dan fatwa kontemporer, bagaimana struktur dan kontennya?
5. Jika Anda menjadi konsultan untuk perusahaan multinasional yang ingin memperbaiki reputasi mereka dalam hal keadilan sosial dan lingkungan, bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam?
6. Jelaskan bagaimana sebuah startup yang berbasis teknologi dapat menyesuaikan model bisnis mereka dengan prinsip-prinsip integritas dan amanah seperti yang diajarkan dalam literatur klasik.
7. Diskusikan ide-ide kreatif untuk memasarkan produk atau layanan yang mempromosikan nilai-nilai keadilan ekonomi, berdasarkan panduan dari literatur klasik dan fatwa kontemporer.
8. Jika Anda adalah penulis untuk sebuah majalah bisnis yang ingin membahas tentang pentingnya nilai-nilai keberkahan dalam bisnis, bagaimana Anda akan menyusun artikel tersebut berdasarkan literatur klasik dan fatwa kontemporer?
9. Jika Anda menjadi pengajar yang ingin mengajar tentang etika bisnis Islam kepada generasi muda, bagaimana Anda akan membuat materi yang menarik dan relevan berdasarkan pada sumber-sumber tersebut?
10. Bagaimana Anda akan menjelaskan pentingnya literatur klasik dan fatwa kontemporer kepada seorang pengusaha muda yang ingin memulai bisnis global yang berkelanjutan secara etis dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif?

TOPIK 2

PENERAPAN ETIKA DALAM PRAKTIK BISNIS ISLAM

A. Etika Islam Dalam Praktik Bisnis Sektor Pengadaan Barang

a. Pengertian Bisnis Sektor Pengadaan Barang

Bisnis sektor pengadaan barang adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan proses pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasi suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, seleksi pemasok, negosiasi harga, dan pengelolaan kontrak untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya yang telah ditentukan.

Pengadaan barang memainkan peran krusial dalam keberhasilan operasional suatu organisasi. Efisiensi dalam pengadaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memastikan kelangsungan pasokan yang dibutuhkan. Dalam konteks bisnis, pengadaan yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan profitabilitas.

Proses pengadaan barang melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, pencarian dan evaluasi pemasok, hingga pelaksanaan pembelian dan manajemen kontrak. Setiap langkah memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen dalam organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan diidentifikasi dengan tepat dan pemenuhan dilakukan secara efisien.

Pengadaan barang merupakan bagian integral dari manajemen rantai pasok. Keberhasilan pengadaan barang sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam rantai pasok,

mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Untuk memastikan proses pengadaan yang efektif dan etis, penting untuk memiliki profesional pengadaan yang terlatih dan berpengetahuan. Pelatihan dan pengembangan profesional pengadaan mencakup pemahaman tentang regulasi, teknik negosiasi, manajemen kontrak, dan penggunaan teknologi dalam pengadaan.

Teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pengadaan barang. Sistem *e-procurement* memungkinkan otomatisasi banyak proses, mulai dari penawaran hingga pembayaran, yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Teknologi juga memfasilitasi analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Masa depan pengadaan barang diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan analitik data. Inovasi ini dapat membantu dalam mengoptimalkan proses pengadaan, mengidentifikasi peluang penghematan biaya, dan meningkatkan kualitas serta kepatuhan terhadap etika. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.

Etika memainkan peran penting dalam pengadaan barang. Prinsip-prinsip seperti transparans dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi untuk menghindari praktik korupsi dan suap. Kepatuhan terhadap etika memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam memandang bisnis sektor pengadaan barang sebagai aktivitas yang sah dan mulia jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk pengadaan barang harus dilaksanakan dengan integritas. Prinsip utama yang harus dipegang adalah keadilan dan kejujuran. Segala bentuk kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan dilarang keras. Proses pengadaan barang harus

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil, dan transaksi dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Selain itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengadaan barang. Pengusaha dan pengelola pengadaan diharapkan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Hal ini mencakup memastikan bahwa barang yang diperoleh tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, serta memilih pemasok yang menjalankan praktik bisnis yang etis. Prinsip *istihsan* (preferensi moral) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) juga diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan dalam pengadaan barang membawa manfaat bagi masyarakat luas dan bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis pengadaan barang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih luas sesuai dengan ajaran Islam.

b. Jenis Sektor Pengadaan Barang dalam Islam

Dalam konteks Islam, sektor pengadaan barang dapat mencakup berbagai jenis barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktivitas ekonomi. Beberapa jenis sektor pengadaan barang yang penting dalam Islam meliputi:

1. Pangan

   Pangan adalah salah satu sektor pengadaan barang yang krusial dalam kehidupan manusia dan memiliki signifikansi besar dalam perspektif ekonomi dan sosial. Secara luas, sektor ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi bahan makanan serta minuman yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi manusia. Dalam konteks Islam, pengadaan pangan harus memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan, serta prinsip-prinsip

keadilan sosial. Hal ini termasuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup untuk semua, memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, dan menghindari praktik yang merugikan seperti spekulasi dan monopoli yang tidak adil. Selain itu, penyediaan pangan yang baik juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan hewan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ekologis dalam Islam.

Keberhasilan sektor pengadaan pangan dalam Islam juga terkait erat dengan konsep kemaslahatan umum yang mendorong pencapaian keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dengan memperhatikan aspek ini, Islam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang layak untuk dikonsumsi, menghormati hak-hak konsumen, serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur bagaimana barang diperoleh dan didistribusikan, tetapi juga menciptakan fondasi moral bagi interaksi ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pakaian

Pakaian adalah salah satu sektor pengadaan barang yang esensial dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai kebutuhan primer tetapi juga sebagai ekspresi identitas dan budaya. Dalam konteks Islam, pengadaan pakaian harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Hal ini mencakup pemilihan bahan yang halal dan tata cara berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Islam mendorong penggunaan pakaian yang sopan dan tidak menonjolkan aurat, serta menghindari kemewahan yang berlebihan dan pemborosan. Prinsip keadilan juga berlaku dalam sektor ini, yang mengharuskan distribusi pakaian secara adil sehingga setiap individu dapat memperoleh pakaian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, pengadaan pakaian dalam Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam produksi dan konsumsi. Ini mencakup aspek perlindungan lingkungan dalam proses produksi, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, dan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah tekstil. Konsep kemaslahatan umum juga diterapkan dalam sektor ini untuk memastikan bahwa pengadaan pakaian tidak hanya memberikan manfaat individual tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini, sektor pengadaan pakaian dalam Islam diharapkan untuk berperan dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sektor pengadaan barang yang meliputi segala kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan domestik. Ini termasuk peralatan dapur, peralatan elektronik, furnitur, barang-barang kebersihan, dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan untuk kenyamanan dan fungsionalitas rumah. Dalam konteks Islam, pengadaan barang untuk rumah tangga harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kebersihan, dan kemaslahatan umum. Islam mendorong agar pengeluaran dalam sektor ini sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan bukan berlebihan, serta menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif tidak bermanfaat.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memperlakukan barang-barang rumah tangga dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan upaya untuk mengurangi jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip keadilan juga berlaku

dalam distribusi dan akses terhadap barang-barang rumah tangga, yang menuntut agar setiap individu memiliki akses yang setara terhadap barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, sektor pengadaan barang untuk rumah tangga dalam Islam diharapkan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

4. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sektor pengadaan barang yang mendukung fundamental bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam Islam, infrastruktur harus dibangun dan dipelihara dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum. Ini mencakup bahan bangunan, jaringan transportasi, sistem air minum dan sanitasi, serta fasilitas energi yang mendukung kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Islam menekankan pentingnya infrastruktur yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan akses yang adil dan layanan yang aman bagi semua individu.

Selain itu, Islam mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip kemaslahatan umum diterapkan dalam pengadaan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, sambil mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan kepentingan bersama.

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar infrastruktur tidak hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga

menjadi wujud nyata dari kepedulian terhadap keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap sektor pengadaan barang dalam Islam memiliki panduan khusus untuk memastikan bahwa barang yang diperoleh dan digunakan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam dalam Sektor Pengadaan Barang

a) Al-Quran

1. Surah An-Nisa (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."

Ayat ini menegaskan larangan terhadap transaksi yang tidak adil dan menunjukkan bahwa bisnis harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan berdasarkan kebaikan serta persetujuan.

2. Surah Al-Baqarah (2): 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menunjukkan larangan keras terhadap riba dan menegaskan bahwa bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa riba.

3. Surah Al-Baqarah (2): 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*." Ayat ini menegaskan pentingnya menggunakan harta yang diperoleh secara halal untuk kegiatan yang bermanfaat dan menghindari pemborosan serta pengeluaran pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau haram.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

   Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah memberkahi bisnis seorang muslim yang menjual barang dagangannya dengan mempertimbangkan haknya, ia menerima barang itu dengan baik dan ia memberi harga yang baik." Hadis ini mengajarkan pentingnya menjalankan bisnis

dengan penuh pertimbangan dan keadilan. Seorang Muslim harus memperhatikan kualitas barang dagangan, menerima dengan baik, dan menetapkan harga yang adil untuk menjaga keberkahan dalam bisnisnya.

2. Hadis Riwayat At-Tirmidzi
   Dari Jabir bin Abdullah ra., Rasulullah bersabda: "Jauhilah perkara yang haram dan kamu akan menjadi orang yang paling baik di antara orang-orang yang beribadah." Hadis ini mengingatkan bahwa menjauhi yang haram dalam bisnis adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Bisnis yang suci dari unsur-unsur yang dilarang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan.

3. Hadis Riwayat Al-Bukhari
   Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian bersaingan (menaikkan harga) dalam hal harga." Hadis ini menunjukkan larangan atas praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuatan pasar untuk merugikan orang lain. Muslim diharapkan untuk menjaga keadilan dalam menetapkan harga.

4. Hadis Riwayat Ahmad
   Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Tidak halal hasil seorang muslim melainkan dari bisnisnya yang jujur." Hadis ini menegaskan bahwa kehalalan rezeki seorang Muslim tergantung pada kejujuran dan ketulusan dalam bisnisnya. Bisnis yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar akan mendatangkan berkah dari Allah.

5. Hadis Riwayat At-Tirmidzi

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Orang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama-sama para nabi, para orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat." Hadis ini menegaskan bahwa sifat jujur dan amanah dalam bisnis akan memberikan pahala yang besar di akhirat. Seorang Muslim diharapkan untuk menjaga integritas dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam bisnis.

6. Hadis Riwayat Muslim

   Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Allah menentang penjual yang mengingkat harga dan menentang pembeli yang menurunkan harga." Hadis ini menekankan pentingnya fair play dalam transaksi bisnis. Baik penjual maupun pembeli diharapkan untuk menjaga keadilan dalam menetapkan harga, tanpa mengeksploitasi pihak lain.

d. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Sektor Pengadaan Barang

Etika bisnis Islam memainkan peran penting dalam sektor pengadaan barang karena memberikan kerangka kerja moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pelaku bisnis untuk memastikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika bisnis Islam sangat urgen dalam bisnis pengadaan barang.

a) Kontrol Kualitas Barang

Dalam sektor pengadaan barang, kontrol kualitas memegang peranan sentral dalam memastikan produk yang diterima sesuai dengan standar yang diharapkan. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya memilih pemasok yang tidak hanya menawarkan harga yang kompetitif tetapi juga mematuhi standar kualitas yang tinggi. Hal ini meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis, keandalan produk,

dan ketepatan waktu pengiriman. Kontrol kualitas yang ketat diperlukan untuk mencegah produk cacat atau tidak sesuai yang dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun reputasi. Dengan memastikan produk yang diada menjadi benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dengan konsisten, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis, dan mengurangi risiko pengadaan.

Dalam pengadaan barang, etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk melaksanakan kontrol kualitas yang ketat sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ini bukan hanya tentang memastikan kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kontrol kualitas yang efektif membantu membangun reputasi perusahaan yang kuat, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang.

b) Kedalaman Interaksi dengan Klien

Dalam sektor pengadaan barang, etika bisnis Islam menghadapi kendala dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam semua proses bisnis. Ini mencakup transaksi dengan pemasok, proses tender, dan evaluasi penawaran. Prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir, diperlakukan secara adil tanpa adanya preferensi atau diskriminasi yang tidak adil. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan untuk menghindari praktik korupsi dan nepotisme, serta memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada kualitas dan keadilan, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam pengadaan barang, etika bisnis Islam mengarah pada pembangunan hubungan yang berdasarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara komersial tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat secara luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, memperluas jaringan bisnis yang berkelanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

c) Tanggung Jawab Sosial

Dalam konteks urgensi etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang, tanggung jawab sosial memegang peran sentral dalam memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnis memenuhi standar moral dan nilai-nilai Islam. Tanggung jawab sosial ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan keberlanjutan lingkungan, hingga kontribusi positif terhadap masyarakat secara luas. Di dalam Islam, perusahaan diperintahkan untuk memilih pemasok berdasarkan pada prinsip keadilan dan amanah, yang melibatkan kewajiban untuk memperlakukan semua pihak terlibat dalam transaksi dengan adil tanpa diskriminasi atau keuntungan yang tidak adil.

Selain itu, tanggung jawab sosial juga mencakup menjaga keberlanjutan lingkungan dengan memilih pemasok yang menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga alam sebagai amanah dan keharusan dalam Islam. Dalam prakteknya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ini

mencerminkan komitmen untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

d) Kepatuhan terhadap Hukum

Dalam sektor pengadaan barang, urgensi etika bisnis Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan praktik bisnis dilakukan dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk menghindari praktik riba (bunga) dan spekulasi, yang dilarang dalam Islam karena merugikan dan tidak adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dengan mematuhi hukum-hukum ini, perusahaan tidak hanya menjaga integritas dan reputasi mereka, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga mencakup aspek keamanan dan kualitas produk yang diada. Dalam konteks pengadaan barang, perusahaan perlu memastikan bahwa pemasok yang dipilih memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal kualitas, keandalan, dan keamanan produk. Ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak membahayakan atau merugikan penggunanya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum dalam etika bisnis Islam bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang seimbang dalam setiap aspek operasional perusahaan.

Penerapan etika bisnis Islam dalam bisnis pengadaan barang sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika ini tidak hanya membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengikuti etika bisnis Islam, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Sektor Pengadaan Barang

Tantangan etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang meliputi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara mendalam:

a) Pengelolaan Risiko

Dalam sektor penyediaan jasa, pengelolaan risiko merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dengan seksama sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Risiko-risiko yang terkait, seperti risiko operasional dalam menjalankan layanan, risiko keuangan terkait dengan manajemen dana, dan risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, semuanya memerlukan pendekatan yang transparan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah mengajarkan untuk menghindari spekulasi yang berlebihan dan untuk mengelola dana dengan hati-hati, menjadikan pentingnya pengawasan internal yang ketat dan kepatuhan terhadap aturan yang lebih mendalam.

Pengelolaan risiko dalam konteks etika bisnis Islam juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan komunitas di sekitarnya. Hal ini termasuk memastikan keadilan dalam hubungan kerja, kesejahteraan

karyawan, dan memperhatikan kepentingan sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, sektor penyediaan jasa yang mematuhi prinsip-prinsip ini tidak hanya memitigasi risiko secara efektif, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai moral Islam yang mendorong untuk berbuat baik kepada sesama serta menjaga keadilan dalam segala hal.

b) Kemitraan yang Berkelanjutan

Dalam sektor penyediaan jasa, membangun kemitraan yang berkelanjutan adalah sebuah tantangan utama yang memerlukan komitmen terhadap nilai-nilai etika Islam. Hal ini melibatkan pengembangan hubungan yang didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua interaksi bisnis. Islam mengajarkan untuk menjaga kepercayaan jangka panjang dengan para pihak terkait, termasuk pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal. Tantangan ini tidak hanya mencakup aspek transaksi komersial, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi dan sosial, yang menghormati nilai-nilai moral yang dianut.

Selain itu, mencapai kemitraan yang berkelanjutan juga melibatkan upaya untuk mengelola konflik kepentingan dengan adil dan transparan. Hal ini menuntut keberanian untuk mengambil keputusan yang bermoral dalam menghadapi situasi yang kompleks dan untuk menjaga integritas dalam semua tindakan bisnis. Dengan demikian, sektor penyediaan jasa yang berfokus pada etika bisnis Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berusaha untuk membangun fondasi yang kuat dari kepercayaan dan keadilan dalam semua interaksi bisnisnya.

c) Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam sektor penyediaan jasa, pengawasan dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memonitor semua tahapan penyediaan jasa, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan layanan kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau manipulasi informasi. Dengan implementasi pengawasan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa semua kegiatan bisnisnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

Selain itu, akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam menegakkan integritas dalam sektor penyediaan jasa. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam mengelola dana dan sumber daya perusahaan dengan penuh kejujuran serta melaporkan secara tepat waktu dan akurat mengenai kegiatan bisnisnya. Prinsip-prinsip syariah menuntut agar setiap tindakan bisnis dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, sehingga tidak hanya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pihak terkait, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, fokus pada pengawasan dan akuntabilitas dalam konteks etika bisnis Islam bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya untuk menjaga integritas dan martabat dalam semua aspek operasional perusahaan.

d) Pengembangan Kebijakan yang Berbasis Etika

Dalam sektor penyediaan jasa, pengembangan kebijakan yang berbasis etika Islam merupakan landasan yang penting untuk memastikan semua operasi bisnis dilakukan dengan mematuhi nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.

Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan tidak hanya sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hal ini mencakup penetapan standar etis dalam semua aspek operasional, mulai dari pengelolaan risiko hingga kemitraan dengan pihak terkait, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan kebijakan yang berbasis etika juga mencakup upaya untuk mendidik dan mengedukasi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan mengenai prinsip-prinsip etika Islam. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dalam lingkungan bisnis modern. Dengan demikian, pengembangan kebijakan yang berbasis etika tidak hanya menjadi instrumen untuk mematuhi peraturan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun fondasi yang kuat dari integritas dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor pengadaan barang dapat berfungsi dengan lebih efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Islam. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

B. Etika Islam Dalam Praktik Bisnis Sektor Penyediaan Jasa

a. Pengertian Bisnis Sektor Penyediaan Jasa

Bisnis sektor penyediaan jasa adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada menawarkan layanan yang bermanfaat bagi

konsumen dan bisnis, alih-alih produk fisik. Layanan ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari konsultasi profesional, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, hingga pariwisata dan hiburan. Sektor penyediaan jasa memainkan peran penting dalam perekonomian global. Layanan yang diberikan oleh bisnis di sektor ini membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa juga memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis jasa memiliki beberapa karakteristik unik, seperti intangibilitas, ketergantungan pada interaksi antara penyedia dan konsumen, serta variabilitas dalam kualitas layanan. Karena jasa tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum pembelian, reputasi dan kepercayaan menjadi sangat penting. Proses penyediaan jasa melibatkan serangkaian langkah mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, desain layanan, penyampaian layanan, hingga evaluasi dan umpan balik. Setiap langkah memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan.

Dalam sektor jasa, manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah kunci sukses. Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan menyediakan layanan yang melebihi harapan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Karena layanan sering kali disampaikan oleh manusia, kualitas dan keterampilan sumber daya manusia sangat penting dalam sektor penyediaan jasa. Investasi dalam pelatihan, pengembangan keterampilan, dan kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Inovasi adalah kunci untuk tetap kompetitif di sektor penyediaan jasa. Ini bisa berupa pengembangan layanan baru, peningkatan proses penyampaian, atau adopsi teknologi baru.

Penyedia jasa yang inovatif dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan keunggulan di pasar.

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam sektor penyediaan jasa. Penggunaan sistem teknologi informasi, otomatisasi, dan aplikasi digital dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Teknologi juga memungkinkan inovasi dalam desain dan penyampaian layanan. Masa depan sektor penyediaan jasa diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan demografi. Penyedia jasa yang mampu beradaptasi dengan perubahan serta fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi, akan terus berkembang dan sukses di pasar yang semakin dinamis.

Etika dalam penyediaan jasa adalah aspek penting yang mencakup transparansi dan tanggung jawab terhadap pelanggan. Penyedia jasa harus memastikan bahwa mereka menawarkan layanan yang adil, tidak menipu, dan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Kepatuhan terhadap etika juga membantu membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Etika bisnis Islam mengharuskan penyedia jasa untuk menghormati hak-hak pelanggan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Segala bentuk eksploitasi, ketidakadilan, dan penipuan dilarang keras, serta layanan harus diberikan dengan niat yang baik dan tujuan untuk kemaslahatan bersama.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam sektor penyediaan jasa. Penyedia jasa diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari layanan mereka dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Prinsip *ihsan* (kebaikan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) harus menjadi panduan dalam operasi bisnis. Misalnya, penyedia layanan kesehatan harus memastikan layanan yang adil dan terjangkau bagi semua kalangan, sementara penyedia layanan pendidikan

harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penyediaan jasa, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan material tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan moral sesuai dengan ajaran Islam.

b. Jenis-Jenis Sektor Penyediaan Jasa dalam Islam

Dalam konteks Islam, sektor penyediaan jasa mencakup berbagai bidang layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktivitas ekonomi. Beberapa jenis sektor penyediaan jasa yang penting dalam Islam meliputi:

a) Kesehatan

Jasa kesehatan mencakup layanan medis, klinik, rumah sakit, praktisi kesehatan, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Layanan kesehatan dalam Islam harus memperhatikan prinsip etika medis, kehalalan pengobatan, dan perawatan yang adil bagi semua pasien. Kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam Islam, pengadaan barang dalam sektor kesehatan harus mencerminkan nilai-nilai etika tinggi, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Ini mencakup penyediaan obat-obatan yang halal dan bermanfaat, peralatan medis yang aman dan efektif, serta pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Islam mendorong agar pendekatan terhadap kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan mental untuk mencapai keseimbangan yang menyeluruh dalam kehidupan individu.

Selain itu, Islam menegaskan pentingnya akses yang adil terhadap layanan kesehatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial ekonomi. Praktik kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam juga mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan menjaga

kesehatan sebagai amanah yang perlu dipelihara dengan baik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, sektor kesehatan diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

b) Pendidikan

Sektor pendidikan mencakup lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus, serta penyedia layanan pendidikan informal. Layanan pendidikan dalam Islam harus mendukung peningkatan ilmu pengetahuan, moralitas, dan akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pendidikan memiliki peran penting dalam Islam sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu dan memperkuat fondasi moral serta spiritual mereka. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya mencakup transfer pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama. Pengadaan barang dalam sektor pendidikan mencakup buku teks, alat tulis, perangkat elektronik, dan fasilitas pembelajaran lainnya yang mendukung proses pendidikan yang efektif. Islam mendorong pendidikan yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kesetaraan akses, dan kualitas yang tinggi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam kemajuan sosial dan pembangunan umat manusia. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tidak hanya sebagai proses pembelajaran formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, beradab, dan bermoral tinggi, yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

c) Keuangan dan Perbankan

Jasa keuangan dan perbankan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan. Institusi keuangan Islam menyediakan produk seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-sharing*), investasi amanah, dan pengelolaan dana yang sesuai dengan hukum syariah.

Keuangan dan Perbankan merupakan sektor yang sangat penting dalam konteks ekonomi Islam karena melibatkan pengelolaan dana dan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, keuangan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam aktivitas yang diharamkan seperti perjudian dan alkohol. Pengadaan barang dalam sektor keuangan dan perbankan mencakup produk-produk seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, investasi dalam aset riil yang berdampak positif, dan pengelolaan dana yang bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Islam mendorong agar praktik keuangan dan perbankan dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan umum, yaitu kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Prinsip maslahah dalam Islam menuntut agar keuangan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok kecil, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, sektor keuangan dan perbankan dalam Islam bukan hanya alat untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan inklusi keuangan yang adil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

d) Pariwisata

Jasa pariwisata mencakup perjalanan dan wisata, akomodasi, pemandu wisata, dan layanan terkait lainnya. Industri pariwisata dalam Islam harus mematuhi prinsip-prinsip moralitas, kebersihan, serta menghormati adat dan nilai-nilai budaya setempat. Pariwisata adalah sektor ekonomi yang penting dalam Islam karena memberikan peluang untuk mempromosikan persaudaraan antarbangsa, pertukaran budaya, dan peningkatan pemahaman lintas agama.

Dalam konteks Islam, pengadaan barang dan layanan dalam industri pariwisata harus mematuhi prinsip-prinsip moralitas tinggi, kesopanan, dan keadilan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam interaksi antarmanusia serta menjaga lingkungan alam sekitar yang merupakan amanah dari Tuhan. Selain itu, Islam mendorong pariwisata sebagai sarana untuk mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial.

Prinsip kemaslahatan umum diterapkan dalam pengadaan pariwisata untuk memastikan bahwa industri ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat dan tidak merugikan lingkungan hidup. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, sektor pariwisata diharapkan dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi antarbangsa serta memperkuat hubungan antara komunitas-komunitas berbeda dalam kerangka keadilan dan keberlanjutan.

e) Hukum dan Konsultasi

Layanan hukum dan konsultasi meliputi advokasi, konseling hukum, arbitrase, dan penasehatan syariah. Praktik hukum dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan penegakan hukum yang adil menurut hukum

syariah. Hukum dan konsultasi adalah sektor penting dalam Islam yang melibatkan penerapan hukum syariah dan memberikan konsultasi terkait berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun kelompok.

Dalam Islam, hukum (fiqh) tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal, tetapi juga sebagai panduan moral yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan spiritual umat. Pengadaan barang dalam sektor ini mencakup buku-buku hukum, alat-alat konsultasi hukum, serta pelayanan advokasi yang dilakukan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan keahlian dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya konsultasi hukum untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat.

Selain itu, Islam juga menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan keadilan yang merata bagi semua individu. Prinsip kemaslahatan umum diterapkan dalam hukum dan konsultasi untuk memastikan bahwa interpretasi hukum menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sektor hukum dan konsultasi dalam Islam bukan hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang membangun sistem yang memberdayakan individu, melindungi hak-hak mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan spiritual dalam masyarakat.

f) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jasa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengembangan perangkat lunak, layanan jaringan, e-commerce, serta konsultasi dan integrasi sistem. Penerapan teknologi dalam Islam harus memperhatikan prinsip privasi,

keamanan data, dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sektor yang vital dalam Islam karena memberikan alat untuk memfasilitasi komunikasi, pendidikan, dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks Islam, pengadaan barang dan layanan dalam TIK harus mematuhi prinsip-prinsip moralitas tinggi, transparansi, dan keadilan. Islam mendorong penggunaan TIK untuk kepentingan yang positif dan menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Pengadaan dalam sektor ini mencakup perangkat keras (*hardware*) seperti komputer dan perangkat mobile, perangkat lunak (*software*) termasuk aplikasi dan sistem informasi, serta layanan jaringan yang memfasilitasi konektivitas global.

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, mempromosikan nilai-nilai moral, serta memperluas akses terhadap informasi dan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip kemaslahatan umum)diterapkan dalam pengadaan TIK untuk memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan privasi. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, sektor TIK diharapkan dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terhubung, dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Setiap sektor penyediaan jasa dalam Islam memiliki panduan khusus untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah, mematuhi prinsip-prinsip moralitas, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

c. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam dalam Sektor Penyediaan Jasa

a) Al-Quran

1. Surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan cara yang salah padanya, sedang kamu mengetahui*." Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Menghindari penipuan, suap-menyuap, atau praktik yang tidak jujur adalah bagian dari etika bisnis yang diajarkan dalam Islam.

2. Surah Al-Ma'idah (5): 8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang benar dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*." Ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan transaksi. Keadilan adalah fondasi utama dalam Islam, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.

3. Surah Al-Hujurat (49): 11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum lelaki mengolok-olokkan kaum lelaki lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan); dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan panggil memanggil dengan gelaran yang menghinakan. Seburuk-buruk panggilan (pada hari kiamat ialah memanggil) dengan gelaran fasiq setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*." Ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati martabat dan kehormatan orang lain, termasuk dalam konteks bisnis. Menghargai dan tidak mengolok-olok orang lain adalah bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam.

b) Hadits

1. Hadis Riwayat Ahmad

   Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia melakukan pekerjaan maka ia melakukannya dengan penuh kesempurnaan." Hadis ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, seorang Muslim diharapkan untuk memberikan yang terbaik dan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kualitas dan ketelitian dalam setiap transaksi adalah bagian dari ketaatan kepada Allah.

2. Hadis Riwayat Muslim

Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu saling mendahului (dalam membeli) atas transaksi saudaramu dan janganlah kamu meminta agar mereka membatalkannya, dan hendaklah seorang dari kamu memohonkan Allah keberkahan atas saudaranya. Dan hendaklah tidak ada seorangpun dari kamu menjual barang yang sudah dijual saudaranya." Hadis ini menekankan larangan saling mendahului atau membatalkan transaksi yang sudah disepakati dengan saudara muslim. Bisnis harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan menjaga kestabilan pasar.

3. Hadis Riwayat Abu Dawud
   Dari Jabir bin Abdullah ra., Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang paling disukai Allah Ta'ala dari transaksi adalah yang dilakukan dengan mudah." Hadis ini menunjukkan bahwa dalam bisnis, seorang Muslim harus memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan. Sikap ramah dan proses transaksi yang lancar merupakan bagian dari akhlak dalam bisnis yang dianjurkan.

4. Hadis Riwayat Muslim
   Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang kalian bersaing dalam hal harga dengan seseorang yang telah menyepakati harga dengan saudaranya, dan janganlah seorang kalian menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya." Hadis ini menegaskan larangan untuk bersaing dalam menurunkan harga atau menawar barang yang sudah disepakati dengan saudara muslim. Bisnis harus dilakukan dengan menghormati kesepakatan yang telah ada.

5. Hadis Riwayat Muslim

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang menipu, maka bukan termasuk golonganku." Hadis ini menegaskan bahwa penipuan dalam bisnis adalah perilaku yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seorang Muslim harus menjauhi segala bentuk penipuan dalam setiap transaksi bisnisnya.

6. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
   Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya kejujuran mengarah kepada kebaikan dan kebaikan mengarah kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan mengupayakan untuk selalu jujur, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah. Seorang Muslim diharapkan untuk berusaha menjaga kejujuran dalam setiap transaksi dan interaksi bisnisnya.

d. Urgensi Etika Bisnis Islam dalam Sektor Penyediaan Jasa

Urgensi etika bisnis Islam dalam sektor penyediaan jasa dan sektor pengadaan barang memiliki banyak kesamaan dalam hal prinsip-prinsip dasar, namun penerapannya bisa berbeda karena karakteristik unik dari kedua sektor tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan utama dalam urgensi etika bisnis Islam antara sektor penyediaan jasa:

a) Kontrol Kualitas Layanan

Di sektor penyediaan jasa, kontrol kualitas lebih berfokus pada evaluasi terhadap proses penyampaian layanan. Hal ini mencakup penilaian terhadap profesionalisme penyedia jasa, kesesuaian layanan dengan kebutuhan klien, dan responsivitas terhadap umpan balik pelanggan. Etika bisnis Islam mendorong penyedia jasa

untuk memberikan layanan yang konsisten dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan amanah, serta menawarkan solusi yang berkualitas untuk memenuhi harapan dan kebutuhan klien. Kontrol kualitas dalam penyediaan jasa tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pengalaman keseluruhan yang diberikan kepada klien, termasuk aspek-aspek seperti komunikasi, keramahan, dan penanganan keluhan.

Selain aspek teknis dan layanan, kontrol kualitas dalam etika bisnis Islam juga melibatkan aspek tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Perusahaan diharapkan untuk memilih pemasok atau mitra yang mematuhi praktik kerja yang adil dan berkelanjutan, serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang lebih luas dalam Islam tentang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kontrol kualitas tidak hanya tentang memastikan produk atau layanan memenuhi standar tertentu tetapi juga tentang menjaga integritas moral dan sosial perusahaan dalam setiap tahapan operasionalnya.

b) Kedalaman Interaksi dengan Klien

Pada penyediaan jasa, etika bisnis Islam menekankan lebih dari sekadar transaksi komersial. Interaksi dengan klien tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan bisnis, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Hal ini melibatkan komunikasi yang intensif untuk memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik klien, serta memberikan layanan yang memenuhi standar etika Islam seperti kejujuran dan amanah. Penyedia jasa diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang layanan yang ditawarkan, biaya yang terlibat, serta jaminan kualitas dan hasil yang diharapkan, sehingga klien

dapat membuat keputusan yang tepat dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kualitas layanan dalam penyediaan jasa juga ditekankan dalam etika bisnis Islam, dengan fokus pada *ihsan* atau kesempurnaan dalam pelayanan. Ini berarti penyedia jasa harus berusaha memberikan layanan terbaiknya, melebihi ekspektasi klien dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kesabaran, keramahan, dan komitmen terhadap keadilan dalam semua interaksi dengan klien.

c) Tanggung Jawab Sosial

Dalam sektor penyediaan jasa, urgensi etika bisnis Islam mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial yang luas dan mendalam. Tanggung jawab sosial ini mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran dalam interaksi dengan klien, keadilan dalam menetapkan harga dan penawaran layanan, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan klien tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai sumber pendapatan semata, tetapi juga sebagai cara untuk memenuhi amanah Allah SWT dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Konsep amanah dalam Islam menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam penyediaan jasa. Etika bisnis Islam menuntut agar setiap tindakan bisnis dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga membangun kepercayaan antara penyedia jasa dan klien. Selain itu, tanggung jawab sosial juga meliputi aspek sosial dan lingkungan, di mana perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap layanan yang mereka sediakan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat membangun reputasi yang kuat di pasar, tetapi

juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

d) Kepatuhan terhadap Hukum

Dalam sektor penyediaan jasa, urgensi etika bisnis Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan operasi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek layanan yang disediakan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak klien, termasuk dalam hal keamanan informasi dan kebijakan privasi, serta memastikan bahwa semua kegiatan bisnis tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga meliputi aspek etika dalam komunikasi dan transaksi dengan klien. Penyedia jasa dalam etika bisnis Islam diharapkan untuk menjaga kejujuran dalam semua interaksi dengan klien, termasuk dalam menjelaskan biaya layanan, jangka waktu pengerjaan, dan hasil yang diharapkan dari layanan yang diberikan. Ini tidak hanya membangun kepercayaan yang kuat antara penyedia jasa dan klien, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum dan etika Islam, perusahaan tidak hanya memperkuat reputasi mereka tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, perbedaan peran etika bisnis Islam antara sektor pengadaan barang dan penyediaan jasa mencerminkan tantangan unik dan prioritas masing-masing

sektor dalam menjaga integritas bisnis, memenuhi harapan pelanggan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dapat bervariasi sesuai dengan konteks operasional dan karakteristik layanan yang diberikan.

e. Tantangan Etika Bisnis Islam dalam Sektor Penyediaan Jasa

Tantangan etika bisnis Islam dalam sektor penyediaan jasa mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama:

a) Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Dalam sektor penyediaan jasa, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah merupakan pijakan utama yang menentukan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang merugikan atau tidak jelas akadnya. Hal ini menuntut agar setiap transaksi dan kegiatan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dianjurkan dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam keuntungan. Kepatuhan pada prinsip syariah juga mengharuskan perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi informasi, atau praktik korupsi yang bertentangan dengan etika Islam.

Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah juga mempengaruhi aspek lain dari operasi bisnis, termasuk pengelolaan risiko, pengembangan karyawan, dan hubungan dengan pelanggan serta pemasok. Pentingnya kepatuhan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk menjaga integritas perusahaan dalam jangka panjang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnisnya, perusahaan tidak hanya dapat membangun kepercayaan yang kokoh dengan semua pihak terkait, tetapi

juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

b) Etika dalam Hubungan Pelanggan

Dalam konteks etika bisnis Islam, hubungan dengan pelanggan harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang berkualitas. Penting bagi penyedia jasa untuk menjaga komunikasi yang jelas dan jujur dengan pelanggan mengenai layanan yang disediakan, termasuk harga, kualitas, dan kondisi lainnya. Prinsip keadilan juga berlaku dalam memperlakukan semua pelanggan dengan sama, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam setiap transaksi bisnis.

Selain itu, etika dalam hubungan pelanggan juga mencakup tanggung jawab untuk menanggapi keluhan atau masalah pelanggan dengan cepat dan tepat. Islam mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan empati dan menghargai kebutuhan mereka, sehingga menjadikan pentingnya untuk mendengarkan dan mengatasi masalah dengan penuh tanggung jawab. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam hubungan pelanggan, perusahaan tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan jangka panjang yang esensial dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan secara moral dan etis sesuai dengan ajaran Islam.

c) Pengelolaan Konflik Kepentingan

Dalam konteks bisnis, pengelolaan konflik kepentingan merupakan tantangan yang penting untuk diatasi dengan etika bisnis Islam. Konflik kepentingan dapat timbul ketika kepentingan personal atau institusional seseorang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau

pelanggan. Dalam Islam, prinsip keadilan dan kejujuran sangat ditekankan, sehingga perusahaan diharapkan untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola konflik kepentingan dengan transparan dan adil. Hal ini melibatkan penetapan kebijakan yang jelas dan implementasi prosedur yang memastikan bahwa keputusan bisnis tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kebaikan umum atau nilai-nilai moral yang dianut.

Pengelolaan konflik kepentingan juga melibatkan pendekatan proaktif untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik, serta kesiapan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika konflik terjadi. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga integritas dan reputasi yang baik, sambil memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan bisnis didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan konflik kepentingan tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membangun fondasi yang kuat dari kepercayaan dan keberlanjutan dalam operasi bisnis.

d) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Dalam sektor penyediaan jasa, pengelolaan lingkungan dan sosial merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dengan cermat sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan sosial komunitas sekitar. Tantangan utama di sini adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam operasi bisnis sehingga tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini mencakup implementasi praktik bisnis yang ramah

lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan penggunaan sumber daya yang efisien, serta berkontribusi positif terhadap komunitas lokal melalui inisiatif sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan dan sosial juga melibatkan tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Islam mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghindari pengeksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan menerapkan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban moralnya, tetapi juga membangun reputasi yang kuat sebagai agen perubahan positif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan dan sosial dalam konteks etika bisnis Islam bukan hanya merupakan keharusan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, sektor penyediaan jasa dapat berfungsi sebagai bagian integral dari perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkeadilan sosial.

C. Rangkuman

Etika bisnis Islam memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di berbagai sektor ekonomi, termasuk pengadaan barang dan penyediaan jasa. Keduanya memiliki keterkaitan dalam prinsip-prinsip moral yang mendasari ajaran Islam, namun juga menunjukkan perbedaan dalam implementasi dan tantangan yang dihadapi.

Pada sektor pengadaan barang, etika bisnis Islam menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan pada

prinsip-prinsip syariah dalam proses pengadaan. Prinsip transparansi memastikan bahwa semua proses tender dan pengambilan keputusan dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa adanya manipulasi atau diskriminasi. Keadilan dalam pengadaan barang mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk vendor dan pihak yang mengikuti tender. Prinsip syariah seperti larangan riba (bunga) dan spekulasi juga mempengaruhi cara transaksi bisnis dilakukan dalam sektor ini, menuntut agar setiap kontrak atau perjanjian mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Di sisi lain, dalam sektor penyediaan jasa, etika bisnis Islam menyoroti pentingnya integritas, kualitas layanan, dan tanggung jawab sosial. Integritas dalam penyediaan jasa mencakup melakukan layanan dengan jujur dan adil, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan atau menipu pelanggan. Kualitas layanan harus memenuhi standar yang tinggi, sesuai dengan nilai-nilai moral Islam yang menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam setiap karya yang dilakukan. Tanggung jawab sosial dalam sektor ini menuntut perusahaan untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Keterkaitan antara kedua sektor ini terletak pada penerapan nilai-nilai etika Islam yang sama-sama mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam interaksi bisnis. Baik dalam pengadaan barang maupun penyediaan jasa, etika bisnis Islam mengajarkan untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan untuk bertindak sesuai dengan kebaikan bersama. Namun, perbedaan terletak pada konteks dan spesifikasi praktik bisnis yang harus diatur. Pengadaan barang lebih menitikberatkan pada proses transaksi dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam yang terkait dengan perdagangan dan transaksi finansial, sementara penyediaan jasa menyoroti

interaksi dan kualitas layanan yang lebih personal serta tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam kedua sektor ini meliputi pengelolaan risiko, pengembangan kebijakan yang berbasis etika, serta pendidikan dan kesadaran akan prinsip-prinsip moral yang dianjurkan dalam Islam. Pengelolaan risiko mencakup identifikasi dan mitigasi potensi konflik kepentingan serta pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari operasi bisnis. Kebijakan yang berbasis etika harus dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis, baik dalam pengadaan barang maupun penyediaan jasa, dipandu oleh prinsip-prinsip moral yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar dan hukum yang berlaku, tetapi juga mematuhi nilai-nilai yang dianut dalam Islam. Pendidikan dan kesadaran akan etika bisnis Islam menjadi kunci dalam membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada integritas dan kualitas dalam setiap aspek operasionalnya.

Secara keseluruhan, keterkaitan dan perbedaan antara etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang dan penyediaan jasa menunjukkan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang relevan dalam konteks bisnis yang berbeda. Dengan menjaga konsistensi dalam prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memenuhi harapan etis dari pelanggan dan masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam pandangan agama Islam.

D. Penilaian Formatif

a. Pilihan Ganda

1. Dalam sektor penyediaan jasa, apa yang ditekankan oleh etika bisnis Islam selain kejujuran dan keadilan?
   a) Inovasi
   b) Kualitas layanan
   c) Kecepatan

d) Harga murah

2. Apa yang dihindari dalam setiap kontrak dan transaksi bisnis menurut prinsip syariah dalam sektor pengadaan barang?
   a) Diskon besar
   b) Spekulasi dan riba (bunga)
   c) Negosiasi harga
   d) Promosi produk
3. Bagaimana etika bisnis Islam memandang perlakuan terhadap pelanggan dalam sektor penyediaan jasa?
   a) Pelanggan harus mendapatkan harga murah
   b) Pelanggan harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi
   c) Pelanggan harus membayar di muka
   d) Pelanggan harus menerima segala kondisi yang ditetapkan perusahaan
4. Tanggung jawab sosial dalam sektor penyediaan jasa mencakup...
   a) Peningkatan keuntungan
   b) Memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar
   c) Mempercepat layanan
   d) Mengurangi biaya operasional
5. Apa yang harus dihindari perusahaan dalam sektor pengadaan barang untuk menjaga kepatuhan terhadap etika bisnis Islam?
   a) Proses tender yang terbuka
   b) Nepotisme dan korupsi
   c) Inovasi dalam produk
   d) Kerjasama dengan pihak asing

6. Risiko utama dalam sektor pengadaan barang meliputi...
   a) Ketidakpastian harga, kualitas barang yang tidak sesuai, dan keterlambatan pengiriman

b) Kehilangan pelanggan
c) Peningkatan biaya operasional
d) Persaingan pasar

7. Bagaimana cara mengelola konflik kepentingan dalam etika bisnis Islam di sektor penyediaan jasa?
   a) Mengabaikan konflik
   b) Mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola konflik dengan transparan dan adil
   c) Menyembunyikan konflik
   d) Menghindari keputusan yang sulit
8. Pengembangan kebijakan berbasis etika dalam sektor pengadaan barang harus mencakup...
   a) Prosedur untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses tender dan kontrak
   b) Cara meningkatkan keuntungan
   c) Pengurangan biaya produksi
   d) Pengelolaan sumber daya manusia
9. Apa yang menjadi fokus utama dalam etika bisnis Islam di sektor penyediaan jasa selain kualitas layanan?
   a) Peningkatan efisiensi
   b) Tanggung jawab sosial
   c) Pengurangan biaya
   d) Penjualan cepat
10. Apa yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan etika bisnis Islam untuk sektor penyediaan jasa?
    a) Pentingnya kualitas layanan dan tanggung jawab sosial
    b) Pengurangan biaya produksi
    c) Penghapusan bonus karyawan
    d) Penambahan produk baru

b. Benar/Salah

1. (Benar/Salah) Etika bisnis Islam dalam sektor penyediaan jasa menekankan kualitas layanan dan integritas dalam interaksi dengan pelanggan.
2. (Benar/Salah) Pengadaan barang lebih menitikberatkan pada interaksi dan kualitas layanan yang lebih personal.
3. (Benar/Salah) Tanggung jawab sosial dalam sektor penyediaan jasa mencakup kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar
4. (Benar/Salah) Pengelolaan risiko dalam sektor pengadaan barang mencakup ketidakpastian harga, kualitas barang yang tidak sesuai, dan keterlambatan pengiriman.
5. (Benar/Salah) Dalam etika bisnis Islam, perusahaan dalam sektor penyediaan jasa tidak perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatannya.
6. (Benar/Salah) Pengembangan kemitraan yang berkelanjutan dengan pelanggan dan komunitas penting dalam sektor pengadaan barang.
7. (Benar/Salah) Risiko utama dalam sektor penyediaan jasa berkaitan dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.
8. (Benar/Salah) Kebijakan berbasis etika dalam sektor pengadaan barang harus menekankan pentingnya kualitas layanan dan tanggung jawab sosial.
9. (Benar/Salah) Dalam etika bisnis Islam, keadilan hanya diterapkan dalam sektor pengadaan barang, bukan dalam sektor penyediaan jasa.
10. (Benar/Salah) Pengawasan dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan semua proses bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Esai

1. Apa saja tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam sektor penyediaan jasa menurut etika

bisnis Islam? Berikan beberapa contoh inisiatif sosial yang relevan.

2. Bandingkan fokus utama etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang dan sektor penyediaan jasa. Apa perbedaan utama yang Anda temukan?
3. Jelaskan bagaimana pengelolaan risiko dilakukan dalam sektor pengadaan barang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Apa saja tantangan yang dihadapi?
4. Bagaimana pengawasan dan akuntabilitas dijalankan dalam sektor pengadaan barang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah? Berikan contoh implementasi yang efektif.
5. Diskusikan peran kualitas layanan dalam sektor penyediaan jasa dan bagaimana hal ini mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam.
6. Jelaskan pentingnya pengembangan kebijakan berbasis etika dalam sektor pengadaan barang. Apa saja elemen penting yang harus ada dalam kebijakan tersebut?
7. Bagaimana konflik kepentingan dapat mempengaruhi operasi bisnis dalam sektor penyediaan jasa? Jelaskan cara-cara untuk mengelola konflik kepentingan sesuai etika bisnis Islam.
8. Apa peran tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) dalam sektor penyediaan jasa? Bagaimana TJSP dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam?
9. Bagaimana perusahaan dalam sektor penyediaan jasa dapat memastikan bahwa semua layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam?
10. Jelaskan bagaimana pengelolaan lingkungan dan sosial menjadi tantangan dalam sektor penyediaan jasa. Bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam untuk mengatasi tantangan ini?

d. Studi Kasus

1. Buatlah infografis yang menjelaskan perbedaan utama antara etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang dan sektor penyediaan jasa.
2. Rancanglah sebuah kebijakan berbasis etika yang dapat diterapkan dalam perusahaan pengadaan barang untuk memastikan transparansi dalam proses tender.
3. Buatlah poster kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di sektor penyediaan jasa sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.
4. Desainlah sebuah survei untuk mengukur pemahaman karyawan mengenai etika bisnis Islam di sektor penyediaan jasa. Apa saja pertanyaan yang akan Anda masukkan dalam survei tersebut?
5. Tulis sebuah artikel blog yang menjelaskan pentingnya kualitas layanan dalam sektor penyediaan jasa dan bagaimana perusahaan dapat mencapainya dengan mengikuti etika bisnis Islam.
6. Rancang sebuah kampanye sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam sektor pengadaan barang. Apa pesan utama kampanye Anda dan bagaimana Anda akan menyampaikan pesan tersebut melalui berbagai platform?
7. Buatlah konsep inovatif untuk sebuah produk atau layanan baru di sektor penyediaan jasa yang mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jelaskan bagaimana konsep tersebut memenuhi standar keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
8. Jika Anda menjadi pembicara dalam seminar pada suatu perusahaan di sektor penyediaan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika

bisnis Islam. Bagaimana Anda akan memaparkan materi tersebut.

9. Buatlah sebuah ide proyek tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan di sektor pengadaan barang. Proyek ini harus mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
10. Jika Anda seoran manajer pada suatu perusahaan pengadaan barang, bagaimana Anda harus menyelesaikan masalah etika yang muncul dalam proses bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam?

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8, No. 1 (2022).

Afrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah," *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* Vol. 7, No. 1 (2018).

Ahmad Lukman Nugraha, "Penerapan Etika Bisnis Islam di Koppontren La Tansa Pondok Modern Darussalam Gontor, Tahun 2015," *Jurnal Ekonomi Syariah UMM,* Vol. 7, No. 3 (2017).

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 1, No. 2 (2012).

Andarwati, Tiasri, et al, "Mengintregasikan Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perusahaan", *Journal Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy,* Vol. 2, No. 1 (2023).

Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika,* Vol. 2, No. 2 (2018).

Aziz dan Al Rizky (2024). Penganter E-Commerce Business di Era Digital. Purwokerto: Wawasan Ilmu.

Dian May Syifa, "Konsep Jual beli pada Binomo; Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer,* Vol. 5, No. 1 (2023).

Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1, (2020).

Fadilah, Amalia dan Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2019).

Firdha Nabela, "Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Utama,* Vol. 2, No. 2 (2023).

Harry Irawan, "Eksplorasi Fatwa Sahabat dalam Persoalan Muamalah*", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 9, No. 1, (2024).

Iqbal, Muhammad, "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM", *Jurnal USM Law Review,* Vol. 3, No. 1 (2020).

Iqlima Fahrunisa, "Analisis Fatwa DSN MUI tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam,* Vol. 7, No. 1, (2023).

Kusumadewi, R., Fitriadi, H., Sari, A. F. K., Zulfkar, A. L., Islami, P. Y. N., Amrina, D. H., & Adab, P. PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF & EKONOMI INDUSTRI BERBASIS DIGITAL. Penerbit Adab.

Marthalia, Debby, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk", *Jurnal EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 2, No. 2 (2019).

Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syariah,* Vol. 20, No. 2 (2018).

Nabila, Rifa, "Analisis Etika Bisnis Islam dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Sektor Kuliner di Kota Banda Aceh", (*Skripsi,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 7, No. 1 (2021).

Nugroho, Sugeng Hadi, "Analisis Implementasi Manajemen Persediaan Bahan Baku pada Industri Kuliner dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa,* Vol. 17, No. 2 (2020).

Rahmadan, "Kontribusi Sektor Pengadaan Gas dan Listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 4 (2023).

Rianti, Selvi dan Zaili Rusli, "Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 3 (2019).

Rosyidah, Eva dan Khusniati Rofiah, "Etika Bisnis Islam: Pendekatan Siklus Ekonomi dan Praktik Bisnis Syariah dalam Ekspansi Waralaba Industri Retail", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 5 (2024).

Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2019).

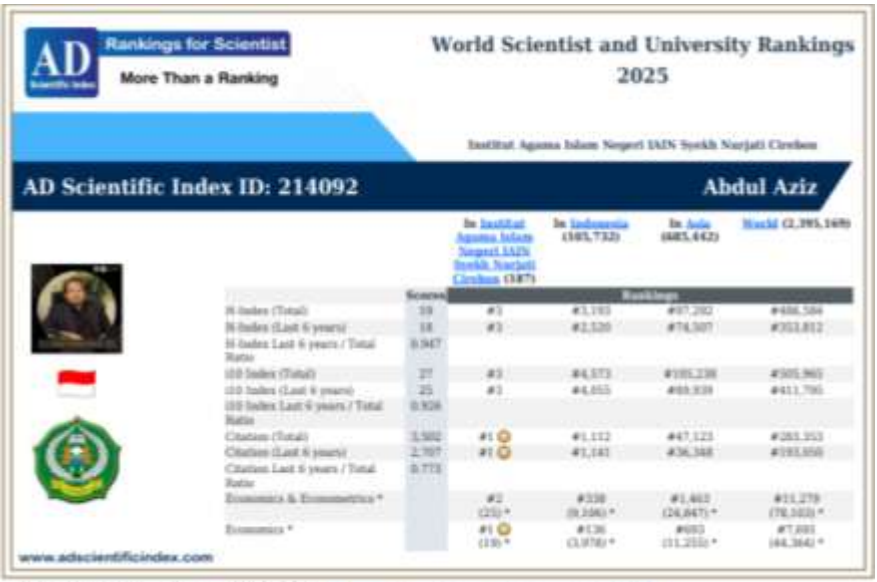
Sutrisno, Slamet dan Zeze Zakaria Hamzah, "Analisis Metode *Work from Home* terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Sektor Non Esensial dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 1, No. 9 (September, 2021).

Triwibowo, Ananto, "Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi", *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah,* Vol. 2, No. (2023).

Zainuddin dan Ummal Khoiriyah, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan Jasa", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 15, No. 2 (2021).

BIOGRAFI PENULIS







Naufal Luthfi Alifa, SE., M.E lahir di Cirebon pada 25 Desember 1997, adalah seorang akademisi muda di bidang Ekonomi Syariah. Setelah meraih gelar Sarjana Perbankan Syariah dan Magister Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kini ia aktif terlibat mengajar di kampus yang sama dalam beberapa mata kuliah, sekaligus menerbitkan beberapa buku terkait Etika Bisnis Islam, Kebijakan Ekonomi Fiskal, serta Ekonomi Zakat dan Wakaf. Filosofinya dalam pengajaran adalah menyelaraskan teori dan praktik, sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip syariah secara praktis dalam dunia modern. Di luar kelas, ia juga tergabung dalam tim akreditasi program Pascasarjana, yang memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas kurikulum dan kinerja pendidikan tinggi melalui pengawasan evaluasi standar mutu akademik.